



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

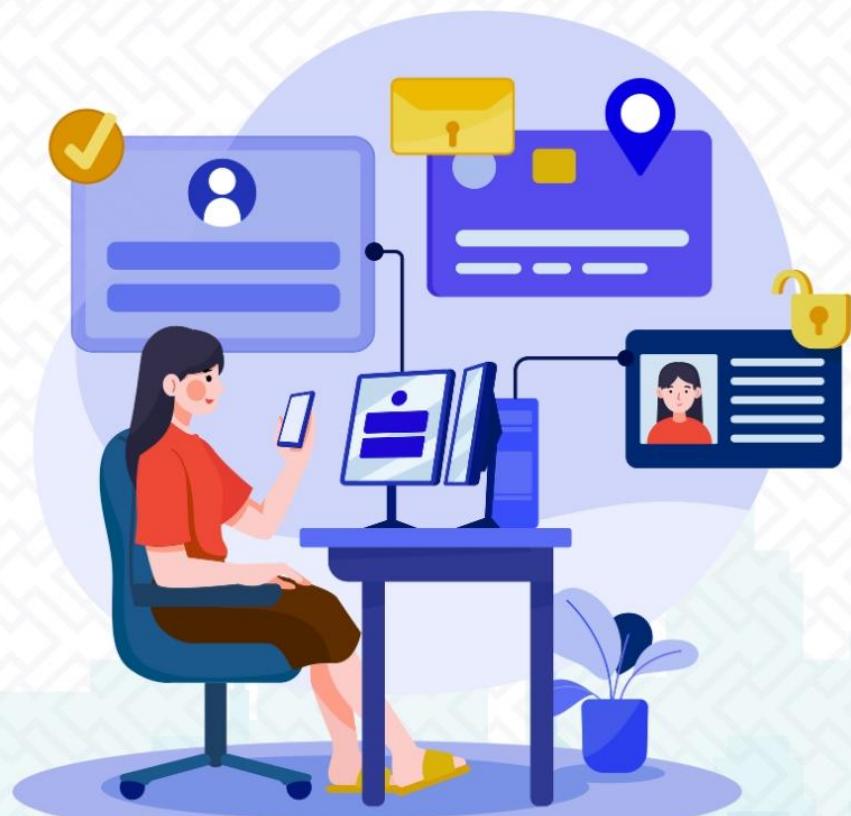
SNKI STRATEGI
NASIONAL
KEUANGAN
INKLUSIF
Membangun Indonesia Sejahtera



LAPORAN PELAKSANAAN

STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

TAHUN 2024



LAPORAN PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

TAHUN 2024

Halaman ini sengaja dikosongkan

SAMBUTAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Om swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Dalam upaya mendorong program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto tahun 2024 - 2029, DNKI telah mendorong akselerasi inklusi keuangan masyarakat. Berdasarkan hasil SNLIK pada tahun 2024 secara nasional indeks inklusi keuangan telah mencapai sebesar 92,74 persen dari tahun 2023 sebesar 88,7 persen, atau meningkat sebesar 4,04 poin persentase.

Peningkatan indeks inklusi dan literasi keuangan tersebut tidak terlepas dari strategi dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) baik kementerian/lembaga, otoritas, dan regulator bersama pemerintah daerah dalam kerangka TPAKD, serta mitra nasional dan internasional dalam mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Inklusi dan literasi keuangan merupakan bagian penting dari Asta Cita Bapak Presiden, karena keduanya berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Melalui literasi keuangan yang baik memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan keuangan yang tepat, mengelola risiko, dan mencapai tujuan keuangan mereka. Sedangkan dengan inklusi keuangan, masyarakat, terutama di daerah tertinggal, dapat mengakses modal usaha, layanan keuangan mikro, dan produk keuangan lainnya yang dapat meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan tahunan pelaksanaan SNKI merupakan implementasi Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang SNKI, yang meliputi program edukasi dan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi berbasis hak properti masyarakat, intermediasi dan saluran distribusi, layanan keuangan sektor pemerintah, perlindungan konsumen, kebijakan dan regulasi yang kondusif, serta teknologi informasi dan komunikasi. Penerima manfaat program/kegiatan inklusi keuangan terdiri dari segmen prioritas: perempuan, disabilitas, pelajar/pemuda/santri, pekerja migran, masyarakat tertinggal-terdepan-terluar (3T), usaha mikro dan kecil, serta masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga diharapkan dengan inklusi dan literasi keuangan yang baik akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, stabilitas sistem keuangan, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kesenjangan ekonomi baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

DNKI terus berkomitmen untuk mendukung akselerasi inklusi dan literasi keuangan serta mengurangi kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan, melalui implementasi amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dengan melakukan penguatan kelembagaan baik di pusat dan daerah serta penyusunan strategi nasional literasi dan inklusi keuangan. Diharapkan dengan penguatan kelembagaan dan strategi nasional yang seimbang antara inklusi dan literasi, maka kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi semakin kecil serta inklusi keuangan semakin berkualitas, khususnya bagi segmen yang relatif masih rendah, antara lain komunitas difabel dan masyarakat 3T.

Laporan tahunan ini disusun sebagai salah satu upaya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SNKI tahun 2024. Ucapan terima kasih sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada kementerian/lembaga, Bank Indonesia (BI) , Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota POKJA DNKI; BUMN; lembaga keuangan bank dan nonbank; swasta nasional; mitra internasional serta pemerintah daerah dan BUMD anggota TPAKD. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun program kerja di tahun berikutnya, sehingga target inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2045 sebesar 98 persen dapat tercapai.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera

Om shanti om



**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif
Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T**

SAMBUTAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Om swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan ini berisi tentang perkembangan Pelaksanaan SNKI, Program dan Kegiatan dalam mendorong keuangan inklusif dan literasi keuangan,

serta kendala dan permasalahan yang dihadapi Kelompok Kerja (POKJA) DNKI dan Sekretariat bersama mitra DNKI. Perkembangan keuangan inklusif di Indonesia terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 mencapai 92,74 persen meningkat sebesar 4,04 poin persentase dibandingkan tahun 2023 sebesar 88,7 persen. Sementara tingkat literasi keuangan pada tahun 2024 mencapai 66,64 persen mengalami peningkatan sebesar 1,21 poin persentase dibandingkan tahun 2023 sebesar 65,43 persen (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, 2024).

Peningkatan inklusi dan literasi keuangan sebagaimana hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi program yang dilakukan oleh Pokja DNKI dan sekretariat. Pokja I DNKI telah melakukan 5.954 kegiatan edukasi dan literasi keuangan dengan penerima manfaat sebesar 16,9 juta baik daring maupun luring. Untuk meningkatkan akses kepada lembaga keuangan formal melalui hak properti masyarakat, Pokja II DNKI telah memfasilitasi penerbitan lebih dari 11 juta bidang tanah. Sementara untuk fasilitasi intermediasi dan distribusi keuangan, Pokja III DNKI telah mengimplementasikan penggunaan QRIS dengan volume transaksi mencapai 6,24 miliar dan jumlah pengguna sebanyak 55,43 juta. Selanjutnya untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah, Pokja IV DNKI telah mengkoordinasikan elektronifikasi bantuan sosial dan pembiayaan bersubsidi dengan total 42,44 juta masyarakat penerima manfaat.

Dalam upaya meningkatkan layanan terhadap pengaduan masyarakat, Pokja V DNKI telah memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen sektor keuangan sebesar 90,3 persen. Sementara, untuk meningkatkan awareness kementerian/lembaga dan TPAKD, Pokja VI telah mendorong penerbitan beberapa regulasi antara lain pembentukan Satuan Tugas Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk percepatan pembukaan rekening bagi

pelajar baik konvensional maupun syariah. Sampai dengan tahun 2024 telah terbit sebanyak 58,12 juta akun KEJAR dengan nilai tabungan sebesar Rp 35,30 Triliun. Untuk memperluas jangkauan pelayanan inklusi keuangan melalui infrastruktur dan teknologi informasi keuangan telah dibangun Satelit Multifungsi Satria pada 11 lokasi stasiun dengan kapasitas satelit sebesar 150 *giga byte per second* (GBps) untuk mendukung pelayanan *fast payment*.

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan SNKI khususnya terkait literasi keuangan, *stakeholder* inklusi keuangan dan literasi keuangan masih menghadapi beberapa kendala strategis, antara lain: masih tingginya kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan yang pada tahun 2024 terdapat *gap* 26,1 persen. Hal ini berarti masih banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan sektor keuangan namun belum memiliki pemahaman yang memadai. Selain itu, terdapat beberapa segmen prioritas yang masih relatif tertinggal di dalam menggunakan layanan sektor keuangan, seperti: masyarakat yang tinggal di pedesaan, komunitas disabilitas, pekerja migran Indonesia, belum optimalnya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi daerah 3T, dan akses terhadap keuangan syariah. Oleh karena itu, pada tahun yang akan datang kegiatan edukasi/sosialisasi perlu diarahkan pada kelompok sasaran dimaksud.

Saya ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga Laporan Pelaksanaan SNKI Tahun 2024 ini dapat terselesaikan. Besar harapan kami laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam monitoring capaian dan evaluasi program bersama untuk percepatan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Indonesia baik oleh Pokja DNKI maupun para pemangku kepentingan keuangan inklusif di daerah yang tergabung dalam TPAKD.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera

Om shanti om



Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Dr. Ir. Ali Murtopo Simbolon, S.T, S.Si, M.M, M.T, IPU.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.....	iv
SAMBUTAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Perkembangan Keuangan Inklusif.....	3
1.2 Arah Kebijakan Keuangan Inklusif	8
1.3 Kontribusi Keuangan Inklusif dalam Pembangunan Nasional.....	12
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
2.1 Indikator Jangkauan Akses	17
2.2 Indikator Penggunaan	19
2.3 Indikator Kualitas.....	21
2.4 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	23
BAB III CAPAIAN KELOMPOK KERJA.....	25
3.1 Pokja I Edukasi Keuangan	28
3.2 Pokja II Hak Properti Masyarakat.....	37
3.3 Pokja III Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan.....	42
3.4 Pokja IV Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah.....	48
3.5 Pokja V Perlindungan Konsumen	51
3.6 Pokja VI Kebijakan dan Regulasi	54
3.7 Pokja VII Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan	55
3.8 Sekretariat.....	59
3.9 Sinergi dan Kolaborasi Program.....	63
BAB IV PENINGKATAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	73
BAB V PENUTUP.....	89
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Rekomendasi	92
LAMPIRAN	95
DAFTAR SINGKATAN.....	119

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan capaian inklusi keuangan yang melampaui target yang ditetapkan oleh Presiden RI selaku Ketua DNKI, yaitu sebesar 92,74 persen masyarakat usia dewasa telah menggunakan produk dan layanan keuangan formal. Capaian ini mencerminkan perluasan jangkauan akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan formal yang semakin merata, meski masih terdapat kelompok sasaran prioritas yang belum sepenuhnya terlayani. Seiring dengan peningkatan inklusi keuangan tersebut, tingkat literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan juga meningkat signifikan hingga mencapai 66,64 persen pada tahun 2024.

Pencapaian kinerja inklusi keuangan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga anggota DNKI, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri dan pemuda sebagaimana kelompok sasaran yang ditetapkan pada Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan yang turut melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga keuangan dengan *branchless office* dan digitalisasi keuangan, elektronifikasi program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan pelindungan konsumen sektor keuangan dan pelaksanaan *market conduct*, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung inklusi keuangan.

Dalam pelaksanaan berbagai program inklusi keuangan, pemerintah daerah memegang peran strategis melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang pada tahun 2024 telah terbentuk secara lengkap di 552 daerah, meliputi seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang terdiri dari 38 TPAKD provinsi dan 514 TPAKD kabupaten/kota. TPAKD menjadi ujung tombak dalam mengawal perluasan akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal, sekaligus mendorong literasi keuangan masyarakat hingga ke lapisan terbawah dan wilayah terpencil, sehingga dampak nyata inklusi keuangan dapat dirasakan secara merata.

Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memastikan *no one left behind* dalam akses keuangan, inklusi keuangan telah secara eksplisit ditetapkan sebagai indikator utama pembangunan nasional dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dengan target 98 persen pada tahun 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Inklusi keuangan

dipandang penting untuk mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan kemiskinan, memperkecil kesenjangan antarindividu dan antardaerah, mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung Asta Cita Presiden terkait pemerataan pembangunan dan kesenjangan antar golongan.

Selanjutnya dari sisi kelembagaan, untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan efektivitas pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan, pemerintah juga sedang menyiapkan penguatan kelembagaan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Komnas LIK akan berperan sebagai forum koordinasi tingkat nasional yang lebih kuat, dengan mandat untuk merumuskan strategi, mengawal pelaksanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi program literasi dan inklusi keuangan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan, guna memastikan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pada tingkat daerah kelembagaan TPAKD akan diperkuat menjadi Tim Percepatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah (TPLIKD). Sementara untuk penguatan literasi maka SNKI akan disempurnakan menjadi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (Stranas LIK).

01

PENDAHULUAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

1.1 Perkembangan Keuangan Inklusif

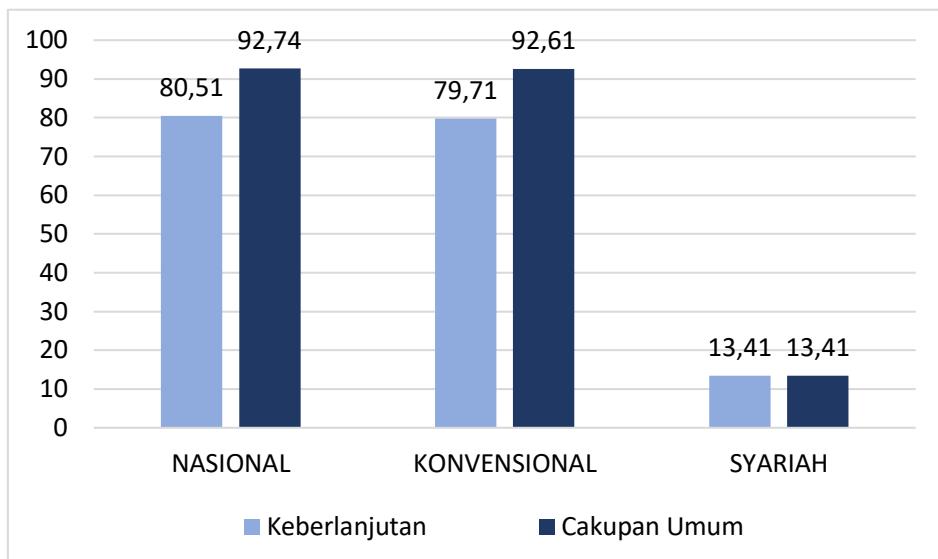
Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan Masyarakat (UU No. 4/2023 tentang P2SK). Indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga jenis dimensi sebagai berikut, (i) Jangkauan/akses, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya; (ii) Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk; dan (iii) tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk menghitung indeks inklusi keuangan Tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Parameter yang digunakan dalam menghitung indeks inklusi keuangan adalah penggunaan (*usage*) terhadap produk dan layanan keuangan. Metode penghitungan SNLIK dilakukan menggunakan dua metode. (i) Pertama, disebut sebagai Metode Keberlanjutan, adalah metode perhitungan yang dilakukan dengan cakupan sembilan sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, *Fintech Lending* (Pindar), PT Permodalan Nasional Madani) dan Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) sebagaimana cakupan pada SNLIK Tahun 2024 sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program literasi dan inklusi keuangan oleh pengelola usaha jasa keuangan. (ii) Kedua, disebut sebagai Metode Cakupan Umum, adalah metode penghitungan yang memperluas cakupan sektor keuangan dengan penambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Lembaga Jasa Keuangan Lain (Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto/PT Pos Indonesia/Lembaga Penjaminan/dan lain-lain).

Capaian Inklusi Keuangan Nasional

Berdasar metode cakupan umum indeks inklusi keuangan nasional sebesar 92,74 persen, indeks inklusi keuangan konvensional sebesar 92,61 persen, dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 persen. Sedangkan metode perhitungan tanpa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Lembaga Jasa Keuangan Lain (Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto/PT Pos Indonesia/Lembaga Penjaminan/dan lain-lain) (metode keberlanjutan), hasil SNLIK 2024 secara nasional, indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen, indeks inklusi keuangan konvensional sebesar 79,71 persen, dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 persen.

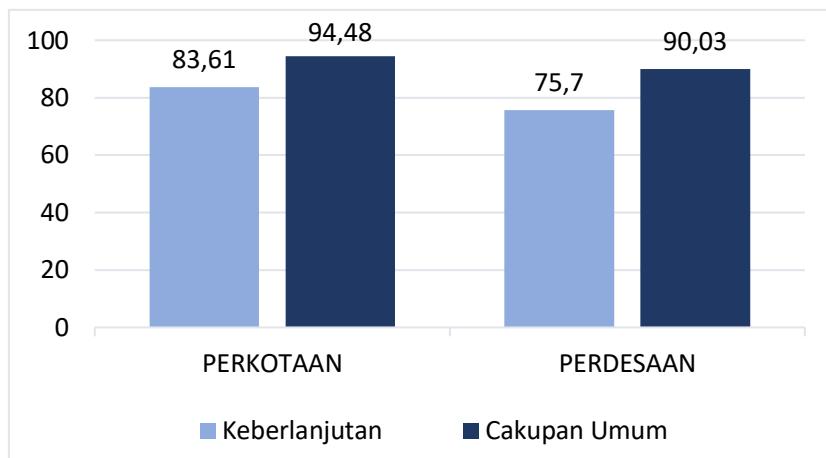
Grafik 1. Indeks Inklusi Keuangan Nasional



Inklusi Keuangan Menurut Wilayah Perkotaan dan Perdesaan

Metode cakupan umum inklusi keuangan wilayah perkotaan sebesar 94,48 persen, lebih besar dibanding wilayah perdesaan sebesar 90,03 persen. Metode keberlanjutan, berdasarkan disagregasi wilayah, inklusi keuangan wilayah perkotaan sebesar 83,61 persen, lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan sebesar 75,70 persen.

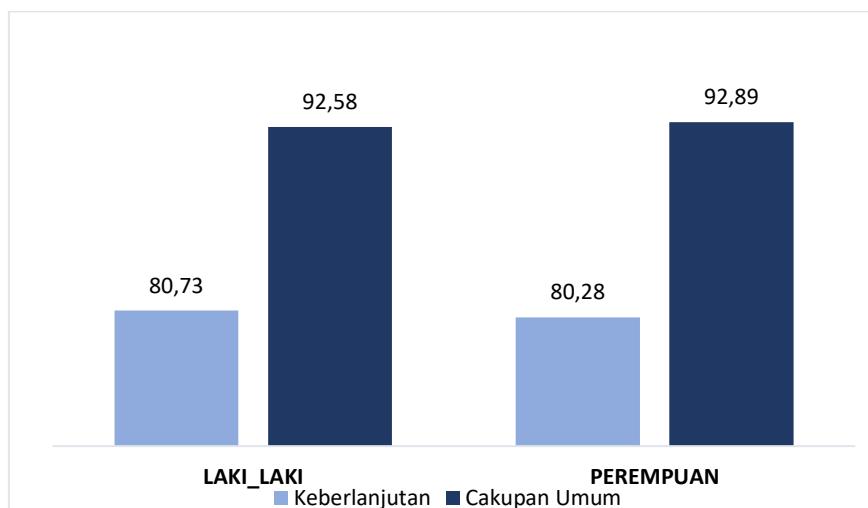
Grafik 2. Indeks Inklusi Keuangan Menurut Wilayah Perkotaan dan Perdesaan



Inklusi Keuangan Menurut Gender/Jenis Kelamin

Metode cakupan umum indeks inklusi keuangan laki-laki sebesar 92,58 persen sebanding dengan perempuan sebesar 92,89 persen. Sedangkan metode keberlanjutan, berdasarkan gender/jenis kelamin, indeks inklusi keuangan laki-laki sebesar 80,73 persen sebanding dengan perempuan sebesar 80,28 persen.

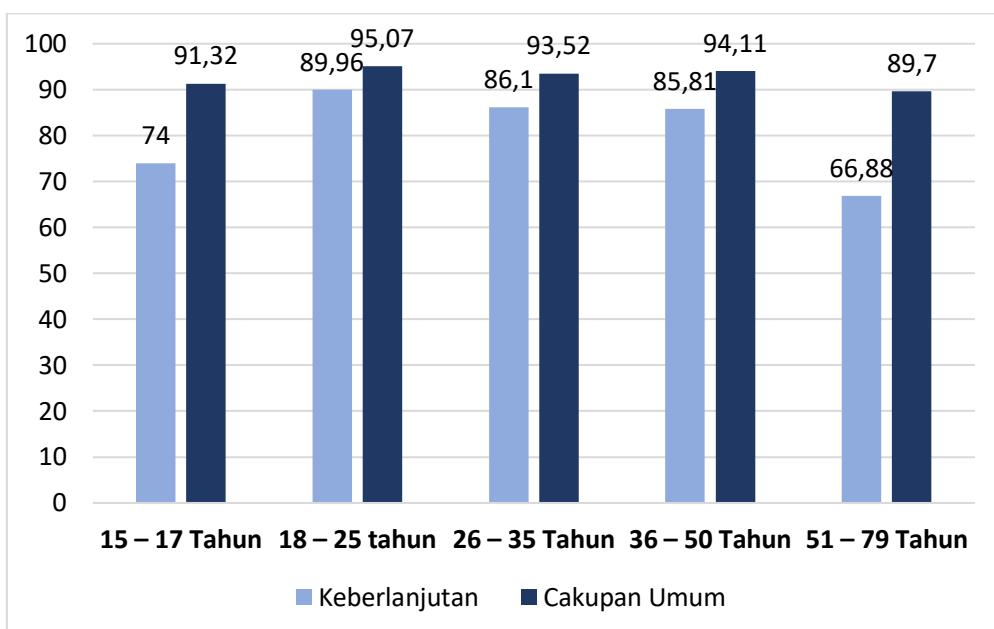
Grafik 3. Indeks Inklusi Keuangan Menurut Gender/Jenis Kelamin



Inklusi Keuangan Menurut Kelompok Umur

Metode cakupan umum indeks inklusi keuangan tertinggi pada kelompok umur 18-25 tahun, 36-50 tahun, 26-35 tahun yakni masing-masing sebesar 95,07 persen, 94,11 persen dan 93,52 persen. Sebaliknya, kelompok umur 51-79 tahun dan 15-17 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 89,70 persen dan 91,32 persen. Sedangkan metode keberlanjutan berdasarkan umur, kelompok umur 18-25 tahun, 26-35 tahun, dan 36-50 tahun memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 89,96 persen, 86,10 persen dan 85,81 persen. Sebaliknya, kelompok umur 51-79 tahun dan 15-17 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 66,88 persen dan 74,00 persen.

Grafik 4. Indeks Inklusi Keuangan Menurut Kelompok Umur

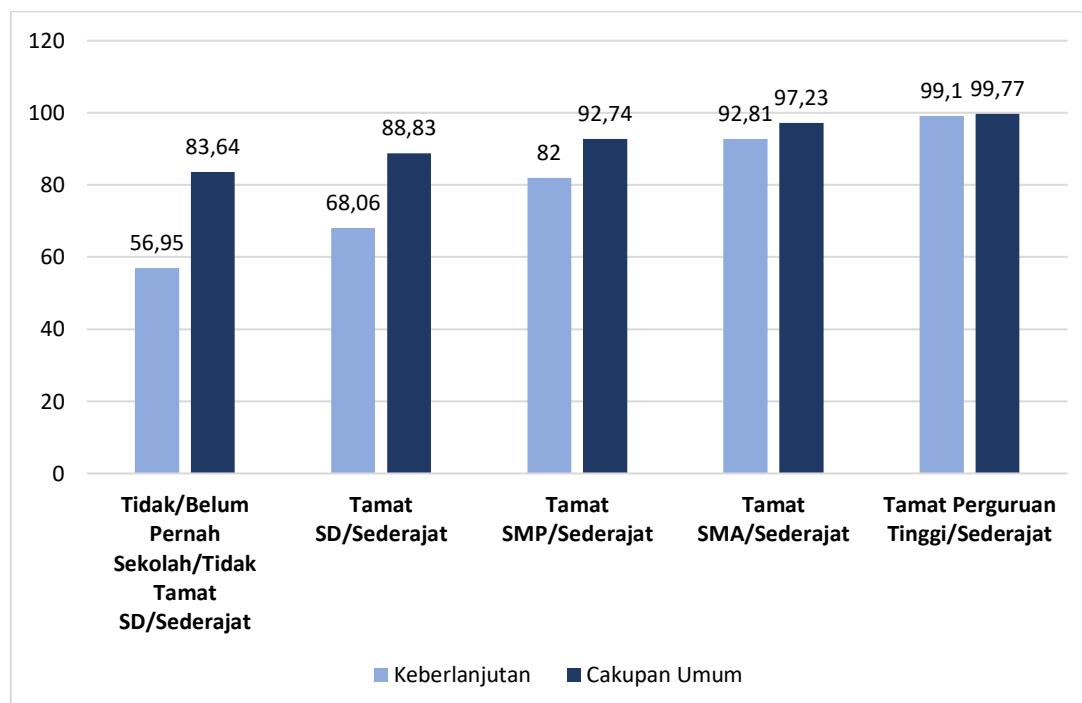


Inklusi Keuangan Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Metode cakupan umum kelompok dengan pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/sederajat dan tamat SMP/sederajat memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 99,77 persen, 97,23 persen dan 92,74 persen. Sebaliknya, kelompok dengan tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 83,64 persen dan 88,83 persen. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat inklusi keuangan.

Metode keberlanjutan, berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kelompok dengan pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/sederajat dan tamat SMP/sederajat memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 99,10 persen, 92,81 persen dan 82,00 persen. Selain itu, kelompok dengan tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 56,95 persen dan 68,06 persen. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi indeks inklusi keuangan.

Grafik 5. Indeks Inklusi Keuangan Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan



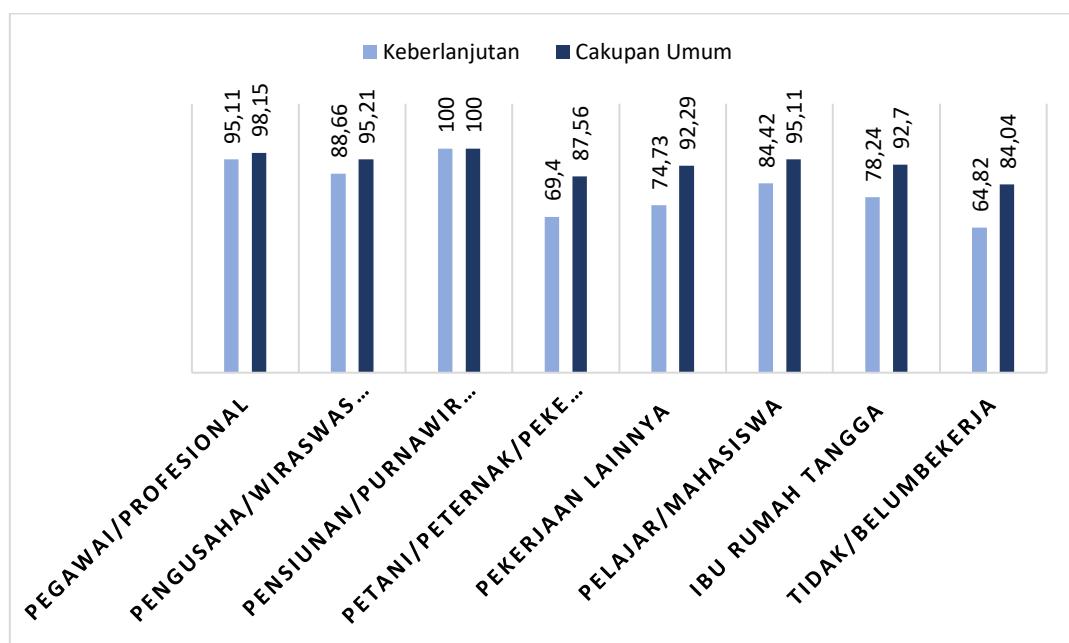
Inklusi Keuangan Menurut Pekerjaan/Kegiatan Sehari-hari

Metode cakupan umum, kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/professional, dan pengusaha/wiraswasta memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 100,00 persen, 98,15 persen dan 95,21 persen. Sebaliknya, kelompok tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan, dan pekerjaan lainnya memiliki

indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 84,04 persen, 87,56 persen dan 92,29 persen. Dapat disimpulkan bahwa indeks inklusi keuangan ditopang oleh 3 kelompok yaitu Pegawai/Profesional, Pengusaha/Wiraswasta, dan Pensiun/Purnawirawan.

Metode keberlanjutan, kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional, dan pengusaha/wiraswasta memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 100,00 persen, 95,11 persen dan 88,66 persen. Sebaliknya, kelompok tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan, dan pekerjaan lainnya memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 64,82 persen, 69,40 persen dan 74,73 persen.

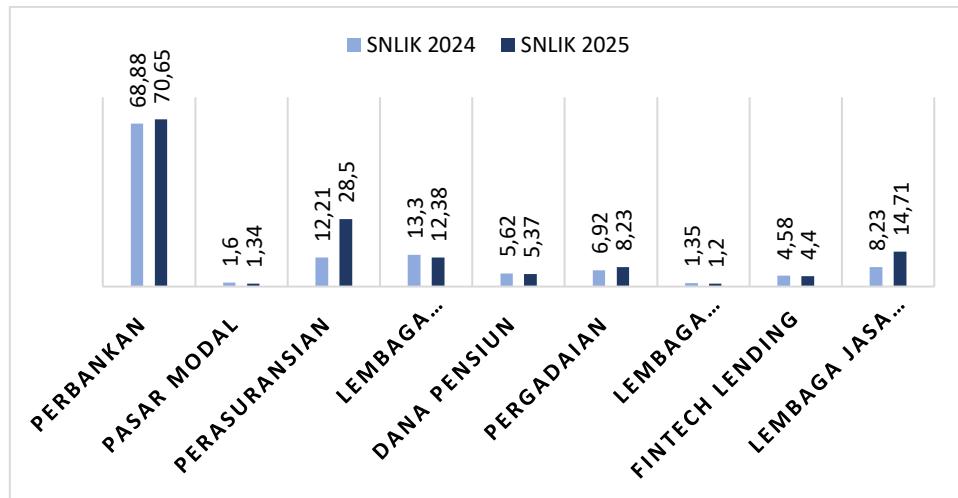
Grafik 6. Indeks Inklusi Keuangan Menurut Pekerjaan/Kegiatan Sehari-hari



Inklusi Keuangan Menurut Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan sektor jasa keuangan, indeks inklusi keuangan masih ditopang paling tinggi oleh sektor Perbankan yakni sebesar 70,65 persen. Selanjutnya untuk sektor Pasar Modal sebesar 1,34 persen, Perasuransian sebesar 28,5 persen, Lembaga Pembiayaan sebesar 12,38 persen, Dana Pensiun sebesar 5,37 persen, Pergadaian sebesar 8,23 persen, Lembaga Keuangan Mikro sebesar 1,2 persen, Fintech Lending sebesar 4,4 persen, dan Lembaga Jasa keuangan Lainnya sebesar 14,71 persen.

Grafik 7. Indeks Inklusi Keuangan Menurut Sektor Jasa Keuangan



1.2 Arah Kebijakan Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui keuangan inklusif, masyarakat dipastikan memiliki akses, penggunaan, dan kualitas layanan yang memadai terhadap berbagai produk keuangan formal, meliputi tabungan, pembiayaan, asuransi, pasar modal, dan pembayaran transaksi. Himpunan dana masyarakat di lembaga keuangan formal berkontribusi pada stabilitas ekonomi, sementara layanan pembiayaan berperan dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja, yang secara langsung mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Selain itu, penggunaan pembayaran elektronik meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi secara signifikan.

Gambar 1. Arah Kebijakan Keuangan Inklusif



Sejalan dengan hal tersebut, Misi Asta Cita ke-2 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu memantapkan implementasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Digital, dapat berkaitan erat dengan keuangan inklusif. Hal ini termanifestasi dalam upaya meningkatkan akses keuangan, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan dan kemaritiman; mengembangkan sistem pembiayaan alternatif UMKM melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro (UMI); dan menjamin pembiayaan bagi peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk *start-up*.

Mengingat pentingnya inklusi dan literasi keuangan dalam agenda pembangunan nasional, terutama untuk memitigasi risiko penyalahgunaan layanan finansial, mendukung transformasi digital, dan mengatasi kesenjangan akses ke layanan keuangan formal, Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan sebagai landasan dan acuan implementasi. Inklusi dan literasi keuangan telah menjadi fokus utama yang secara eksplisit tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

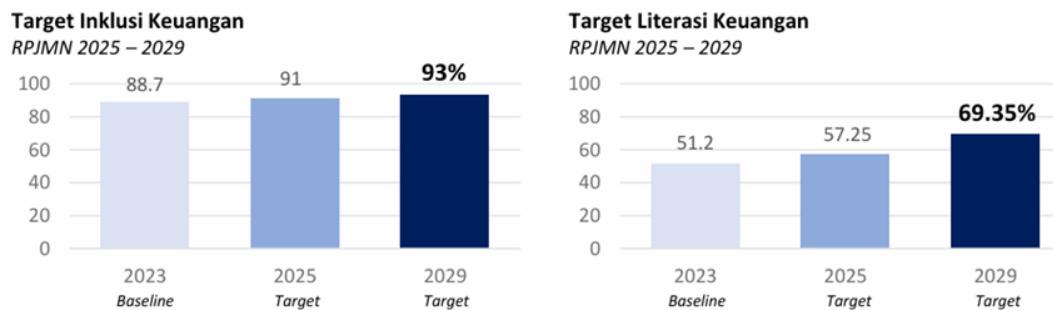
Gambar 2. Kebijakan Terkait Keuangan Inklusif



Visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang RPJPN, mengukur keberhasilan pembangunan melalui lima sasaran utama. Dari kelima sasaran tersebut, inklusi keuangan memiliki peran vital dalam mencapai sasaran pendapatan per kapita setara negara maju serta penurunan kemiskinan dan

pengurangan ketimpangan. Untuk itu, Undang-Undang RPJPN mengamanatkan penciptaan sektor keuangan yang kondusif guna mengoptimalkan fungsi intermediasi dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Kebijakan sektor keuangan dari segi inklusi keuangan mencakup edukasi dan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan, serta peningkatan akses keuangan, khususnya bagi wilayah dan kelompok sasaran yang belum terlayani jasa keuangan formal.

Gambar 3. Target Inklusi dan Literasi Keuangan



Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 secara spesifik memandatkan literasi dan inklusi keuangan dalam Prioritas Nasional 3, yakni "Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi" dengan Program Prioritas Pendalaman Sektor Keuangan. RPJMN selanjutnya menargetkan pencapaian inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada tahun 2029, hasil SNLIK 2024 metode keberlanjutan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Guna mencapai target nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Surat Edaran ini bertujuan untuk menyelaraskan 45 Indikator Utama Pembangunan, di mana inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci, ke dalam RPJPD.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan mandat terkait Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Perlindungan Konsumen dalam Bab XVIII. Bagian Kesatu pada Bab tersebut secara khusus mengamanatkan Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk berkoordinasi dalam meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan demi mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Sinergi dan kolaborasi ini esensial dalam penyusunan strategi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Pasal 226 (1) UU P2SK mewajibkan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) untuk melaksanakan kegiatan peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan kepada konsumen dan masyarakat. Pasal 226 (2) juga mengamanatkan Pemerintah untuk membentuk Komite Nasional (Komnas) yang akan mengkoordinasikan peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, yang detailnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait Komnas Literasi Keuangan yang merupakan penguatan dari Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Pemerintah mulai menyusun dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sejak tahun 2016. Penerapan SNKI memerlukan kerja sama antara Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, dan *stakeholder*. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang SNKI. Setelah target SNKI pada Perpres No. 82 Tahun 2016 tercapai, Pemerintah membuat target baru dalam upaya meningkatkan keuangan inklusif yang berkelanjutan. Target tersebut diamanatkan pada Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang SNKI yang dibangun atas fondasi dan lima pilar, yaitu edukasi keuangan; hak properti masyarakat; produk, intermediasi, dan saluran distribusi; layanan keuangan pada sektor pemerintah; serta perlindungan konsumen.

Gambar 4. Pilar dan Pondasi Keuangan Inklusif



Berdasarkan pasal 4 (1) Perpres No. 114 Tahun 2020, DNKI dibentuk dalam rangka pelaksanaan SNKI. DNKI diketuai langsung oleh Presiden serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian DNKI. Terdapat 3 tugas DNKI, yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SNKI; memberi arah, langkah, dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SNKI. Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi kesekretariatannya, DNKI memiliki sekretariat yang diamanatkan pada Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, terdapat Kelompok Kerja (Pokja) yang berfokus pada berbagai aspek seperti edukasi keuangan, pemberdayaan UMKM, perlindungan konsumen, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Seluruh upaya ini dilaksanakan melalui kolaborasi erat antar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

1.3 Kontribusi Keuangan Inklusif dalam Pembangunan Nasional

Keuangan inklusif memegang peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan dengan memberikan akses yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Keuangan inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menjadi wadah koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk memperluas akses keuangan tersebut, yang pada tahun 2024 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Capaian berbagai program kerja keuangan inklusif selama 2024 menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Program edukasi keuangan telah menjangkau 16,9 juta penerima manfaat melalui 5.954 kegiatan edukasi, memperkuat kemampuan masyarakat dalam membuat keputusan finansial yang bijak.

Di sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat, sertifikasi hak atas tanah telah mencapai lebih dari 10,6 juta bidang, memperluas kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai agunan produktif. Fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga terus ditingkatkan dengan 598 permohonan HKI, 3 fasilitasi desain industri, dan 1 fasilitasi pendaftaran hak cipta tercatat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 282,44 triliun, memperluas kesempatan berusaha bagi UMKM dan kelompok usaha produktif lainnya.

Pemerintah juga mendorong digitalisasi keuangan sebagai katalisator transformasi layanan keuangan inklusif. Sistem pembayaran berbasis QRIS kini telah digunakan oleh puluhan juta *merchant* di seluruh Indonesia. Digitalisasi penyaluran bantuan sosial dan pembiayaan bersubsidi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, turut mempercepat penetrasi layanan keuangan hingga ke pelosok negeri, termasuk daerah tertinggal dan kelompok rentan.

Tidak kalah penting, perlindungan konsumen sektor keuangan semakin diperkuat dengan peningkatan pengawasan dan pengaduan untuk memastikan bahwa pertumbuhan inklusi keuangan berjalan beriringan dengan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Hasil kerja kolaboratif ini menunjukkan sinergi nyata antar kelompok kerja (Pokja) SNKI yang secara terstruktur mendorong pemerataan akses layanan keuangan. Setiap Pokja menjalankan mandatnya: mulai dari memperluas literasi keuangan, mempercepat sertifikasi tanah, memperkuat ekosistem pembiayaan inklusif, memastikan layanan keuangan bagi kelompok rentan, hingga memperkuat perlindungan konsumen dan infrastruktur digital keuangan.

Selain itu, sinergi dalam penguatan regulasi dan kebijakan turut memastikan keberlanjutan program keuangan inklusif di masa mendatang. Melalui upaya bersama ini, keuangan inklusif terbukti menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan. Keuangan inklusif memberikan peluang

nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh pembiayaan usaha dan mengakses layanan keuangan yang aman. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, dengan memperluas peluang usaha produktif, mendorong pertumbuhan pendapatan keluarga, dan mengurangi ketergantungan pada praktik keuangan informal yang berisiko tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan. Sebagai upaya penting untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di seluruh Indonesia, maka diperlukan program peningkatan inklusi keuangan untuk pemerataan ekonomi rakyat. Keuangan inklusif tidak sekadar memperluas akses keuangan, tetapi juga membentuk ekosistem sosial dan ekonomi yang lebih kuat, *resilient*, dan inklusif untuk seluruh masyarakat Indonesia.

02

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Halaman ini sengaja dikosongkan

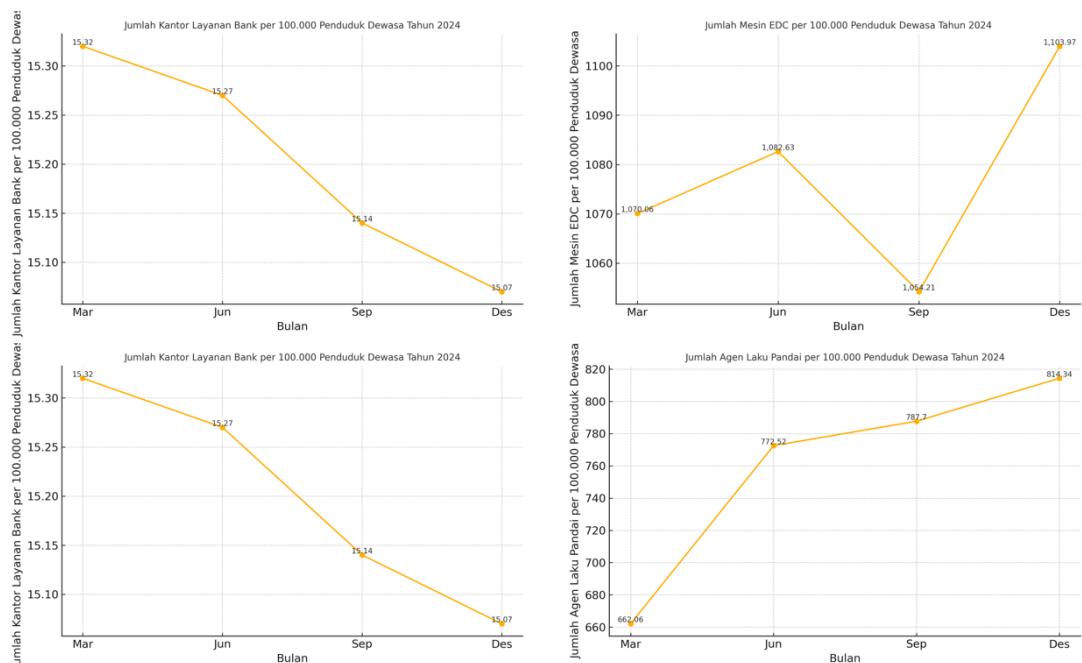
Dalam rangka pencapaian tujuan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), diperlukan rencana aksi yang didukung oleh sinergi kebijakan, serta penguatan pemantauan dan evaluasi. Pengukuran capaian keuangan inklusif dilakukan melalui indeks keuangan inklusif, diwujudkan dalam persentase orang dewasa (di atas 15 tahun) yang menggunakan produk dan layanan keuangan formal. Target utama keuangan inklusif diukur melalui indikator yang terbagi menjadi tiga dimensi, yakni indikator jangkauan akses keuangan, indikator layanan keuangan, dan indikator kualitas layanan keuangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SNKI.

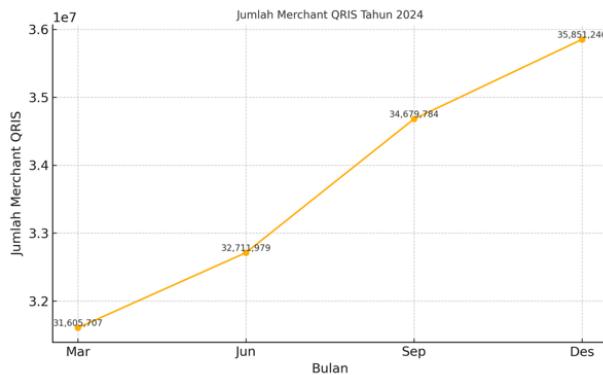
Indikator kinerja utama keuangan inklusif menjadi tolok ukur dalam mengembangkan program keuangan inklusif, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, dan memantau program ini baik di tingkat nasional maupun daerah. Pencapaian program keuangan inklusif dinilai dari sisi penyediaan produk keuangan dan ketersediaan kanal distribusinya (sisi penawaran), serta peningkatan kepemilikan dan penggunaan berbagai produk keuangan (sisi permintaan). Kedua sisi ini secara berkala dimonitor melalui indikator yang telah ditetapkan.

2.1 Indikator Jangkauan Akses

Jangkauan akses digunakan untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya. Indikator ini diukur dari jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa, jumlah mesin EDC/Mobile POS lainnya per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa, jumlah agen Laku Pandai per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa, dan jumlah *merchant* QRIS. Capaian indikator jangkauan akses dapat dilihat pada Grafik dan Tabel berikut.

Grafik 8. Indikator Jangkauan Akses





Tabel 1. Indikator Jangkauan Akses

Indikator Jangkauan Akses				
Indikator	Des 2023	Des 2024	Akses per 100.000 penduduk dewasa (Des 2024)	Perubahan (YoY)
Jumlah kantor layanan bank	30.323	29.781	15,07	-1,79 persen
Jumlah mesin EDC	2.015.374	2.181.663	1.103,97	8,25 persen
Jumlah agen Layanan Keuangan Digital	923.359	993.708	502,84	7,62 persen
Jumlah agen Laku Pandai	1.611.535	1.609.291	814,34	-0,14 persen
Jumlah merchant QRIS	30.121.035	35.851.246	n/a	19,02 persen

Sumber: Kementerian/Lembaga anggota DNKI

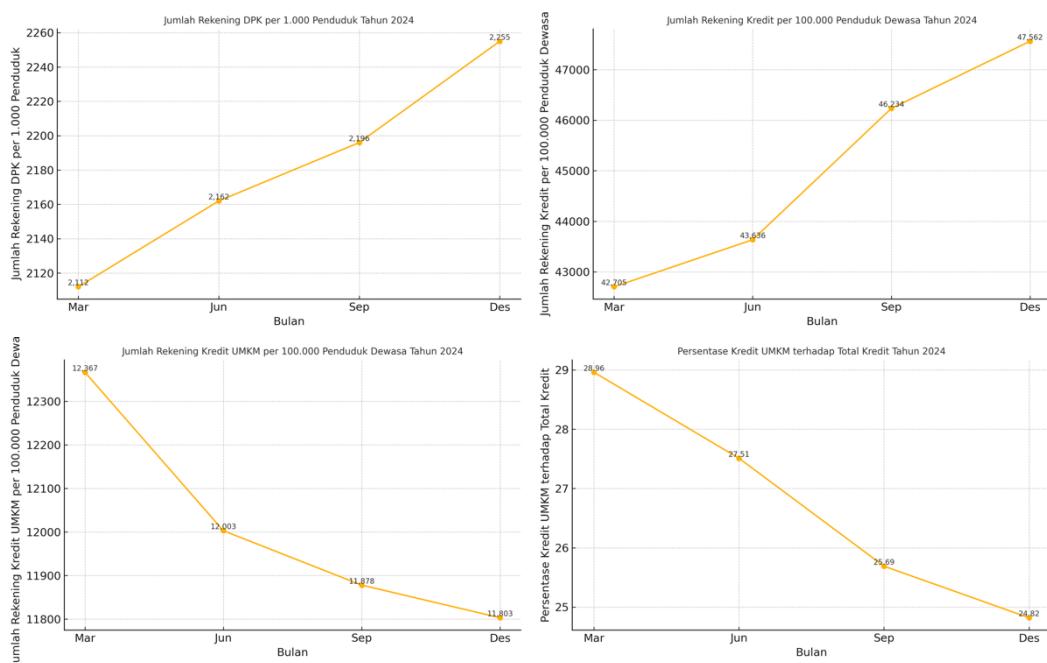
Jumlah kantor layanan bank mengalami penurunan dari 30.323 menjadi 29.781 unit, yang mencerminkan penurunan sebesar 1,79 persen secara tahunan (YoY), dengan rasio akses sebesar 15,07 per 100.000 penduduk dewasa. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola distribusi layanan, yang kemungkinan beralih ke kanal digital dan nonfisik yang dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Sebaliknya, indikator lain menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah mesin *Electronic Data Capture* (EDC) naik sebesar 8,25 persen menjadi 2.181.663 unit, dengan rasio akses mencapai 1.103,97 per 100.000 penduduk dewasa. Kenaikan juga terjadi pada jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang meningkat 7,62 persen menjadi 993.708 agen, dengan rasio sejumlah 502,84 unit per 100.000 penduduk dewasa. Hal tersebut mencerminkan perluasan akses keuangan berbasis teknologi. Namun demikian, jumlah agen Laku Pandai mengalami sedikit penurunan sebesar 0,14 persen, dari 1.611.535 menjadi 1.609.291 agen, meskipun rasio aksesnya masih cukup tinggi, yaitu 814,34 per 100.000 penduduk dewasa, sejalan dengan upaya mewujudkan *One Village One Agent* (OVOA). Adanya penurunan tersebut disebabkan oleh upaya peningkatan kualitas agen dengan menutup agen Laku Pandai yang tidak berjalan secara optimal. Di sisi lain, jumlah merchant QRIS menunjukkan pertumbuhan paling signifikan, meningkat 19,02 persen menjadi 35.851.246 merchant, dimana 95 persen diantaranya merupakan merchant

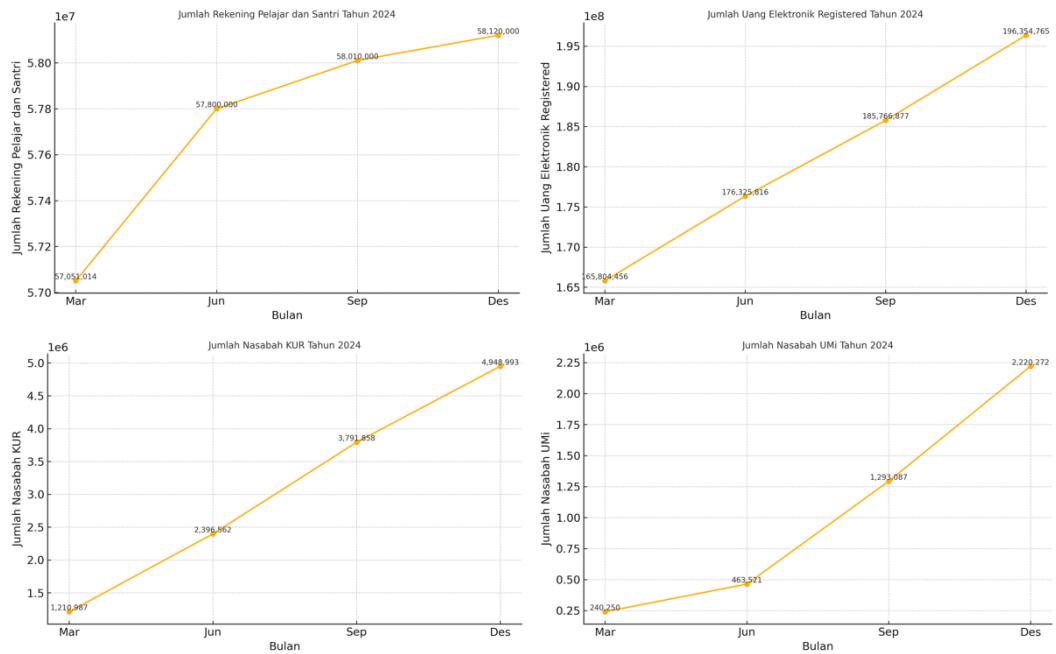
kategori UMKM. Secara keseluruhan, indikator dimensi jangkauan akses mencerminkan adanya pergeseran ke arah digitalisasi dan perluasan kanal nonkonvensional dalam upaya memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif di Indonesia.

2.2 Indikator Penggunaan

Pemerintah terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui inovasi produk keuangan, peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi, pengembangan infrastruktur di sektor keuangan, serta harmonisasi dan penguatan kebijakan di sektor keuangan. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam berbagai aspek tersebut akan tercermin dalam capaian indikator keuangan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian inklusi keuangan di Indonesia. Indikator penggunaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam mengukur tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Indikator ini mencakup penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, seperti jumlah rekening tabungan dan kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa, jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada penerbit uang elektronik, persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal, Jumlah rekening kredit/pembiayaan UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa, jumlah rekening pelajar dan santri, jumlah nasabah KUR/KUR Syariah dan UMi. Capaian indikator penggunaan keuangan pada tahun 2024 disajikan pada grafik dan tabel di bawah ini.

Grafik 9. Indikator Penggunaan





Tabel 2. Indikator Penggunaan

Indikator Penggunaan				
Indikator	Des 2023	Des 2024	Akses per 1.000 Penduduk (Des 2024)	Perubahan (YoY)
Jumlah rekening simpanan	559.914.590	609.200.000	2.255	8,80 persen
Jumlah rekening kredit	83.792.634	93.991.489	47.562	12,17 persen
Jumlah rekening kredit UMKM	25.158.083	23.324.320	11.803	-7,29 persen
persentase kredit UMKM terhadap total kredit	30,02 persen	24,82 persen	n/a	-5,20pp
Jumlah rekening pelajar dan santri	53.870.000	58.120.000	n/a	7,89 persen
Jumlah uang elektronik registered	156.409.380	196.354.765	n/a	25,54 persen
Jumlah nasabah KUR	4.643.344	4.948.993	n/a	6,58 persen
Jumlah nasabah UMi	2.080.303	2.220.272	n/a	6,73 persen

Sumber: Kementerian/Lembaga anggota DNKI

Dimensi penggunaan produk dan layanan keuangan sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Keuangan Inklusif menunjukkan tren positif di sebagian besar aspek sepanjang 2024. Jumlah rekening simpanan DPK (dana pihak ketiga) meningkat sebesar

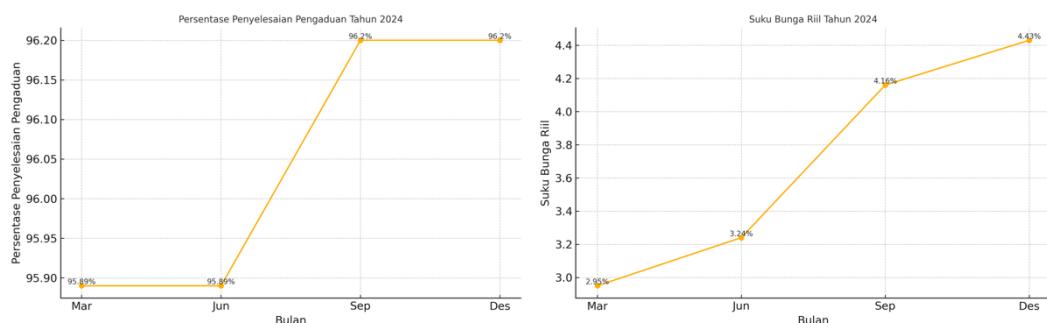
8,80 persen menjadi 609,2 juta rekening. Sementara itu, jumlah rekening kredit juga tumbuh signifikan sebesar 12,17 persen menjadi 93,99 juta, dengan rasio mencapai 47.562 rekening kredit per 1.000 penduduk. Namun demikian, terdapat penurunan pada jumlah rekening kredit UMKM sebesar 7,29 persen menjadi 23,32 juta, dan persentase kredit UMKM terhadap total kredit menurun 5,20 persen poin menjadi 24,82 persen. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mempertahankan dukungan pembiayaan untuk sektor UMKM yang selama ini menjadi salah satu pilar utama inklusi keuangan. Selanjutnya, jumlah rekening pelajar dan santri mengalami pertumbuhan 7,89 persen menjadi 58,12 juta rekening, yang menunjukkan peningkatan partisipasi generasi muda dalam sistem keuangan formal. Sementara itu, pertumbuhan paling tinggi terjadi pada jumlah uang elektronik *registered* yang melonjak 25,54 persen menjadi 196,35 juta, sejalan dengan tren digitalisasi transaksi keuangan masyarakat.

Selanjutnya, jumlah nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) mencatat peningkatan masing-masing sebesar 6,58 persen dan 6,73 persen, menunjukkan adanya perluasan akses pembiayaan mikro. Secara keseluruhan, dimensi penggunaan menunjukkan arah positif dalam perluasan dan pendalaman keuangan inklusif, dengan penekanan pada digitalisasi, pemberdayaan kelompok rentan, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

2.3 Indikator Kualitas

Indikator kualitas menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kualitas dilihat dari indeks literasi keuangan, jumlah layanan pengaduan konsumen keuangan, persentase penyelesaian layanan pengaduan konsumen keuangan, dan suku bunga riil. Capaian dari indikator kualitas dapat dilihat pada grafik 10 dan tabel 3 di bawah ini:

Grafik 10. Indikator Kualitas



Tabel 3. Indikator Kualitas

Indikator Kualitas			
	Des 2023	Des 2024	Perubahan (YoY)
Indeks Literasi Keuangan	65,43 persen	66,64 persen	1,21 pp
persentase penyelesaian pengaduan	96,00 persen	96,20 persen	0,20 pp
Suku bunga riil	3,39 persen	4,43 persen	1,04 pp

Sumber: Kementerian/Lembaga anggota DNKI

Dimensi kualitas dalam peningkatan inklusi keuangan menunjukkan perbaikan di sejumlah aspek sepanjang tahun 2024. Indeks Literasi Keuangan meningkat dari 65,43 persen menjadi 66,64 persen, atau naik sebesar 1,21 poin persentase. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan upaya edukasi keuangan masyarakat, yang berperan penting dalam mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, persentase penyelesaian pengaduan konsumen juga menunjukkan kinerja yang baik, meningkat dari 96,00 persen menjadi 96,20 persen (naik 0,20 pp) dan berada di atas target sebesar 90 persen, yang mengindikasikan semakin responsifnya penyedia jasa keuangan dalam menangani keluhan nasabah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal.

Pengaduan yang diajukan oleh masyarakat tidak semuanya dapat diselesaikan, hal ini karena jenis pengaduan atau permasalahan berhubungan dengan *fraud* eksternal seperti penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, *cyber crime*, restrukturisasi/relaksasi kredit/pembiayaan/pinjaman, perilaku petugas penagihan (*debt collector*), dan kesulitan klaim asuransi. Permasalahan yang disebabkan oleh tindak pidana/kejahatan membutuhkan sinergi dan kerja sama yang solid dari aparat penegak hukum serta lembaga/otoritas terkait. Saat ini telah dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk mendukung terwujudnya upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang menyeluruh dalam kerangka perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. Dewan Nasional Keuangan Inklusif melalui Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen akan terus bersinergi dengan Satgas PASTI dalam rangka upaya memperkuat perlindungan konsumen di sektor keuangan. Keberadaan Satgas PASTI ditegaskan dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengamanatkan bahwa OJK bersama otoritas, kementerian, dan lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Selanjutnya, suku bunga riil mengalami kenaikan dari 3,39 persen menjadi 4,43 persen, atau naik 1,04 poin persentase. Meskipun peningkatan ini mencerminkan kondisi makroekonomi yang dinamis, hal tersebut juga dapat berdampak pada keterjangkauan pembiayaan, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah dan pelaku UMKM. Oleh karena itu, menjaga kualitas inklusi keuangan ke depan perlu mencakup keseimbangan antara literasi, perlindungan konsumen, dan keterjangkauan biaya layanan.

2.4 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Dalam mengukur capaian inklusi keuangan sebelumnya digunakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Namun demikian, SNLIK hanya dapat mengukur capaian inklusi keuangan pada level nasional. Sehingga diperlukan indikator untuk mengukur pada level provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, DNKI meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai indikator untuk mengukur capaian inklusi keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

IKAD merupakan sebuah ukuran antar daerah dari agregasi indikator yang komposit multidimensi, serta subjektif dan terukur yang bernilai 0 sampai 10. Terdapat 3 dimensi yang digunakan dalam menyusun IKAD, yaitu penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman seperti yang terlihat pada gambar berikut.

Gambar 5. Dimensi IKAD

Dimensi IKAD



Dimensi Penggunaan mengukur kemampuan untuk menggunakan layanan dan produk dari Lembaga keuangan formal. Kemudian, Dimensi Ketersediaan mengukur ketersediaan layanan keuangan formal. Terakhir, Dimensi Kedalaman mengukur kedalaman atau luasnya layanan keuangan, produk keuangan, dan produk yang digunakan. Indikator penyusun setiap dimensi IKAD dapat terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. Dimensi dan Indikator Penyusun IKAD

Dimensi	Indikator Penyusun
Penggunaan	<ol style="list-style-type: none">1. persen Rekening Pihak Ketiga2. Pemilik Tabungan3. persen Akun E-wallet4. persen Debitur UMKM5. persen Debitur Individu6. Debitur Wanita (persen Total Debitur UMKM)7. Polis Asuransi Jiwa & Umum8. persen MBR pemilik BPJS, PBI, dan Jamkesda9. persen Non-MBR pemilik BPJS mandiri, Asuransi Swasta, Jamkes Perusahaan

Dimensi	Indikator Penyusun
Ketersediaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATM/100.000 penduduk 2. Agen Laku Pandai/100.000 penduduk 3. Merchant QRIS/100.000 penduduk
Kedalaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB 2. Rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman

03

CAPAIAN KELOMPOK KERJA

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) memiliki tugas dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi, mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI, serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SNKI. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, DNKI dibantu Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Pokja dan Sekretariat DNKI, yang terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok kerja. Susunan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat DNKI dengan nomenklatur satuan kerja yang telah disesuaikan sebagai berikut.

Tabel 5. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat DNKI

Pokja 1 Edukasi Keuangan	Ketua: Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi, OJK Wakil Ketua: Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia Anggota: 13 satker K/L
Pokja 2 Hak Properti Masyarakat	Ketua: Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN Wakil Ketua: (d/h Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kemenko Perekonomian) Anggota: 20 satker K/L
Pokja 3 Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan	Ketua: Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia Wakil Ketua: Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi, OJK Anggota: 15 satker K/L
Pokja 4 Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah	Ketua: Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia Wakil Ketua: Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PM Anggota: 18 satker K/L
Pokja 5 Perlindungan Konsumen	Ketua: Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, OJK Wakil Ketua: Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia Anggota: 5 satker K/L
Pokja 6 Kebijakan dan Regulasi	Ketua: Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Wakil Ketua: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum Anggota: 7 satker K/L

Pokja 7 Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan	Ketua: Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kemkomdigi Wakil Ketua: (d/h Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Perekonomian) Anggota: 11 satker K/L
Sekretariat	Ketua: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Kemenko Perekonomian Wakil Ketua: Sekretaris Kemenko Perekonomian Anggota: 10 satker K/L

Presiden RI selaku Ketua DNKI berkomitmen kuat untuk mencapai tingkat keuangan inklusif sebesar 90 persen pada tahun 2024. Dalam konsep RPJMN 2025-2029 target keuangan inklusif pada tahun 2029 adalah sebesar 93 persen, menurut SNLIK 2024 metode keberlanjutan tingkat inklusi keuangan sebesar 80,51 persen. Sebagai bagian dari pedoman implementasi kegiatan keuangan inklusif bagi Kementerian/Lembaga anggota DNKI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang terkait untuk mendukung agenda penting tersebut, DNKI telah menetapkan Program Kerja Keuangan Inklusif Tahun 2021-2024. Program kerja dimaksud dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Peningkatan akses layanan keuangan formal;
2. Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen;
3. Perluasan jangkauan layanan keuangan;
4. Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk UMKM;
5. Peningkatan produk dan layanan keuangan digital; dan
6. Penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif.

Indonesia telah mencapai perkembangan keuangan inklusif yang signifikan selama 6 (enam) tahun terakhir dan mengalami kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kolaborasi yang solid dari kementerian/lembaga anggota kelompok kerja dan sekretariat DNKI, pemerintah daerah, industri sektor keuangan, asosiasi, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional memberikan kontribusi terhadap pencapaian tersebut. Setiap kelompok kerja dan sekretariat DNKI telah melaksanakan program kerja/kegiatan keuangan inklusif pada tahun 2024 sebagaimana penjelasan pada masing-masing pokja dibawah ini.

3.1 Pokja I Edukasi Keuangan

Peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir menunjukkan trend yang sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jasa keuangan dan pembayaran yang didukung oleh inovasi teknologi dan perkembangan ekonomi global yang berdampak besar bagi masyarakat serta perekonomian Indonesia secara umum. Variasi produk dan layanan keuangan yang tersedia juga menambah peluang bagi individu dan perusahaan untuk mengelola keuangan secara lebih efisien. Perkembangan penggunaan jasa keuangan secara digital, termasuk perbankan berbasis internet dan

aplikasi keuangan lainnya, telah menjadikan layanan keuangan menjadi lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Perkembangan ini juga memberikan tantangan baru, seperti risiko keamanan pengguna layanan keuangan. Oleh karena itu, untuk mengimbangi peningkatan inklusi keuangan dan kebutuhan konsumen, diperlukan adanya edukasi dan literasi terkait keuangan. Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan, pemerintah dan Lembaga terkait agar risiko yang timbul dari adanya perkembangan penggunaan produk keuangan secara digital ini dapat diminimalisir.

Edukasi keuangan memegang peranan yang sangat penting agar masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan bijak. Melalui edukasi keuangan, masyarakat dapat memahami manfaat dan risiko berbagai produk jasa keuangan yang ada serta membantu untuk membuat pilihan terkait investasi, utang, dan perencanaan keuangan masa depan. Edukasi keuangan secara signifikan meningkatkan literasi keuangan. Dengan pemahaman keuangan yang lebih mendalam, masyarakat dapat membangun pondasi keuangan yang kuat, mengurangi ketidakpastian, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keuangan secara keseluruhan.

Kelompok Kerja (Pokja) Edukasi Keuangan DNKI telah menetapkan sejumlah program kerja dan melakukan sinergi dengan pemangku kepentingan dan regulator terkait, termasuk Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), mitra pembangunan di tingkat nasional dan internasional, asosiasi industri keuangan, organisasi masyarakat berbasis agama, serta memaksimalkan kerja sama dengan media dari *platform* digital, cetak, dan radio. Pelaksanaan program dan kegiatan edukasi keuangan ini mencakup sektor keuangan konvensional maupun keuangan syariah, dan ditujukan untuk berbagai segmen audien sesuai dengan sasaran prioritas keuangan inklusif, baik melalui *platform online* maupun *offline*.

3.1.1 Kegiatan Edukasi dan Literasi Keuangan

Gambar 6. Peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)



Kementerian/lembaga yang menjadi bagian dari Kelompok Kerja (Pokja) Edukasi Keuangan telah melaksanakan kegiatan edukasi dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan selama tahun 2024 melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencakup 5.443 kegiatan yang melibatkan 7.306.532 peserta dari berbagai segmen sesuai dengan kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif. Selain itu, OJK bersama S-DNKI juga telah meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang dilaksanakan oleh PUJK. Pada tahun 2024, telah dilakukan 7.405 kegiatan edukasi langsung yang menjangkau 1.032.469 peserta, dan 6.206 kegiatan edukasi digital kepada 123.418.241 tingkat keterlibatan audiens. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan ini dilakukan melalui sosialisasi, workshop, *training of community*, *training of trainers*, konsultansi, pendampingan dan *training of facilitator*.

Selanjutnya, kegiatan edukasi yang dilakukan melalui Bank Indonesia yaitu edukasi penggunaan instrumen pembayaran digital dengan menggunakan QRIS dan pembayaran non tunai lainnya yang mengutamakan perlindungan konsumen. Selama tahun 2024, telah dilakukan 415 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 588.606 baik secara luring maupun daring kepada masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, pelaku UMKM dan komunitas lainnya. Kegiatan edukasi juga dilakukan melalui 1.163 post media sosial Bank Indonesia yang menjangkau 8,8 juta tingkat keterlibatan audiens.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga telah melakukan kegiatan edukasi dan literasi keuangan melalui Seminar Literasi Finansial kepada 860 mahasiswa dan memberikan penguatan literasi keuangan dan kesejahteraan mahasiswa pada kegiatan Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Kementerian Komunikasi dan Digital juga melakukan kegiatan *Creative Talks* – Pojok Literasi yang dilakukan sebanyak 18 kali melalui Webinar yang memiliki fokus tema terkait literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen. Selama tahun 2024, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga telah melakukan 78 kegiatan edukasi keuangan kepada 2250 peserta yang merupakan pengelola Badan Usaha Milik Desa dan Kampung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan edukasi dan inklusi keuangan di daerah pedesaan yang secara demografi lebih sulit dicapai akses keuangan. Disamping itu, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga telah melakukan edukasi keuangan pada pelatihan kewirausahaan sebanyak 2080 peserta dan edukasi keuangan pada Orientasi Pra Pemberangkatan sebanyak 297.433 peserta yang merupakan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Surat Utang Negara (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) telah menginisiasi pelaksanaan *Inclusive Talks* (*InTalks*) dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengajar dan pegiat literasi dalam rangka kolaborasi peningkatan literasi keuangan dan investasi serta keuangan masyarakat. Workshop ini merupakan respon dari keresahan komunitas dalam hal kurangnya pengetahuan dan pemahaman untuk melakukan *knowledge transfer* tentang literasi keuangan dan investasi. Pada tahun 2024, sebanyak 20 komunitas di Jabodetabek dilakukan pendekatan untuk membentuk komunitas-komunitas perintis

dalam bentuk kolaborasi DJPPR dan komunitas mengajar serta pegiat literasi yang hadir di Masyarakat. Pada tanggal 3 Mei, diselenggarakan Workshop InTalks to Community #Series2 dengan tema "Komunikasi Efektif bagi Edukator" dengan pemateri yaitu seorang pegiat literasi, Galih Sulistyaningra. Peserta berjumlah sekitar 50 orang yang merupakan perwakilan dari 20 komunitas pengajar dan pegiat literasi di sekitar Jabodetabek.

Melanjutkan series sebelumnya, pada 5 Juli 2024, diselenggarakan Workshop *InTalks to Community* #Series3 dengan tema "Menyusun Rencana Belajar yang Menarik". Di Kuartal III 2024, diselenggarakan lanjutan Workshop *InTalks to Community* #Series 4 dengan tema "Literasi APBN dan Perencanaan Keuangan untuk Pendidik" pada tanggal 27 September 2024 dengan narasumber dari internal DJPPR yaitu Riky Chandra dan Billy Gustyan. Dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Oeang RI ke 78, DJPPR menyelenggarakan Webinar HORI - *InTalks to Community* dengan tema "Pentingnya Pendidikan Literasi Keuangan Bagi Generasi Muda" tanggal 9 Oktober 2024. Dalam webinar ini DJPPR menghadirkan *Financial Planner* Prita Ghozie, Pegiat Literasi Galih Sulistyaningra, Psikolog Klinis Hani Kumala dan Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara. Webinar ini diikuti oleh 120 peserta luring dan 2000 peserta daring.

Gambar 7. Webinar HORI - *InTalks to Community*



Selain kegiatan webinar *Inclusive Talks* (*InTalks*), Kementerian Keuangan juga memiliki program ORImpiade (Kompetisi Literasi Keuangan untuk Generasi Unggul). ORImpiade merupakan ajang kompetisi literasi keuangan yang dirancang khusus untuk generasi muda, khususnya siswa SMA dengan tujuan menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, kompetitif, mudah dipahami, dan menyenangkan. Dengan mengusung tema literasi keuangan, ORImpiade tidak hanya memotivasi peserta untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan secara bijak, tetapi juga memperkenalkan instrumen

investasi, seperti saham, reksadana, obligasi, termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI) sebagai salah satu instrumen investasi yang diterbitkan oleh negara.

Dalam rangka meningkatkan intensitas kegiatan edukasi dan literasi keuangan untuk mencapai tingkat keuangan inklusif sebesar 91 persen pada tahun 2025 dan 93 persen pada tahun 2029, Pokja 1 Edukasi keuangan melalui Kementerian PPN/Bappenas juga telah melakukan penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan dalam dokumen RPJPN dan RPJPD 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029 sebagai salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan. Hal ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan kondisi demografis dan masyarakat yang majemuk di Indonesia agar pemerataan akses terhadap inklusi dan edukasi keuangan tetap tercapai.

3.1.2 Infrastruktur Digital Literasi Keuangan

Gambar 8. *Learning Management System* dan Beranda Sikapi



Akselerasi peningkatan literasi keuangan juga sangat perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur digital terkait literasi keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, telah merancang dan mengembangkan platform digital *Learning Management System* (LMS) dan Sikapi Uangmu. Platform tersebut merupakan sistem pembelajaran dan pelatihan terpadu yang berfungsi sebagai pusat koneksi untuk pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan dalam memahami materi literasi keuangan. Selama tahun 2024, pengguna LMSKu telah mencapai 79.376 pengguna dengan jumlah akses modul sebanyak 102.901 kali akses dan 82.253 sertifikat kelulusan modul telah diterbitkan. Selain itu, Sikapi Uangmu telah mempublikasikan konten edukasi terkait produk dan layanan keuangan sebanyak 433 konten dengan capaian jumlah pengunjung sebanyak 1.754.287 pengunjung/viewers.

Dalam LMSKu, peserta bisa mengakses beragam materi pembelajaran dan pelatihan yang sudah dikelompokkan berdasarkan topiknya. Modul-modul yang tersedia mencakup pengenalan OJK dan kewaspadaan investasi, perencanaan keuangan, perusahaan pembiayaan, perbankan, pasar modal, asuransi, *fintech*, keuangan syariah, pegadaian, dana pensiun, hingga literasi keuangan digital. Disamping itu, Sikapi Uangmu hadir dalam bentuk aplikasi ponsel, minisite dan media komunikasi digital yang menyediakan konten edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital melalui artikel, video, dan informasi terkait lainnya. Tujuan utama dari penyediaan infrastruktur digital literasi keuangan adalah memberdayakan masyarakat agar bisa mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan membuat keputusan finansial yang bijak.

3.1.3 Bulan Inklusi Keuangan 2024

Gambar 9. Bulan Inklusi Keuangan



Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan bentuk komitmen lembaga pemerintah beserta seluruh industri jasa keuangan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan oleh masyarakat yang memiliki tujuan akhir pada kesejahteraan keuangan dan stabilitas ekonomi nasional. BIK dilaksanakan pada bulan Oktober setiap tahunnya. Pada BIK 2024 telah diselenggarakan 6.137 kegiatan dengan total 6.478.027 peserta. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama bulan inklusi keuangan adalah pembukaan rekening baru, polis dan produk keuangan lainnya; kegiatan literasi, kampanye literasi dan inklusi keuangan; memfasilitasi pemberian kredit atau pembiayaan bagi masyarakat; publikasi program literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen; dan pameran produk/layanan jasa keuangan. Total rekapitulasi capaian akses produk layanan/jasa keuangan pada BIK 2024 meningkat 19,82 persen dari capaian tahun 2023. Capaian selama Bulan Inklusi Keuangan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Pembukaan Akun Baru Selama Bulan Inklusi Keuangan 2024

Industri	Pembukaan Akun Baru
Perbankan	3.547.861 rekening baru
Pasar Modal	156.537 rekening efek baru
Perasuransian	745.218 polis
Pembiayaan	764.201 debitur
Pergadaian	3.438.854 rekening
Fintech	856.857 akun

3.1.4 Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI)

Gambar 10. Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI)



Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) merupakan forum kolaborasi Pemerintah, asosiasi/industri, dan pelaku usaha untuk memperkuat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan. FEKDI 2024 diadakan bersamaan dengan Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang berfokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kolaborasi ini bertujuan pada transformasi digital yang menjadi pendorong bagi UMKM agar “naik kelas”, digitalisasi usaha, dan merambah pasar global.

FEKDI X KKI 2024 diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 1-4 Agustus 2024 dan mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”. Kegiatan FEKDI X KKI 2024 mendapatkan sambutan dan respon positif dari stakeholders. Secara keseluruhan, jumlah peserta yang hadir mencapai 150.280 pengunjung yang terdiri dari 26.990 peserta offline dan

123.290 peserta online sebanyak 92.011 pengunjung. Tujuan utama FEKDI yaitu sinergi kebijakan ekonomi dan inovasi keuangan digital di Indonesia serta mendorong inklusivitas dengan memastikan manfaat keuangan digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan seminar, *talk show*, pameran inovasi digital dan produk UMKM, dan *business matching*.

3.1.5 Kegiatan Literasi Keuangan Syariah

Untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan syariah, sepanjang tahun 2024 OJK melakukan beberapa kegiatan terkait literasi keuangan syariah, yaitu:

1. Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS)

Gambar 11. Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS)



Program EPIKS di 26 Pesantren dengan sebaran 14 provinsi di seluruh Indonesia, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Keseluruhan program EPIKS di tahun 2024 menjangkau 6.520 orang peserta dengan total inklusi keuangan syariah sebesar Rp10.985.382.400 yang terdiri dari produk tabungan, tabungan emas, dan reksadana syariah.

2. *Syariah Financial Fair (SYAFIF)*

Gambar 12. Syariah Financial Fair (SYAFIF)



SYAFIF Tahun 2024 menjadi bagian dari kegiatan *Financial Expo* (FinEXPO) yang berlokasi di Pentacity Mall Balikpapan dan berlangsung dari 3–6 Oktober 2024. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi dengan 13 (tiga belas) PUJK Syariah dari berbagai sektor yakni perbankan, asuransi, pergadaian, perusahaan pembiayaan, dan fintech. Selain itu, terdapat pula *booth* yang diisi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pelaku ekosistem halal, dan layanan SLIK. SYAFIF 2024 mendapatkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dengan total pengunjung booth mencapai 13.105 pengunjung atau sekitar 24,5 persen dari total pengunjung FinExpo 2024 yang sebesar 53.463 pengunjung. Selain itu, nominal transaksi di booth SYAFIF 2024 mencapai Rp1.816.988.595,- atau sekitar 19,6 persen dari total transaksi FinExpo 2024 yang sebesar Rp9.254.184.526,-.

3. Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah (GERAK Syariah)

Gambar 13. Gebyar Rama dan Keuangan Syariah (GERAK Syariah)



GERAK Syariah merupakan kampanye nasional keuangan syariah selama bulan Ramadan yang ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, serta berbagi kebermanfaatan keuangan syariah melalui penggunaan dana sosial kepada masyarakat. Sepanjang GERAK Syariah di tahun 2024 terdapat total 1.345 kegiatan yang terdiri dari 742 kegiatan literasi, 265 kegiatan inklusi, dan 338 kegiatan sosial. Lebih lanjut, penyelenggaraan kegiatan GERAK Syariah telah berhasil menjangkau 3.057.194 peserta edukasi dan mendorong terciptanya inklusi pada 1.175.019 orang di berbagai wilayah Indonesia. Selain kegiatan edukasi dan inklusi, sejumlah dana sekitar Rp7,24 Miliar telah disalurkan pada 93.768 orang yang terlibat dalam kegiatan sosial.

3.2 Pokja II Hak Properti Masyarakat

Kepemilikan hak properti memainkan peranan strategis dalam mendukung akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Tanpa kepemilikan aset yang diakui secara hukum, masyarakat sulit menjangkau kredit, perlindungan hukum, atau peluang investasi yang adil. Pokja II SNKI memiliki mandat mendorong pemberdayaan hak properti melalui percepatan sertifikasi tanah, fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penguatan keuangan syariah, serta dukungan pada kelompok subsisten.

3.2.1 Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi UMKM

Gambar 14. Penyerahan Sertifikat PTSK dan Penyerahan BAST PTSK



Sumber: Instagram @kantahciamis

Sumber: web resmi Kantah Kab Sragen

a. Persertifikatan Bidang Tanah

Pada tahun 2024, Kementerian ATR/BPN menargetkan sertifikasi 5.039.576 bidang tanah, dan tercapai melampaui target sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Sertifikasi Bidang Tanah Tahun 2024

Triwulan	Capaian (bidang tanah)
Triwulan I - 2024	1.197.874
Triwulan II - 2024	2.851.801
Triwulan III - 2024	3.575.796
Triwulan IV - 2024	2.993.600
Total	10.619.071
Target 2024	5.039.576
persen capaian terhadap target	211 persen

Grafik 11. Capaian Sertifikasi Bidang Tanah Tahun 2024

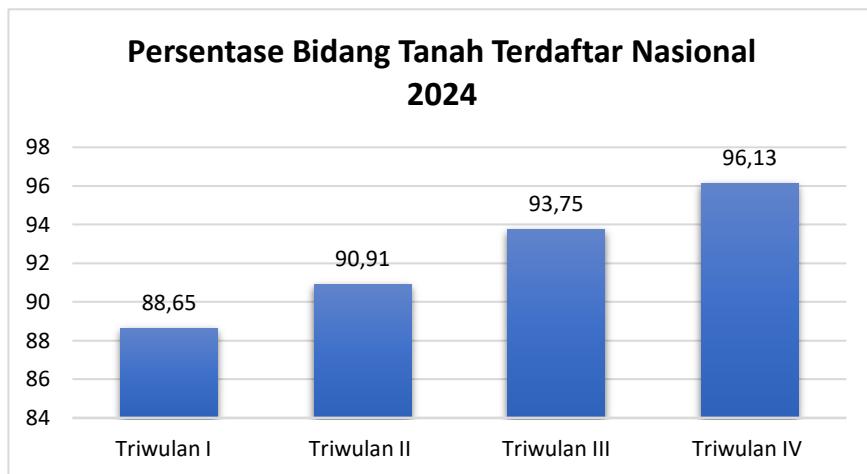


Selain itu, pada tahun 2024, bidang tanah terdaftar secara nasional telah mencapai 96,13 persen, jauh melebihi target 2024 sebesar 91,75 persen. Capaian ini menunjukkan progres ketercatatan lahan secara formal dalam sistem pertanahan nasional, yang menjadi prasyarat inklusi keuangan berbasis aset.

Tabel 8. persentase Cakupan Bidang Tanah Terdaftar Nasional

Triwulan	(persen Cakupan)
Triwulan I – 2024	88,65
Triwulan II – 2024	90,91
Triwulan III – 2024	93,75
Triwulan IV – 2024	96,13
Target 2024	91,75
persen tercapai	104,7

Grafik 12. persentase Cakupan Bidang Tanah Terdaftar Nasional Tahun 2024



b. Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Gambar 15. Sebaran Kampung Reforma Agraria Tahun 2021-2024

**SEBARAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA
(2021 - 2024)**



Provinsi	Aceh	Bali	Banten	Bengkulu	DIY	Gorontalo	Jambi	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	KalBar	KalSel	KaTeng	KaTim	KaTara	Babel	SumUt
TOTAL	9	2+1	1	8	7	6	7	1+1	5	2	17	12	11	2	1	4	8

Provinsi	Kepri	Lampung	Maluku	Maluku Utara	NTB	NTT	Papua	Papua Barat	Riau	SulBar	SulSel	SulTeng	SulTra	SulUt	SumBar	SumSel	Total
TOTAL	5	4	8	3	5	12	1	7	8	8	1	9	4	3	5	10	197+2

Kampung Reforma Agraria merupakan salah satu inisiatif strategis dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria dengan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan, sekaligus mendorong pemanfaatan tanah sebagai modal produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat didorong untuk membentuk kelembagaan lokal yang kuat, mengembangkan usaha berbasis potensi wilayah, serta memperluas akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan formal. Kampung Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah, tetapi juga membangun ekosistem sosial-ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan sosial di wilayah perdesaan. Hingga 2024, terdapat 199 kampung reforma agraria yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3.2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM

Gambar 16. Seminar Nasional Indikasi Geografis 2024



Sumber: [web](#)

resmi Klinik HKI Kemenperin

UMKM memiliki banyak potensi aset tak berwujud, seperti merek, desain industri, dan karya cipta. Pada tahun 2024, Pokja II melalui kerja sama dengan Dirjen IKMA, Kementerian Perindustrian, menargetkan 600 pendaftaran desain industri dan minimal 1 hak cipta. Realisasi hingga TW IV 2024 telah menunjukkan pencapaian yang memuaskan di tengah tantangan efisiensi anggaran, dimana fasilitasi pendaftaran merek telah mencapai 598 pendaftaran, 3 fasilitasi desain industri, dan 1 fasilitasi pendaftaran hak cipta. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang hak kekayaan intelektual, antara lain:

- Pelaksanaan sosialisasi dan FGD di Jawa Barat, Lombok, Kupang yang dihadiri oleh berbagai instansi dan BUMN;
- Partisipasi klinik kekayaan intelektual pada Pameran Asta Karya Nusantara, FEKDI, maupun pameran Halal Indonesia International Industry Expo 2024, Pameran Industri Festival 2024, Pameran Karya Kreatif Indonesia.

3.2.3 Sertifikasi Halal

Sertifikat halal memainkan peranan penting dalam mendukung inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Dengan memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha tidak hanya memperoleh legitimasi atas kehalalan produk mereka, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses ke pasar yang lebih luas, termasuk jaringan ritel modern dan ekspor. Sertifikat halal juga menjadi salah satu prasyarat dalam mengakses pembiayaan syariah, baik dari lembaga keuangan syariah maupun program pemerintah, sehingga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan formal yang sesuai prinsip syariah. Dalam konteks inklusi keuangan nasional, percepatan proses sertifikasi halal menjadi strategi penting untuk memberdayakan pelaku usaha berbasis nilai-nilai syariah dan memperkuat ekonomi umat. Hingga triwulan IV 2024 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

sebagai penyelenggara utama penjaminan produk halal dari pemerintah telah berhasil melakukan registrasi dan penerbitan sertifikat halal sebanyak 691.296 sertifikat.

3.2.4 Program Inklusi Keuangan untuk Kelompok Subsisten

Model bisnis inklusif berbasis keuangan bagi kelompok subsisten (petani kecil, perempuan kepala keluarga, pelaku usaha mikro informal) merupakan salah satu pendekatan keberpihakan Pokja II. Bank Indonesia melanjutkan replikasi program ke berbagai wilayah. Hingga akhir 2024, telah dilakukan replikasi terhadap 28 kelompok sasaran yang telah mengalami peningkatan tahapan, dimana 10 kelompok diantaranya mengalami peningkatan pada kapabilitas produksi, 9 kelompok pada kapabilitas pemasaran, 5 kelompok pada kapabilitas kelembagaan, 6 kelompok pada kapabilitas digitalisasi.

Selain itu program peningkatan akses pembiayaan UMKM dari sisi supply dan demand telah terlaksana dalam bentuk:

- a. Rasio kredit UMKM terhadap perbankan (RPIM) yang terus termonitor mencapai 33,55 persen pada akhir triwulan IV-2024;
- b. Pemberian award kepada 4 bank pendukung UMKM;
- c. Peningkatan jumlah UMKM yang telah terhubung dengan lembaga keuangan melalui skema *business matching* yang pada akhir triwulan IV-2024 telah berhasil menghubungkan 180 UMKM kepada lebih dari 15 lembaga keuangan dengan nilai transaksi mencapai Rp 188,2 Miliar (meningkat sebesar 27 persen YoY);
- d. Pemanfaatan SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) oleh UMKM melalui sinergi dengan Kementerian/Lembaga yang telah berhasil mendorong peningkatan jumlah UMKM pengguna SIAPIK sebesar 52.597 UMKM (posisi per Agustus 2024, meningkat sebesar 24,73 persen YoY);
- e. Penyelenggaraan Pameran KKI (Karya Kreatif Indonesia) yang hingga Triwulan IV-2024 telah membukukan capaian omset UMKM sebesar Rp123,1 Miliar (meningkat 35 persen YoY, Business Matching Ekspor sebesar Rp 264,7 Miliar (meningkat 26 persen YoY), Business Matching Pembiayaan sebesar Rp 188,2 Miliar (meningkat 27 persen YoY) dengan jumlah pengunjung mencapai 150 ribu pengunjung *on-site* dan *online*;
- f. Pelaksanaan FESYAR (Festival Ekonomi Syariah) dan ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) yang telah berdampak pada capaian hingga triwulan II-2024 transaksi sebesar Rp1,93 Triliun berapa potensi, komitmen dan realisasi sebesar Rp 642 Miliar, komitmen realisasi perdagangan sebesar Rp295 Miliar, dan komitmen kerjasama ekosistem keuangan syariah sebesar Rp 1 Triliun.

Bank Indonesia melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) juga terus mendorong pemberdayaan ekonomi syariah melalui aksesibilitas pembiayaan yang efektif yang pada akhir triwulan IV-2024 telah berhasil memberdayakan 822 pesantren baru sembari tetap melanjutkan pemberdayaan terhadap 653 pesantren eksisting. Selain itu, DEKS juga melakukan pemberdayaan terhadap usaha non-pesantren dan non-korporasi terhadap 991 pelaku usaha hingga akhir triwulan IV-2024.

3.3 Pokja III Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan dan memperlancar fungsi perantara keuangan. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan, regulasi, maupun program-program khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan produk serta akses layanan keuangan yang mudah, aman, biaya terjangkau dan terpercaya.

Kelompok Kerja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan berfokus pada penciptaan regulasi yang kondusif, pengembangan infrastruktur keuangan, inovasi produk dan layanan keuangan yang mudah serta aman dengan mengandalkan teknologi informasi keuangan yang mumpuni. Tujuan utamanya adalah meningkatkan akses keuangan, memperluas jangkauan layanan keuangan, mendukung peningkatan inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.3.1 Pengembangan Transaksi Pembayaran Nontunai

Transaksi Pembayaran Nontunai terus didorong oleh pemerintah dimana upaya tersebut selaras dengan peningkatan transaksi keuangan digital. Pemerintah terus melakukan berbagai inisiatif seperti Gerakan Nasional Nontunai (GNTT) dan *Blue Print Sistem Pembayaran* (BSPI). Pengembangan transaksi pembayaran nontunai, terutama melalui sistem digital, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat. Pembayaran dengan mekanisme non-tunai menggunakan *electronic money* (*server based, chip based*); kartu (kartu debit, kartu kredit); fitur *buy now pay later*; transfer atau pembayaran secara digital melalui *mobile banking, internet banking, ATM, QRIS*, dan rekening pembayaran (*virtual account*).

Hingga bulan November tahun 2024, jumlah rekening uang elektronik terdaftar sebanyak 36.125.654 rekening. Sedangkan perkembangan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sampai dengan Desember 2024 mencatatkan volume transaksi sebesar 6,24 Miliar dengan nominal mencapai Rp 659,94 Triliun. Untuk jumlah *merchant* QRIS sampai dengan bulan Desember 2024 telah mencapai 35.851.246, dimana 97,07 persen diantaranya merupakan *merchant* UMKM.

Meluasnya ekosistem QRIS tersebut juga didukung oleh PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) QRIS yang saat ini telah berjumlah 134 PJP, terdiri dari 80 PJP Bank (termasuk 10 Bank Syariah dan 26 Bank BPD) serta 52 PJP Non-Bank, serta Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) berupa 4 lembaga *switching*.

Tabel 9. Perkembangan QRIS antarnegara sampai dengan triwulan IV tahun 2024

Transaksi Inbound-Outbound	Volume (transaksi)	Nominal (miliar rupiah)
Indonesia – Thailand	417.665	179.57
Indonesia – Malaysia	1.898.151	553.26
Indonesia - Singapura	110.762	35.00

Saat ini upaya inisiasi kerjasama terkait QRIS Antarnegara terus dilakukan dengan beberapa negara antara lain Jepang, Korea Selatan, India, UAE, dan Tiongkok.

3.3.2 Program Rekening bagi Pelajar

Gambar 17. Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Implementasi Program KEJAR Wilayah Tengah dan Timur



Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu program yang untuk meningkatkan inklusi keuangan dari sisi kepemilikan maupun penggunaan yang bertujuan mendorong budaya menabung sejak dulu. Program yang diluncurkan pada tahun 2020 ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Melalui program tabungan Simpanan Pelajar ini, diharapkan anak-anak Indonesia, mulai dari pelajar PAUD hingga SMA/sederajat dapat merencanakan keuangan sejak dulu. Setiap tanggal 20 Agustus diperingati sebagai Hari Indonesia Menabung. Hari Indonesia Menabung (HIM) bertujuan untuk menyebarluaskan pesan kepada masyarakat, mengubah perilaku, serta mendorong budaya menabung di masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam peringatan HIM juga menjadi momentum untuk mendorong Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau GENCARKAN yang bertujuan untuk mencetak generasi muda yang lebih sadar keuangan. Sampai dengan Bulan Desember 2024, persentase jumlah pelajar yang tercatat telah memiliki rekening yaitu sebesar 87,19 persen atau 58,12 juta pelajar dengan nominal Rp. 35,30 Triliun. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu sebesar 87 persen.

3.3.3 Percepatan Akses Keuangan Daerah

Gambar 18. Rapat Koordinasi TPAKD Wilayah Barat Tahun 2024



TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) merupakan forum koordinasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait dengan tujuan utama meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat di daerah. TPAKD berperan dalam mempercepat dan memperluas akses keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Hingga November 2024, TPAKD telah terbentuk secara lengkap di seluruh wilayah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Capaian ini menunjukkan komitmen dalam memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang inklusif di seluruh daerah.

Melalui keberadaan TPAKD, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Upaya dan inisiatif dimaksud antara lain melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Nelayan, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan lain sebagainya. Kehadiran TPAKD diharapkan mampu mendorong program-program keuangan yang sesuai dengan potensi unggulan daerah/lokal serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan di daerah dan menggerakkan roda perekonomian di daerah.

3.3.4 Program Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Pedesaan (EKI)

Program EKI di wilayah perdesaan dirancang untuk mengoptimalkan berbagai potensi lokal yaitu alam, budaya, sosial, maupun finansial melalui penyediaan akses keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dari sektor perbankan, asuransi, maupun pasar modal. Pada tahun 2024, program EKI telah dilaksanakan di 45 desa yang tersebar di Indonesia.

Program ini mendorong sinergi antarpemangku kepentingan di daerah melalui forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), seperti OJK, Bank Indonesia,

pemerintah daerah, perangkat desa, kementerian/lembaga terkait, dan Industri Jasa Keuangan. Kolaborasi yang dilaksanakan melalui TPAKD diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai program inklusi keuangan, antara lain Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), program pembukaan rekening kepada masyarakat umum, Laku Pandai, kredit/pembiayaan, program terkait proteksi/perlindungan diri, serta penguatan penggunaan sistem pembayaran digital di masyarakat dengan QRIS/e-wallet

Tabel 10. Pelaksanaan Program EKI

Program/Kegiatan		Capaian
a.	Sosialisasi/edukasi dan pelatihan/pendampingan terkait EKI	414 kegiatan dengan jangkauan peserta sebanyak 27.758 orang
b.	Pembukaan rekening tabungan (reguler, pelajar, emas, haji)	13.533 rekening
c.	Penyaluran kredit/pembiayaan (sektor perbankan dan non-bank)	2.896 debitur
d.	Pembukaan Kepesertaan Asuransi (termasuk jiwa, kesehatan, usaha)	3.188 polis
e.	Pembukaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	1.567 peserta
f.	Pembukaan Agen Laku Pandai/Agen LJK (Lembaga Jasa Keuangan)	123 agen
g.	Perluasan penggunaan QRIS kepada UMKM	1.050 UMKM

3.3.5 Program Laku Pandai

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif merupakan program yang bertujuan untuk memperluas akses bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. Melalui layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*), tersedia produk-produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk yang disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain: tabungan; kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro; asuransi mikro; dan/atau produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

Program tersebut dikembangkan melalui sistem keagenan. Agen Laku Pandai merupakan pihak ketiga (individu atau badan usaha) yang bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Agen Laku Pandai juga bertindak sebagai perpanjangan tangan bank,

melayani masyarakat seperti halnya bank namun di lokasi yang lebih dekat dan terjangkau, tanpa harus datang ke kantor cabang bank.

Hingga akhir tahun 2024, Laku Pandai telah mencatatkan jumlah agen perorangan sebanyak 1.590.066, sedangkan jumlah agen badan usaha (outlet) mencapai 19.225 dengan jumlah total agen 1.609.291. Untuk capaian jumlah nasabah BSA (*Basic Saving Account*) sebanyak 16.495.618 akun dengan total nominal tabungan BSA sebesar 1.136.402.679.827 rupiah. Jumlah bank penyelenggara Laku Pandai berjumlah 36 bank.

3.3.6 Penyusunan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya

Gambar 19. Peluncuran Pedoman SETARA



Dokumen Pedoman SETARA merupakan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan Untuk Disabilitas Berdaya ini merupakan penyempurnaan dari Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang diterbitkan oleh OJK pada tahun 2018. Pedoman ini dirancang sebagai panduan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat PUSK di Indonesia untuk mengimplementasikan inklusi disabilitas dalam produk dan layanan mereka. Pedoman ini membantu PUSK mengembangkan kebijakan strategis yang inklusif dan memastikan aksesibilitas produk, layanan, serta fasilitas bagi konsumen dengan disabilitas. Pendekatan bertahap dalam pedoman ini mendorong integrasi inklusi disabilitas ke dalam kebijakan strategis dan operasional, dengan fokus pada pemenuhan hak aksesibilitas dalam kerangka perlindungan konsumen di sektor keuangan.

Gambar 20. Pedoman SETARA



Penyandang disabilitas dalam konteks pedoman ini mencakup individu dengan kesulitan jangka panjang dalam fungsi fisik, intelektual, mental, atau sensorik, serta ganda atau multi.

3.3.7 Distribusi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel secara Daring

Gambar 21. Surat Berharga Negara (SBN) Ritel secara Daring



Pemerintah menerbitkan SBN Ritel untuk menyediakan instrumen investasi yang aman bagi masyarakat dan mencegah investasi ilegal dan mendorong masyarakat agar dapat mengakses SBN Ritel sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, serta berkontribusi pada pembiayaan pembangunan nasional. SBN ritel merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh pemerintah khusus untuk Warga Negara Indonesia, menawarkan keamanan karena pembayaran kupon dan pokok dijamin oleh negara, serta memiliki minimal pembelian yang terjangkau.

Selain didorong untuk gemar menabung, masyarakat juga diberikan paradigma baru agar tidak hanya "*saving society*" (masyarakat gemar menabung) tetapi juga "*investment society*" (masyarakat gemar berinvestasi) salah satunya melalui instrumen SBN Ritel.

Terkait dengan kemudahan akses, SBN ritel dapat dibeli secara daring melalui berbagai mitra distribusi yang telah ditunjuk pemerintah, seperti bank dan perusahaan sekuritas.

Produk SBN ritel berupa Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Ritel (SR) dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, sedangkan produk SBN ritel berupa Savings Bond Ritel (SBR) dan Sukuk Tabungan (ST) tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Selain itu pengelompokan SBN Ritel juga dapat dibagi berdasarkan produk konvensional dan syariah. Kelompok produk konvensional antara lain Obligasi Negara Ritel (ORI) dan *Savings Bond Ritel* (SBR), sedangkan untuk produk syariah antara lain Sukuk Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST) dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel.

Sepanjang Januari hingga Desember 2024, pemerintah telah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) Ritel diantaranya mencakup seri ORI025 dilakukan pada triwulan I, seri SBR013 pada triwulan II, dan ORI026 pada triwulan III. Sedangkan untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel, pemerintah telah menerbitkan seri SR020 pada triwulan I, seri ST012 pada triwulan II, seri SR021 pada triwulan III, dan seri ST013 pada triwulan IV.

3.4 Pokja IV Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Layanan keuangan di sektor pemerintahan memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola yang lebih efisien dan transparan melalui elektronifikasi transaksi pembayaran. Implementasi penyaluran bantuan sosial secara elektronik menjadi motor penggerak dalam memperluas jangkauan akses keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat prasejahtera yang sebelumnya belum tersentuh layanan keuangan formal. Inisiatif ini berkontribusi pada peningkatan kepemilikan akun serta penggunaan layanan keuangan yang lebih inklusif.

Kelompok Kerja Pelayanan Keuangan di Sektor Pemerintah berperan aktif dalam mendukung dan mengawal proses penyaluran bantuan sosial secara digital, termasuk program bantuan dan subsidi, skema pembiayaan bersubsidi, serta digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintah daerah dan pelaku usaha ritel. Fokus utama kelompok kerja ini mencakup penguatan akses terhadap permodalan, fasilitasi pertumbuhan UMKM, serta pengembangan produk dan layanan keuangan digital. Di saat yang sama, upaya integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan secara inklusif melalui pemanfaatan teknologi keuangan juga terus diperkuat.

3.4.1 Elektronifikasi Bantuan Pemerintah

Transformasi penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah ke dalam bentuk nontunai memegang peranan krusial dalam mendorong efisiensi, ketepatan sasaran, kemudahan bagi penerima manfaat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Upaya elektronifikasi ini dirancang untuk mewujudkan prinsip 6T—tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi—sebagai landasan utama dalam memperkuat inklusi keuangan. Melalui pendekatan ini, masyarakat

didorong untuk lebih berdaya dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah mengimplementasikan sistem penyaluran bantuan sosial secara elektronik, di antaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, guna memastikan manfaat program diterima dengan lebih efektif dan efisien oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sepanjang tahun 2024, bantuan sosial PKH telah disalurkan kepada sekitar 10,03 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 100 persen dari target, dengan akumulasi nominal penyaluran PKH mencapai Rp28,20 T atau 98,24 persen dari target nominal. Adapun dari penyaluran tersebut, sejumlah Rp22,09T (78,32 persen) disalurkan kepada 7,70 KPM secara nontunai. Sementara itu, untuk Program Sembako telah disalurkan kepada 18,64 juta KPM (99,14 persen dari target KPM) dengan nominal sebesar Rp41,98 T (93,04 persen dari target nominal). Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak Rp36,14 T (86,11 persen) disalurkan kepada 15,05 juta KPM secara nontunai.

Program elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah lainnya berupa program Kartu Prakerja, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), perluasan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nontunai, Kartu Tani, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beberapa program pembiayaan bersubsidi yang menyasar kelompok usaha ultra mikro dan UMKM, serta program penjaminan atau asuransi pada sektor pertanian dan kelautan perikanan.

Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku UMK. Sepanjang tahun 2024, jumlah pendaftar yang gabung gelombang (join batch) mencapai 3.418.326 orang. Dari jumlah tersebut, sejumlah 1.510.968 orang ditetapkan sebagai penerima manfaat yang terbagi dalam 9 gelombang. Dari penerima SK, 1.419.298 orang telah memanfaatkan bantuan atau menjadi penerima efektif. Jumlah ini 123,5 persen dari target jumlah orang yang ditetapkan dalam DIPA awal tahun 2024. Mereka berasal dari 512 kabupaten/kota, termasuk perempuan (59 persen), peserta dari daerah tertinggal (1 persen), berpendidikan SD-SMP (14 persen), dan berusia 56-64 tahun (5 persen). Ini menunjukkan Program Kartu Prakerja mampu diakses oleh kelompok rentan/marjinal atau inklusif.

Kartu Prakerja turut memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan inklusi keuangan. Sebanyak 26 persen penerima yang sebelumnya belum memiliki rekening/e-wallet, setelah mengikuti Prakerja menjadi memiliki produk keuangan formal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 persen diantaranya memilih bank dan 92 persen memiliki e-wallet. Adapun 97 persen penerima manfaat Kartu Prakerja puas dengan mekanisme pembayaran insentif melalui rekening/e-wallet.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan elektronifikasi bantuan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan melalui Kartu Pelaku Usaha Kelautan (KUSUKA). Sampai dengan akhir tahun 2024, total e-KUSUKA yang telah diberikan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan sebanyak 1.703.654.

Dalam rangka mendorong transformasi digital untuk distribusi subsidi pupuk bagi para petani, Kementerian Pertanian telah mencetak sebanyak 5.432.071 kartu (99,10 persen dari target 2024) dan telah terdistribusi sebanyak 4.403.619 kartu (80,34 persen dari target 2024). Terdapat perubahan mekanisme pada Kartu Tani terkait dengan integrasi sistem informasi pupuk bersubsidi sehingga perlu dilakukan penyesuaian penggunaan mesin EDC menjadi mesin Mobile Point of Sales (MPOS).

Pada bidang pendidikan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah membantu biaya pendidikan bagi lulusan SMA/sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik namun memiliki keterbatasan finansial atau berasal dari keluarga kurang mampu yang disalurkan secara nontunai, terdiri atas biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa. Sampai dengan triwulan IV 2024, Kemendikbudristek telah menyalurkan dana bantuan KIP Kuliah sebesar Rp13,4 T (98,52 persen) dari target anggaran. Selanjutnya pada periode yang sama, Kementerian Agama juga telah menyalurkan sebesar Rp1,19 T (119 persen, lebih tinggi dari target Rp1,01 T) kepada 113.399 mahasiswa. Selanjutnya, program perluasan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nontunai melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tercatat sebesar 4.133.698 transaksi atau Rp17.100 T (146,65 persen dari target 2024).

3.4.2 Penyaluran Pembiayaan bagi UMKM secara Nontunai

Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp282,44 T (100,87 persen dari plafon). Mayoritas penyaluran KUR pada sektor produksi dengan persentase sebesar 57,8 persen, sedangkan sektor perdagangan sebesar 42,2 persen. Sampai dengan Oktober 2024, total debitur baru KUR mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65 persen dari target debitur baru KUR. Selanjutnya, capaian debitur KUR Graduasi mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24 persen dari target debitur graduasi KUR yang ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.

Guna melayani segmen pelaku usaha yang masih dalam skala ultra mikro, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga Desember 2024 telah tersalurkan kepada 2.220.272 debitur, dimana capaian tersebut melampaui target 2024. Namun demikian, pembiayaan UMi masih menghadapi tantangan dalam mencari penyalur potensial berupa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memiliki Non-Performing Loan (NPL) rendah yaitu di bawah 5 persen. Sementara itu, jumlah nasabah PNM Mekaar hingga akhir 2024 tercatat mencapai 14.398.997 nasabah (92,84 persen dari target 15,50 juta nasabah). Jumlah nasabah PNM Mekaar mengalami penurunan sejak berakhirnya program relaksasi kredit OJK pada akhir Maret 2024 sehingga pemberian permodalan bagi nasabah terdampak pandemi tidak dapat diberlakukan lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, PNM berupaya mengoptimalkan pemberdayaan kelompok nasabah eksisting

dengan mengoptimalkan peran ketua kelompok dalam kegiatan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), sehingga usaha kelompok nasabah dapat berkesinambungan.

3.4.3 Program Asuransi Sektor Pertanian dan Peternakan

Program asuransi pada sektor pertanian dan peternakan mendorong perluasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Realisasi bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada triwulan IV 2024 sebesar Rp40,148 M untuk luas lahan sawah 278.832,47 ha. Namun demikian, program AUTP masih menghadapi tantangan yaitu masih rendahnya pemahaman petani terkait program dan kesadaran membayar premi. Selanjutnya pada sektor peternakan, program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) tidak dapat dilaksanakan karena mengalami refocusing anggaran dalam rangka mendukung Upaya Khusus (upsus) peningkatan produksi padi dan jagung. Adapun program Asuransi Nelayan dan Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) juga ditiadakan karena refocusing anggaran pada tahun 2024.

3.4.4. Perluasan Elektronifikasi Transaksi Penerimaan dan Pembayaran di Sektor Transportasi

Pengembangan Program Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah hingga akhir 2024 telah terdapat 495 pemerintah daerah (pemda) yang berada di tahan digital atau sebesar 90,7 persen dari total 546 pemda. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan Satgas P2DD sebesar 85 persen. Sementara itu jumlah pemda yang berada di tahap maju mencapai 39 pemda, tahap berkembang sebanyak 11 pemda, dan tahap inisiasi sebanyak 1 pemda.

Selanjutnya dalam rangka implementasi elektronifikasi dan integrasi pembayaran transportasi, pada 2024 terdapat penambahan perluasan elektronifikasi menggunakan Uang Elektronik (UE) chip based pada perparkiran IRTI Monas yang dikelola oleh Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dishub DKI Jakarta. Adapun transaksi UE chip based di sektor transportasi pada triwulan IV 2024 mencapai 305,74 juta transaksi atau setara dengan Rp2,03 T yang didominasi oleh transaksi perparkiran 22,84 persen, disusul oleh Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebesar 10,55 persen, dan Trans Jakarta sebesar 6,57 persen.

Sementara itu, implementasi elektronifikasi pembayaran jalan tol telah menerapkan pembayaran menggunakan UE *chip based* pada seluruh ruas jalan tol (75 ruas). Selama triwulan IV 2024, transaksi UE *chip based* di jalan tol tercatat sebanyak 419,59 juta transaksi atau sebesar Rp9,37 T.

3.5 Pokja V Perlindungan Konsumen

Dengan tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih relatif rendah dan perkembangan inovasi produk dan layanan keuangan yang semakin kompleks dan

bervariasi, serta masih maraknya layanan keuangan informal dan illegal membawa konsekuensi peningkatan risiko bagi pengguna jasa keuangan serta memberikan tantangan yang besar bagi upaya-upaya pemerintah dan otoritas terkait untuk memastikan seluruh masyarakat sebagai konsumen produk dan keuangan terlindungi dari risiko yang mungkin terjadi. Perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan yang secara langsung mempengaruhi kredibilitas dan stabilitas sistem keuangan. Kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan merupakan pilar utama bagi peningkatan inklusi keuangan.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) melalui Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen memiliki program kerja yang memiliki fokus pada penyelesaian pengaduan konsumen di sektor keuangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Sektor Keuangan, pengawasan perilaku Pelaku Usaha Sektor Keuangan (*market conduct*), penguatan sinergi antar lembaga serta sosialisasi aktivitas keuangan ilegal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia otoritas dan penyelesaian sengketa sektor keuangan. Hingga Tahun 2024, penyelesaian pengaduan konsumen yang telah dilakukan mencapai 91,6 persen.

3.5.1 Penyelesaian Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan

Pokja Perlindungan konsumen bertugas melakukan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan tingkat keberdayaan konsumen sehingga konsumen mampu melindungi dirinya sendiri, mengurangi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, mengeliminasi penyampaian informasi sesat, penyalahgunaan kewenangan, dan *fraud*, serta mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan keuangan yang bertanggung jawab dan efisien.

Perlindungan konsumen memiliki ukuran keberhasilan dengan melihat minimum penyelesaian pengaduan konsumen di sektor keuangan yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melalui mekanisme *internal dispute resolution* (IDR) yang menjadi standard bagi PUJK melakukan perlindungan dengan menjadikan konsumen sebagai mitra proses perlindungan dan bukan sebagai objek. Standard IDR ini menjadi acuan minimum bagi PUJK dalam memberikan kualitas perlindungan yang baik bagi konsumen. Hingga 2024, jumlah pengaduan yang diterima melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) mencapai 34.378 dan sebanyak 31.340 pengaduan telah terselesaikan. Artinya, penyelesaian pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan mencapai 90,3 persen dan telah memenuhi target 90 persen.

Selain itu, terdapat penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Dalam hal ini, terdapat dua opsi penyelesaian sengketa, yaitu melalui mediasi dan arbitrase, keduanya merupakan mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesepakatan agar mendapatkan keputusan

yang menguntungkan semua pihak. Hingga tahun 2024, LAPS SJK telah menerima 2.695 sengketa dan seluruh sengketa telah terselesaikan dengan persentase keberhasilan 100 persen yang mana telah melampaui target 60 persen.

3.5.2 Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Pokja Pelindungan Konsumen telah aktif dalam melakukan sosialisasi tentang perlindungan konsumen dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak sebagai konsumen serta pentingnya memahami peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Melalui berbagai kampanye, seminar, workshop, dan media sosial, Pokja DNKI berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen dalam mengakses produk dan layanan keuangan.

Sosialisasi yang dilakukan meliputi penjelasan mengenai hak-hak konsumen, prosedur penyelesaian sengketa, tata cara pengaduan, dan informasi mengenai produk dan layanan keuangan yang aman dan terpercaya. Di samping itu, terdapat juga sosialisasi mengenai praktik keuangan yang adil, transparan, serta peningkatan pemahaman tentang risiko-risiko yang terkait dengan produk keuangan tertentu. Dengan melakukan sosialisasi secara terus-menerus, output yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan keuangan yang lebih sehat dan melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Hal ini sejalan dengan peran pemerintah sebagai lembaga pengawas dan regulator di sektor keuangan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan transaksi keuangan.

3.5.3 Implementasi Pengawasan *Market Conduct*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengawasan perilaku pasar (*Market Conduct*) adalah pengawasan terhadap perilaku PUSK dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Pengawasan perilaku Penyelenggara diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam setiap kegiatan dan integritas dalam industri yang telah diatur dan diawasi. Hingga tahun 2024, intensifikasi pengawasan perilaku Pelaku Usaha Sektor Keuangan (*market conduct*) berbasis risiko secara tematik terkait penyampaian informasi mengenai produk layanan jasa keuangan kepada masyarakat (iklan), telah tercatat beberapa kasus di tiap triwulan dengan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Triwulan I: Telah dilaksanakan 1 (satu) kali pengawasan terkait Pelindungan Konsumen di salah satu Penyelenggara Uang Elektronik;
2. Triwulan II: Telah dilaksanakan 1 (satu) kali pengawasan terkait Pelindungan Konsumen di salah satu Penyelenggara Uang Elektronik;
3. Triwulan III: Telah dilaksanakan 1 (satu) kali pengawasan terkait Pelindungan Konsumen di salah satu Penyelenggara Uang Elektronik.;

4. Triwulan III: Telah dilaksanakan 2 (dua) kali pengawasan terkait Pelindungan Konsumen di salah satu Penyelenggara Uang Elektronik dan Bank Nasional.

Berdasarkan rincian di atas, persentase target tindak lanjut dari temuan pelanggaran iklan PUSK dengan dikeluarkannya peringatan tertulis telah tercapai 100 persen. Untuk memperkuat ketaatan penyelenggara terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang diatur serta diawasi, penting untuk menerapkan pengawasan perilaku penyelenggara (*market conduct*) sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen.

3.6 Pokja VI Kebijakan dan Regulasi

Salah satu fondasi SNKI adalah kebijakan dan regulasi yang kondusif sehingga dapat mendukung pelaksanaan pilar-pilar keuangan inklusif mulai dari program edukasi dan literasi keuangan, pemberdayaan hak properti masyarakat, fasilitasi dan intermediasi distribusi saluran keuangan, layanan keuangan sektor pemerintah, hingga upaya penguatan perlindungan konsumen di sektor keuangan. Untuk mengimplementasikan fondasi ini dibentuk kelompok kerja kebijakan dan regulasi yang memiliki beberapa tugas diantaranya menyusun usulan rekomendasi kebijakan serta melakukan harmonisasi kebijakan dan regulasi keuangan inklusif.

Untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga keuangan, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan reformasi sektor keuangan Indonesia yang disusun menggunakan metode omnibus.

Secara umum UU P2SK mengatur lima hal krusial bagi reformasi sektor keuangan, yaitu (1) penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi; (2) penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; (3) mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; (4) perlindungan konsumen; dan (5) literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

Dalam rangka peningkatan inklusi dan literasi keuangan, sebagaimana amanat UU P2SK Pasal 226 Pemerintah membentuk komite nasional melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK) yang merupakan penguatan dari DNKI. Penguatan dimaksud tidak hanya mencakup aspek kelembagaan, namun juga secara substantif dan struktural. Pembentukan Komnas LIK dimaksud untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah secara berkelanjutan. Dimana sampai saat ini masih terus dilakukan pembahasan guna penyempurnaan RPP Komnas LIK.

Sepanjang tahun 2024, koordinasi pelaksanaan SNKI terus dilakukan dengan kelompok kerja DNKI lainnya terkait kebutuhan review kebijakan dan regulasi pelaksanaan program keuangan inklusif terutama beberapa regulasi yang terdampak UU P2SK, serta sinkronisasi data dan inventarisasi studi yang sudah ada dari masing-masing pokja untuk keperluan kajian, pembuatan kebijakan, dan regulasi.

Untuk mendukung keuangan inklusif dalam kebijakan dan regulasi sepanjang tahun 2024 telah diterbitkan, (i) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas PADG Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. PADG tersebut untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan dengan melakukan penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar berupa penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. (ii) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. PBI ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan sehingga perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan. (iii) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan (peraturan pelaksana PBI No. 3 Tahun 2024). (iv) Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Nasional Akselerasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (Satgas Kejar). Pembentukan Satgas ini untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi pelajar di Indonesia. (v) Penyusunan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG) sebagai salah satu upaya mendukung kebijakan inklusi keuangan yang berkualitas dan berbasis data sebagai pondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Dengan adanya DNTG maka menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan efektif.

3.7 Pokja VII Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan

Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan dibangun dan dikembangkan secara efektif, efisien dan berkelanjutan agar penyediaan produk dan layanan sektor keuangan yang lebih merata ke seluruh Indonesia. Infrastruktur keuangan dikategorikan baik dan berdampak positif jika akses keterjangkauan yang dibangun dan dikembangkan memiliki cakupan yang semakin meluas dari sebelumnya. Sedangkan, pengembangan teknologi informasi keuangan akan membawa dampak signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan jika adanya kemudahan akses, efisiensi, dan inovasi di layanan keuangan. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan oleh POKJA VII dalam memenuhi target inklusi keuangan yaitu sebagaimana berikut dibawah ini.

3.7.1 Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses *Fixed Broadband* (FBB) terhadap Total Rumah Tangga

Dalam rangka mengakselerasi rumah tangga yang terlayani dengan jaringan internet FBB, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai fasilitator telah membuat kebijakan berupa bantuan pemerintah yang bersifat stimulan dan katalisator dengan tujuan untuk menciptakan demand terhadap pelayanan FBB di masyarakat tanpa berkompetisi dengan penyelenggara komunikasi. Saat ini, berdasarkan data dari Komdigi sampai dengan Desember 2024, persentase jumlah rumah tangga yang terlayani (pelanggan) oleh FBB sebanyak 14.332.914 dari total rumah tangga sebanyak 68.700.700. Hal ini menyatakan bahwa besaran rumah tangga yang terlayani jaringan akses internet FBB di Indonesia berarti baru mencapai 20,86 persen yang mana dikategorikan masih tergolong rendah. Selain itu juga, dilaporkan bahwa data layanan pada rumah tangga yang telah on ada sebanyak 2.606 titik (100 persen UMKM dan fasilitas umum/fasum), dari total 2.606 tersebut merupakan penerima bantuan yang terdiri dari 205 fasum dan 2.401 UMKM.

3.7.2 Pemetaan desa/kelurahan di wilayah Non 3T yang akan difasilitasi peningkatan kualitas layanan seluler 4G

Dalam mengurangi menuntaskan blankspot dan sinyal lemah, pemerintah bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi berupaya melakukan pemetaan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan 4G di desa/kelurahan di wilayah Non 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang belum terlayani jaringan internet berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah. Pemetaan desa/kelurahan di wilayah Non 3T yang difasilitasi peningkatan kualitas layanan seluler 4G tahun 2024 yaitu:

1. Telkomsel telah menyelesaikan pembangunan pada 103 lokasi yaitu 26 lokasi site baru dan 77 lokasi optimal dari target tahun 2024 sebanyak 267 lokasi.
2. Indosat telah menyelesaikan pembangunan pada 17 lokasi dengan site baru dari target tahun 2024 sebanyak 17 lokasi.
3. XL Axiata telah menyelesaikan pembangunan pada 10 lokasi dengan optimal dari target tahun 2024 sebanyak 19 lokasi.
4. Smart Tel telah menyelesaikan pembangunan pada 17 lokasi dengan optimal dari target tahun 2024 sebanyak 17 lokasi, namun dari total lokasi tersebut terdapat 4 titik lokasi yang salah dikarenakan kurang tepatnya pemberian titik yang diserahkan oleh pihak Pemda.

3.7.3 Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di Wilayah 3T

Disamping itu juga, pemerintah giat melakukan pembangunan BTS atau stasiun basis pemancar bertujuan untuk meningkatkan dan menyediakan infrastruktur komunikasi nirkabel. Pembangunan BTS diutamakan pada wilayah 3T yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan semua orang dapat memiliki akses ke

layanan komunikasi. Capaian untuk pembangunan BTS 4G di wilayah 3T pada tahun 2025, secara kumulatif sampai dengan Mei 2025, terbangun BTS di 6.747 titik lokasi yang terdiri dari:

1. 233 titik lokasi BTS USO telah on-air, dari yang awalnya sebanyak dari 1.682 BTS USO eksisting (skema sewa jasa). Pengurangan terjadi karena adanya terminasi dan moratorium karena sudah tergelarnya jaringan dari Operator Seluler di lokasi tersebut. Adapun rincian site BTS di Papua sebanyak 283 site dan non-Papua sebanyak 950 site
2. 5.514 titik lokasi BTS New Site 4G (skema belanja modal), telah seluruhnya *on-air* dan sudah melayani masyarakat, dengan rincian site BTS di Papua sebanyak 2.979 site dan non Papua sebanyak 2.535 site

3.7.4 Utilisasi Palapa Ring

Palapa Ring merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa jaringan infrastruktur digital yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Komdigi. Infrastruktur Palapa Ring sebagai *backbone* dibangun dengan tujuan untuk menghubungkan akses internet di seluruh Indonesia dengan cepat dan stabil. Palapa Ring terdiri dari 3 paket, yaitu Palapa Ring Barat (mencakup wilayah Sumatera, Jawa dan Kepulauan Riau), Palapa Ring Tengah (mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi dan sebagian Nusa tenggara), dan Palapa Ring Timur (mencakup wilayah Maluku, Papua dan sebagian Nusa Tenggara). Rata-rata persentase utilisasi Palapa Ring per 31 Desember 2024 adalah sebesar 54,35 persen dengan rincian sebagai berikut:

1. Palapa Ring Paket Barat: Fiber Optic 72,67 persen
 - Utilisasi *fiber optic* sebesar 218 Gbps dari kapasitas *fiber optic* sebesar 300 Gbps
 - SLA 100 persen
2. Palapa Ring Paket Tengah: Fiber Optic 44 persen
 - Utilisasi *fiber optic* sebesar 264 Gbps dari kapasitas Fiber Optic sebesar 600 Gbps
 - SLA 100 persen
3. Palapa Ring Paket Timur: Fiber Optic 46,38 persen & Microwave 91,82 persen
 - Utilisasi *fiber optic* sebesar 371 Gbps dari kapasitas *fiber optic* sebesar 800 Gbps
 - Utilisasi Microwave sebesar 5.050 Mbps dari Kapasitas Microwave sebesar 5.500 Mbps
 - SLA 100 persen

3.7.5 Pembangunan Satelit Multifungsi Satria

Selain Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di Wilayah 3T, Utilisasi Palapa Ring, dan Penambahan Akses Internet di Wilayah 3T, BAKTI juga mengelola satelit yang dinamakan Satelit Multifungsi Satria. Satelit ini merupakan salah satu bentuk upaya

dalam menuntaskan persoalan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan perbatasan. Satelit ini juga merupakan PSN yang tercantum dalam PP No. 109/2020 yang dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis, dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional. Pada sektor keuangan, SATRIA mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pemberdayaan guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia. Dampak SATRIA terhadap perekonomian antara lain mendukung peningkatan online link dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UMKM *Transactional Center*, proses e-office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan.

Pada tahun 2024 total kapasitas satelit yang tersedia yaitu sebesar 150 Gbps dan kapasitas satelit yang telah terintegrasi dengan IP HUB sebesar 150 Gbps/150 Gbps (100 persen), pada 11 lokasi stasiun bumi yaitu Cikarang, Banjarmasin, Batam, Manado, Pontianak, Tarakan, Jayapura, Kupang, Ambon, Timika, dan Manokwari. Selain itu, kapasitas IP Transit yang telah tersedia sebesar 72 Gbps pada 11 lokasi stasiun bumi yaitu Cikarang, Banjarmasin, Batam, Manado, Pontianak, Tarakan, dan Jayapura. Sehingga total kapasitas SATRIA 150 Gbps tersebut sudah terbagi ke dalam 27.858 titik lokasi akses internet yang tersebar di seluruh Indonesia.

3.7.7 Sistem Informasi dan Basis Data Keuangan Inklusif

Inklusi keuangan terus dipantau agar sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai, sistem informasi dan basis data representatif yang menyajikan informasi perkembangan inklusi keuangan dibutuhkan bagi praktisi pembangunan, perumus kebijakan, peneliti, para ahli maupun masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan perkembangan dan capaian inklusi keuangan. Pembaharuan data, informasi, survei dan fitur terus dilakukan antara lain melalui Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI), Sistem Informasi SIUMB (Sistem Informasi UMKM Bank Indonesia), *Financial Access Survey* (FAS) dari *International Monetary Fund* (IMF), dan Informasi Debitur (iDep) SLIK OJK melalui aplikasi iDebku.

3.7.8 Pengembangan Infrastruktur *Fast Payment*

Dalam menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait layanan transfer dana secara efisien, cepat (*real time*) dan tersedia setiap saat, dilakukan pengembangan infrastruktur pembayaran melalui layanan BI-FAST guna menambah kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi non tunai yang mendukung serta memperkuat ketahanan sistem pembayaran nasional. Perkembangan digitalisasi dan inovasi sistem pembayaran dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan percepatan inklusi keuangan dan ekonomi dengan mempertimbangkan peningkatan risiko kompleksitas kegiatan dan variasi model bisnis penyelenggaraan sistem pembayaran yang semakin tinggi. Pada tahun 2024, BI telah melakukan sejumlah pengembangan signifikan pada

infrastruktur BI-FAST untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran ritel nasional.

1. Penyediaan tiga layanan baru BI-FAST

BI memperkenalkan tiga layanan baru pada BI-FAST:

- Transfer Kolektif (*Bulk Transfer*): Memungkinkan pengiriman dana dari satu pengirim ke banyak penerima sekaligus, minimal 20 transaksi dalam satu instruksi.
- Pembayaran atas Dasar Permintaan (*Request for Payment*): Memberikan kemudahan bagi penerima dana untuk mengirimkan permintaan pembayaran kepada pengirim dana. Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk penagihan pembayaran *invoice* dan penagihan perorangan.
- Transfer Debit Secara Langsung (*Direct Debit*): Memfasilitasi pembayaran tagihan rutin secara otomatis, seperti pembayaran listrik, air, cicilan leasing, dan premi asuransi, dengan otorisasi pendebetan langsung dari rekening nasabah.

2. Penguatan infrastruktur keamanan dengan fitur *proactive risk manager*

BI telah melengkapi infrastruktur BI-FAST dengan fitur *Proactive Risk Manager* untuk mendeteksi anomali transaksi keuangan dan memitigasi risiko transaksi mencurigakan.

3.8 Sekretariat

3.8.1 Rapat Koordinasi antar Kelompok Kerja (Pokja), Sekretariat, dan Mitra DNKI

Gambar 22. Rapat Koordinasi Triwulan I Tahun 2024



Rapat Koordinasi Triwulan I Tahun 2024 antara Kelompok Kerja (Pokja), Sekretariat, dan Mitra Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2024 di Jakarta. Rapat ini didasari oleh adanya kewajiban dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) untuk melaporkan pencapaian dan progres dari setiap Kelompok Kerja (Pokja) DNKI kepada Sekretariat DNKI.

Rapat koordinasi triwulan I menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dalam upaya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Survei seperti Susenas dipandang penting sebagai dasar data dan insight tahunan yang

komprehensif. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem DNKI serta integrasi satu data menjadi fokus utama guna mendukung efektivitas koordinasi dan kebijakan. Ditekankan pula pentingnya kebijakan konkret, *pilot project*, serta pengembangan infrastruktur dan inovasi sistem pembayaran digital. Strategi lainnya meliputi optimalisasi layanan seperti QRIS, Laku Pandai, dan LKD, serta pemberantasan aktivitas

keuangan ilegal. Di sisi kelembagaan, penguatan KNLIK menjadi langkah penting dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan secara berkelanjutan.

3.8.2 Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Gambar 23. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional



Pada Maret 2024, DNKI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian DNKI dan dihadiri oleh Wakil Ketua DNKI, Ketua Pokja, Sekretariat serta Mitra DNKI. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau capaian inklusi keuangan hingga tahun berjalan serta memperkuat sinergi

antar anggota dan mitra strategis. Rapat juga membahas strategi untuk menutup kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi, serta pentingnya penguatan data ter disagregasi dan pengembangan regulasi kelembagaan, termasuk pembentukan Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Dalam rapat koordinasi ini, dilaporkan bahwa pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 88,7 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 85,1 persen, dan telah melampaui target tahunan sebesar 88 persen. Capaian ini mencerminkan hasil nyata dari sinergi kebijakan dan program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, rapat juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih harus diatasi, seperti kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan, disparitas antar wilayah, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan data inklusi yang ter disagregasi. Salah satu tindak lanjut kelembagaan yang dibahas adalah penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan sebagai upaya memperkuat koordinasi pusat-daerah dan memperluas cakupan program literasi keuangan nasional.

3.8.3 Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Barat

Gambar 24. Rapat Koordinasi Wilayah TPAKD



Pada 2 Juli 2024, Sekretariat DNKI bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Batam, Kepulauan Riau. Acara ini dihadiri oleh perwakilan TPAKD dari provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera dan sebagian Jawa bagian barat, serta perwakilan dari OJK, Kemenko Perekonomian, BI, dan

pelaku industri keuangan. Tujuan kegiatan adalah memperkuat sinergi antar daerah dalam mempercepat akses keuangan masyarakat, terutama melalui program unggulan TPAKD seperti Kredit/Pembangunan Melawan Rentenir (K/PMR), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan Business Matching UMKM.

Kegiatan ini juga menjadi forum pertukaran praktik baik antar daerah dalam menjalankan strategi inklusi berbasis lokal. Hasil rakor mencatat pentingnya digitalisasi program, penguatan data inklusi daerah, serta perlunya peran aktif kepala daerah dalam menjadikan inklusi keuangan sebagai agenda prioritas pembangunan.

3.8.4 Rakorwil Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Tengah dan Timur

Gambar 25. Rakorwil Tim TPAKD



Melanjutkan rangkaian Rapat Koordinasi Wilayah, pada Agustus 2024 diselenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah TPAKD untuk Wilayah Tengah dan Timur di Kota Makassar. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas daerah dalam mendorong pemerataan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat pedesaan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Diskusi fokus pada tantangan akses geografis, rendahnya literasi keuangan digital, serta perlunya sinergi antara program inklusi dengan penguatan ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Salah satu output penting dari kegiatan ini

adalah rencana pembentukan sistem monitoring dan evaluasi inklusi keuangan berbasis daerah sebagai acuan perumusan kebijakan daerah.

3.8.5 Rapat Koordinasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur

Gambar 26. Rapat Koordinasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)



Rapat Koordinasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur digelar pada 14 November 2024. Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah terhadap peran strategis Program KEJAR, mendorong dukungan kebijakan di tingkat daerah, serta memastikan keberlanjutan

program melalui monitoring dan evaluasi yang efektif. Kegiatan Rakor yang berlangsung di Surabaya ini dibuka oleh Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK. Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perbanas, Perbarindo, Asbanda, dan perwakilan industri perbankan lainnya. Dukungan lintas sektor ini menjadi kunci sukses keberlanjutan Program KEJAR di seluruh wilayah Indonesia. Program KEJAR terus menjadi bukti nyata sinergi pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam membangun masa depan keuangan Indonesia yang lebih inklusif.

3.8.6 Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD): Optimalisasi Peran & Fungsi TPAKD dalam rangka Akselerasi Pemanfaatan Produk serta Layanan Pasar Modal

Gambar 27. Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah



Sekretariat DNKI bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan tema "Optimalisasi Peran dan Fungsi TPAKD dalam rangka Akselerasi Pemanfaatan Produk serta Layanan

Pasar Modal". Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh TPAKD dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman anggota TPAKD terhadap mekanisme pasar modal sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat umum. Materi pelatihan mencakup strategi

literasi pasar modal, produk investasi syariah, perlindungan investor pemula, serta studi kasus dari daerah yang telah berhasil mengembangkan program inklusi pasar modal berbasis komunitas. Peserta juga memperoleh pelatihan teknis tentang penggunaan platform digital pasar modal yang inklusif dan *user-friendly*.

3.9 Sinergi dan Kolaborasi Program

3.9.1 Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi Perempuan bersama Permodalan Nasional Madani

Gambar 28. Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi Perempuan



Intelektual dan Modal Sosial. Kegiatan ini dihadiri oleh 75 nasabah PNM Mekaar wilayah Bandung serta perwakilan dari Asisten Perekonomian Kabupaten se-Jawa Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan se-Jawa Barat, Kepala Kantor Agama se-Jawa Barat dengan total 200 peserta.

3.9.2 Women's Digital Financial Inclusion Hub Learning Session di Adis Ababa, Ethiopia bersama Women's World Banking

Gambar 29. FinEquity Annual Africa Convening



Kegiatan sosialisasi keuangan inklusif bagi perempuan dilaksanakan di Aula Barat Gedung Sate, Bandung pada tanggal 6 Februari 2024. Sinergi PNM dengan Kemenko Bidang Perekonomian mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih pinjaman atau pembiayaan untuk usaha. Melalui PNM Mekaar selalu memberikan 3 modal dalam usaha, yakni Modal Finansial, Modal

Satgas IKDP diwakili Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Aisyiyah, berpartisipasi dalam acara sampingan *FinEquity Annual Africa Convening* yang bertajuk *"Inclusive Policy to Accelerate Progress: Sharing Experiences in Driving Women's Digital Financial Inclusion"*. Pada kegiatan yang dilaksanakan pada Maret 2024, delegasi Indonesia berkontribusi

dalam merumuskan solusi atas tantangan implementasi kebijakan inklusi keuangan yang lebih inklusif. Dengan berbagi pengalaman terkait regulasi, sinergi antar-lembaga,

serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mempercepat inklusi keuangan perempuan secara global.

3.9.3 DANA Disberdaya: Merangkul UMKM Perempuan Disabilitas Untuk Siap Berdaya

Gambar 30. DANA Disberdaya



Pada 8 Maret 2024, DANA Indonesia menyelenggarakan program "DisBerdaya: Merangkul UMKM Perempuan Disabilitas untuk Siap Berdaya" bekerja sama dengan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Kegiatan ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM perempuan penyandang disabilitas di Jakarta dan mencakup pelatihan

kewirausahaan, pemasaran digital, serta sosialisasi penggunaan teknologi soundbox QRIS melalui alat transaksi berbasis suara yang mempermudah akses bagi pelaku usaha disabilitas. Program ini mendukung target inklusi keuangan nasional, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi dan literasi digital perempuan disabilitas melalui pemanfaatan teknologi keuangan inklusif.

3.9.4 Program Strive Indonesia dan Penguatan Kerjasama Keuangan Digital

Gambar 31. Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan CEO Mastercard



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pertemuan bilateral dengan Mr. Michael Miebach, CEO Mastercard, pada tanggal 17 April 2024 dalam rangka penguatan kolaborasi strategis melalui Program Strive Indonesia. Program ini merupakan inisiatif global yang ditujukan untuk mendukung

pertumbuhan UMKM, khususnya melalui pemanfaatan teknologi keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Menko Perekonomian menyampaikan apresiasi atas dukungan Mastercard dalam pengembangan literasi dan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, serta mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam memperluas ekosistem pembayaran digital di Indonesia. Program Strive Indonesia diharapkan dapat menjadi

model kolaborasi sektor publik-swasta yang mampu mendorong transformasi digital yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari bawah.

3.9.5 Diseminasi Praktik Baik dan Pembelajaran Program SEED 4 Women: Women Small Businesses Economic Empowerment thought Digital Financial Inclusion Initiative bersama Mercy Corps Indonesia

Gambar 32. Diseminasi Praktik Baik dan Pembelajaran Program SEED 4 Women



Sekretariat DNKI bersama Mercy Corps Indonesia dan dukungan dari Citi Foundation menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Praktik Baik hasil implementasi Program SEED 4 Women (*Small Businesses Economic Empowerment through Digital Financial Inclusion Initiative*) pada tanggal 28 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan capaian, tantangan, dan

pembelajaran program dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku UMKM melalui akses keuangan digital. Dalam forum ini dipaparkan bahwa 95 persen peserta program telah berhasil menggunakan layanan keuangan digital secara aktif, dan terdapat peningkatan pendapatan serta daya tahan usaha selama masa program berlangsung.

3.9.6 Pertemuan Project Advisory Committee (PAC) Pembahasan Kemajuan Proyek PROMISE II IMPACT bersama International Labour Organization

Gambar 33. Pertemuan Project Advisory Committee (PAC)



Pertemuan Project Advisory Committee (PAC) untuk program PROMISE II IMPACT diselenggarakan pada 6 Juni 2024 di Hotel Pullman Jakarta. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara ILO dan SECO (Swiss State Secretariat for Economic Affairs) yang bertujuan untuk mendukung pengembangan inklusi keuangan berbasis komunitas, terutama bagi kelompok marginal seperti petani, buruh tani, dan pelaku usaha kecil.

Agenda utama kegiatan meliputi evaluasi kemajuan proyek, diskusi rencana kerja semester kedua, serta penyerahan penghargaan kepada mitra lokal terbaik, seperti ARC-USK, Bank NTT, dan KPBS Pangalengan yang telah berhasil mengimplementasikan model inklusi berbasis koperasi dan kelompok tani. Diskusi juga menyoroti pentingnya

keberlanjutan program setelah pendanaan berakhir, termasuk mekanisme replikasi model ke wilayah lain yang memiliki kondisi sosial serupa.

3.9.7 *Leadership and Diversity Program for Regulators di Oxford University bersama Women's World Banking*

Gambar 34. Leadership and Diversity Program for Regulators



Pada Juni 2024, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berpartisipasi dalam *Leadership and Diversity Program for Regulators* yang diselenggarakan oleh Women's World Banking dan Saïd Business School, Universitas Oxford. Program ini bertujuan untuk memperkuat

kapasitas pemimpin senior dan perempuan potensial dalam merancang kebijakan inklusif gender guna meningkatkan akses keuangan bagi perempuan.

3.9.8 Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi UMKM di Belitung

Gambar 35. Sosialisasi Keuangan Inklusif

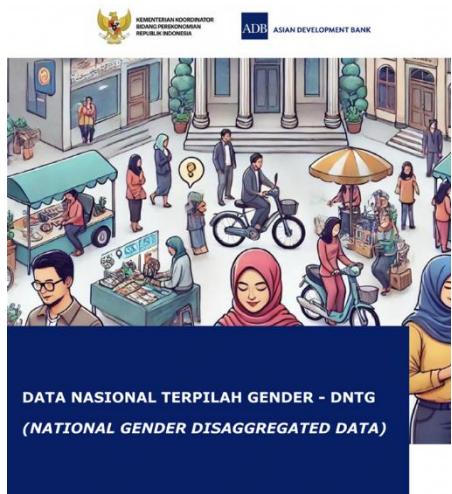


Dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Tanjungpandan ke-185 yang dirangkaikan dengan Belitung Expo 2024, telah diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi UMKM pada 2 Juli 2024. Acara ini diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Belitung dan didukung oleh OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 200 pelaku UMKM lokal

dan masyarakat umum. Sosialisasi mencakup edukasi terkait akses pembiayaan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan keuangan digital, serta perlindungan konsumen keuangan. Kegiatan ini berhasil mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku usaha kecil serta membuka peluang kerja sama dengan lembaga jasa keuangan.

3.9.9 Penyusunan Laporan Data Nasional Terpilih Gender bersama Asian Development Bank

Gambar 36. Cover DNTG



Perempuan berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif, yang diakomodasi melalui Perpres No. 114 Tahun 2020 dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKIP). Sebagai upaya implementasi, Pemerintah menyusun Laporan Data Nasional Terpilih Gender (DNTG) untuk memetakan akses dan kesenjangan layanan keuangan berbasis gender. Data ini menjadi dasar penyusunan kebijakan yang adil, serta diintegrasikan dalam Dashboard Peta Titik Akses Keuangan (FAM) sebagai alat monitoring inklusi keuangan nasional. Dengan dukungan Asian Development Bank (ADB), proses penyusunan

DNTG Semester I Tahun 2024 dilakukan melalui FGD pada September–November 2024, melibatkan lebih dari 20 lembaga keuangan, dan diterbitkan pada November 2024. DNTG memberikan gambaran lanskap partisipasi akses keuangan berdasarkan gender dari berbagai lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank.

3.9.10 DANA SisBerdaya 2024: Giliran Pengusaha Perempuan Bisa Mendunia

Gambar 37. DANA SisBerdaya 2024



Pada 6 Agustus 2024, DANA bersama Ant International meluncurkan program SisBerdaya 2024: Giliran Pengusaha Perempuan Bisa Mendunia yang memperluas jangkauan program tahun sebelumnya dengan empat pilar utama: *Capacity Building*, *Mentoring*, *Business Matching*, dan *Competition*. Program ini

menambahkan kategori DisBerdaya khusus bagi 50 UMKM perempuan penyandang disabilitas. Sebanyak 195 peserta terpilih dari tiga wilayah Indonesia akan mengikuti pelatihan literasi keuangan, digitalisasi, dan manajemen usaha selama satu bulan sebelum kompetisi final. Didukung mitra seperti Women's World Banking dan GreatNusa, program ini menyediakan total dana hibah Rp750 juta dan diresmikan melalui penandatanganan komunikasi kolaboratif bersama DNKI sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan dan daya saing UMKM perempuan di tingkat global.

3.9.11 Program Y-Bank 2024 bersama Asian Development Bank

Gambar 38. Program Y-Bank 2024



Program Y-Bank 2024 terintegrasi dengan Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) sebagai bagian dari Program Inklusi Keuangan Pemuda Indonesia yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dukungan dari Asian Development Bank (ADB). Program Y-Bank 2024 dilaksanakan dalam format pembelajaran komprehensif

selama lima hari mulai tanggal 12-16 Agustus 2024. Program Y-Bank 2024 telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan literasi keuangan pemuda Indonesia melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman yang komprehensif dan inovatif. Keberhasilan program ini tercermin dari peningkatan signifikan pengetahuan peserta dalam seluruh materi substansi yang diajarkan, perubahan sikap dan niat untuk berperilaku keuangan positif, serta terbukanya peluang karier konkret melalui program magang di berbagai mitra industri.

3.9.12 Penguatan Ekosistem Rantai Nilai Minyak Nilam di Aceh bersama International Labour Organization

Gambar 39. Penguatan Ekosistem Rantai Nilai Minyak Nilam di Aceh



Kegiatan penguatan ekosistem rantai nilai minyak nilam di Aceh dilaksanakan pada tanggal 14-16 September 2024. Nilam atau Minyak Atsiri adalah komoditas perkebunan yang menghasilkan minyak nilam dan juga merupakan komoditas ekspor di Indonesia. Acara ini menjadi momentum penting bagi ILO, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pemerintah

Daerah Aceh untuk lebih memahami peran inklusi keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem. EKI Nilam Aceh telah menunjukkan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani nilam dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

3.9.13 Seminar Nasional Kolaborasi Dan Inovasi Untuk Keuangan Inklusif Bagi Perempuan bersama Women's World Banking

Gambar 40. Seminar Nasional Kolaborasi Dan Inovasi Untuk Keuangan Inklusif



Sekretariat DNKI bersama dengan Women's World Banking (WWB) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Seminar Nasional bertema "Kolaborasi dan Inovasi untuk Keuangan Inklusif bagi Perempuan" pada 13 November 2024. Acara ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya lintas sektor dalam

mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses keuangan yang lebih luas dan adil. Salah satu agenda utama dalam seminar ini adalah Launching Satuan Tugas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital bagi Perempuan, hasil kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dengan Women's World Banking (WWB). Satuan Tugas ini dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat advokasi, kebijakan, serta program yang berfokus pada peningkatan akses dan pemanfaatan layanan keuangan digital oleh perempuan, khususnya di daerah tertinggal dan komunitas rentan.

3.9.14 Seminar on Designing an MSME Ecosystem in Indonesia Lessons from the Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2024 bersama Asian Development Bank

Gambar 41. Seminar on Designing an MSME Ecosystem in Indonesia Lessons from the Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2024



Pada 25 November 2024, Sekretariat DNKI hadir dalam kegiatan seminar bertajuk "Designing an MSME Ecosystem in Indonesia: Lessons from the Asia SME Monitor 2024" yang diselenggarakan oleh ADB. Kegiatan ini merupakan forum berbagi pengetahuan dan pengalaman lintas negara dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh, berkelanjutan, dan terintegrasi secara digital. Seminar menghadirkan pembicara internasional dan dihadiri oleh lebih dari 250 peserta dari kalangan pemerintah, pelaku UMKM, akademisi, dan lembaga donor. Diskusi mencakup topik akses pembiayaan, digitalisasi usaha kecil, penguatan kelembagaan koperasi, serta regulasi yang mendukung skala usaha. Hasil pemetaan Asia SME Monitor menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, namun masih memerlukan reformasi struktural dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

3.9.15 Focus Group Discussion Ekosistem Keuangan Inklusif di Daerah - Asuransi Mikro bersama Askrindo

Gambar 42. Focus Group Discussion Ekosistem Keuangan Inklusif di Daerah



FGD Ekosistem Keuangan Inklusif di Daerah dalam kerangka TPAKD diselenggarakan pada 21 November 2021 di Jakarta sebagai bagian dari implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mendukung pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan peran Asuransi Mikro sebagai instrumen perlindungan

finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan premi terjangkau dan proses klaim sederhana. Asuransi Mikro memiliki peran penting dalam melindungi pelaku usaha mikro dari risiko usaha maupun bencana terhadap aset, serta memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan peningkatan edukasi, digitalisasi layanan, dan integrasi program pemerintah melalui TPAKD guna memperluas jangkauan Asuransi Mikro sebagai bagian dari upaya percepatan inklusi keuangan yang berkelanjutan.

3.9.16 Sosialisasi Asuransi dan Pembiayaan Usaha Bagi Pemuda, Perempuan, dan UMKM bersama Askrindo

Gambar 43. Sosialisasi Asuransi dan Pembiayaan Usaha



Upaya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan risiko dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosialisasi publik. Salah satunya melalui Sosialisasi Asuransi dan Pembiayaan Usaha Bagi Pemuda, Perempuan, dan UMKM yang diselenggarakan pada tanggal 11 November 2024 di Pontianak,

Kalimantan Barat. Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan dan pemuda.

3.9.17 Focus Group Discussion dan Kunjungan Program Keuangan Inklusif bagi Petani melalui Sistem Resi Gudang

Gambar 44. Focus Group Discussion dan Kunjungan Program Keuangan Inklusif bagi Petani



Kegiatan ini dilaksanakan pada 1 November 2024 bertempat di Kantor BJB Cianjur dan Gudang SRG Warungkondang yang dipimpin oleh Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah. Sistem resi gudang merupakan salah satu instrumen yang sangat efektif untuk meningkatkan keuangan inklusif dengan mendorong

pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Kolaborasi yang telah dilakukan berupa kerjasama SRG komoditi tembakau, sinergi logistik nasional, implementasi block chain logistik hingga penjaminan pembiayaan.

3.9.18 Program Membina dan Memberdaya (Mba Maya) dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) Permodalan Nasional Madani

Gambar 45. Program Membina dan Memberdaya (Mba Maya) dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM)



Sepanjang tahun 2024, PNM secara konsisten menjalankan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan melalui dua program utama, yaitu Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) dan Program Merdeka dan Berdaya (Mba Maya). PKM dilaksanakan lebih dari 5,2 juta kali dengan total partisipasi mencapai hampir 56 juta, menjadi wadah rutin bagi nasabah untuk menyetor angsuran

sekaligus menerima edukasi dasar keuangan dan pengembangan usaha. Sementara itu, Program Mba Maya memperkuat aspek literasi keuangan, digital, dan kewirausahaan, serta mendorong kepemimpinan dan kekompakkan kelompok melalui sesi singkat mingguan. Keduanya saling melengkapi dalam membangun kapasitas usaha ibu-ibu pelaku ultra mikro, memperluas jaringan usaha komunitas, serta mempercepat inklusi keuangan di tingkat akar rumput. Output dari kedua program ini mencakup peningkatan kemampuan usaha, terbentuknya ribuan klaster dan agen BRILink Mekaar, serta tumbuhnya ekosistem pemberdayaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

3.9.19 Bank Jatim Expo 2024

Gambar 46. Bank Jatim Expo 2024



Bank Jatim Expo 2024 diselenggarakan pada 7–10 November 2024 di Ciputra World Surabaya sebagai ajang pameran produk UMKM binaan, undian tabungan Simpeda, serta hiburan musik dari artis nasional. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Diskofest 2024 yang menghadirkan diskusi dan kolaborasi antara

UMKM, perbankan, dan mitra strategis. Expo ini memperkuat komitmen Bank Jatim dalam mendukung pemberdayaan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi antara sektor keuangan dan pelaku usaha lokal.

04

PENINGKATAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

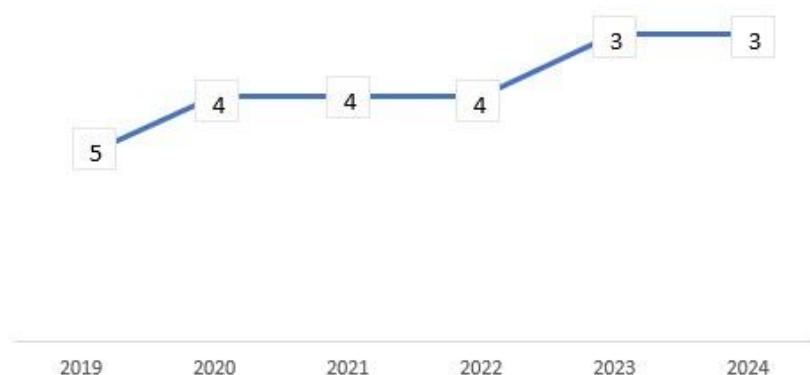
Halaman ini sengaja dikosongkan

Indonesia saat ini sebagai negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di Dunia, dimana berdasarkan data *timesprayer* penduduk muslim di Indonesia berkisar 244,7 juta jiwa dari total populasi 281,3 juta jiwa. Peringkat tersebut mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana tahun 2024, menurut sumber yang berbeda, yaitu *World Population Review*, Pakistan sempat menduduki posisi pertama dengan 240,8 juta Muslim, sementara Indonesia berada di peringkat kedua dengan 236 juta. Selain itu, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah serta *halal lifestyle* di Indonesia mulai dilihat oleh banyak Negara di Dunia sebagai salah satu unsur penting untuk pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru, guna mendukung perekonomian yang berkelanjutan (*Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029*). Berdasarkan data *The State Global Islamic Economy Indicator (SGIE)* tahun 2024 menempatkan Indonesia di peringkat ke-3 Global dari 15 Negara di bawah Malaysia dan Arab Saudi.

Pada seluruh indikator SGIE, yaitu seperti *halal food*, *islamic finance*, *muslim-friendly travel*, *modest fashion*, *halal pharmaceuticals & cosmetics*, dan *media recreation* menempati peringkat 10 terbaik. Prestasi Indonesia secara global tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak baik antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor industri, asosiasi ahli dan akademisi. Peringkat SGIE Indonesia tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 13. Peringkat Indonesia pada SGIE (2019-2024)

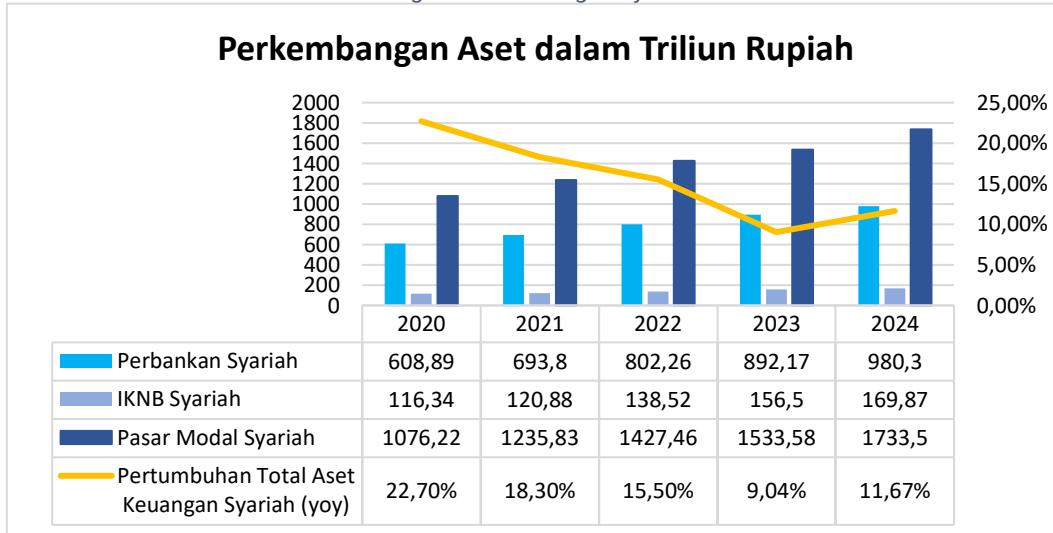
Peringkat SGIE Indonesia Tahun 2019-2024



Pada tahun 2024 Indonesia mengalami kenaikan 1 posisi pada sektor *islamic finance*/keuangan syariah, sebelumnya Indonesia berada pada peringkat 7 sedangkan pada tahun 2024 berada pada peringkat 6. Menurut data yang dikeluarkan oleh OJK per Desember 2024, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp2.883,67 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 11,67 persen (yoy) dari sebelumnya Rp2.582,25 triliun. Angka pertumbuhan tersebut juga menunjukkan kenaikan tingkat pertumbuhan dari tahun 2023 ke 2024 lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2022 ke 2023 yang hanya meningkat 9,04 persen (yoy).

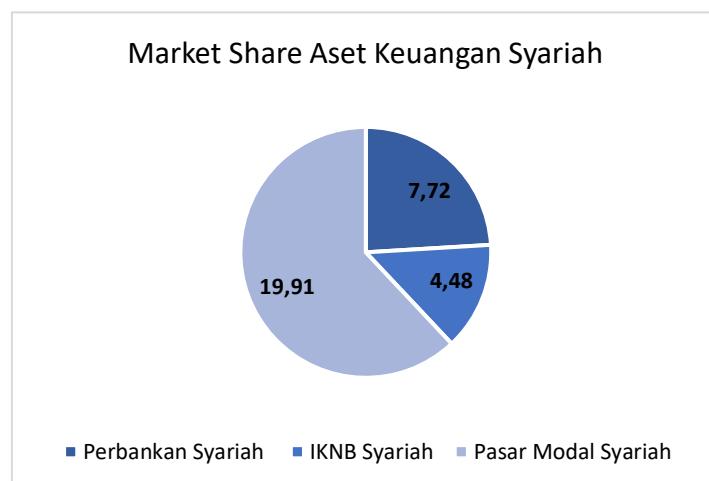
Pertumbuhan total aset keuangan syariah tahun 2024 didorong oleh aset perbankan syariah yang meningkat cukup signifikan dari tahun 2023 senilai Rp892,17 triliun menjadi Rp980,30 triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 9,88 persen (yoY). Selain itu, total aset Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,54 persen (yoY) pada tahun 2024 dengan nilai Rp169,87 triliun. Kemudian, total aset pasar modal syariah pada tahun 2024 mencapai Rp1.733,50 triliun, angka ini mencatat pertumbuhan sebesar 13,04 persen (yoY). Keseluruhan capaian peningkatan ketiga sektor tersebut mencerminkan semakin tingginya kontribusi industri keuangan syariah bagi perekonomian nasional. Grafik perkembangan aset keuangan syariah dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 14. Perkembangan Aset Keuangan Syariah Tahun 2020-2024



Tercatat per Desember 2024 *market share* keuangan syariah mencapai angka 11,45 persen, masih lebih rendah dibandingkan *market share* keuangan konvensional sebesar 88,55 persen. Secara berurutan *market share* aset keuangan syariah terbesar dicapai oleh perbankan syariah (7,72 persen), IKNB syariah (4,48 persen), dan Pasar Modal syariah (19,91 persen). Secara detail *market share* keuangan syariah di tunjukan pada grafik berikut.

Grafik 15. Market Share Aset Industri Keuangan Syariah



4.1 Kolaborasi Perkembangan Keuangan Syariah

Perkembangan keuangan syariah tidak lagi menjadi wacana alternatif, melainkan telah tumbuh menjadi bagian penting dalam sistem keuangan global. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, keuangan syariah hadir sebagai solusi inklusif yang mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Namun, pertumbuhan ini tidak bisa berdiri sendiri. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam memperkuat fondasi dan memperluas jangkauan keuangan syariah.

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, dan Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang tangguh dan kompetitif. Pemerintah dalam hal ini Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI), dan regulator perlu memberikan arah kebijakan yang jelas dan kondusif. Lembaga keuangan syariah harus terus berinovasi, memperkuat tata kelola, serta menyediakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, peran akademisi dan komunitas menjadi penting dalam menyebarkan literasi dan edukasi keuangan syariah secara lebih masif.

Melalui semangat gotong royong dan visi bersama, kolaborasi dalam perkembangan keuangan syariah akan membawa dampak nyata, tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga bagi kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Kini saatnya seluruh elemen bergerak bersama, membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing global.

4.1.1 Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) Tahun 2024

Gambar 47. *Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) Tahun 2024*



Sebagai Negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dan peluang besar sebagai pemain utama dalam perekonomian dunia khususnya di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Melihat potensi besar tersebut, Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral berkolaborasi bersama K/L berupaya memberikan kontribusi

nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, diantaranya melalui penyelenggaraan kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) sejak tahun 2014.

ISEF sendiri mempunyai visi dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai pondasi utama kebijakan nasional maupun internasional yang menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai

upaya mewujudkan visi tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan kegiatan – kegiatan seperti ISEF dari level nasional menuju level internasional. ISEF juga menjadi puncak dari kegiatan eksyar bertajuk “Festival Ekonomi Syariah (FESyar)” dimana pada tahun 2024 telah diselenggarakan secara hybrid di 3 (tiga) wilayah di Indonesia, yakni di Provinsi Kepulauan Riau untuk FESyar Regional Sumatera, Sulawesi Tenggara untuk FESyar Regional Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan Jawa Timur untuk FESyar Regional Jawa.

ISEF tahun 2024 bertemakan “*Synergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth*”. Tema tersebut mencerminkan betapa kuat sinergi bersama mewujudkan ekonomi syariah sebagai role model bisnis baru atau arus baru untuk ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, serta berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain global. Beberapa strategi yang bisa memajukan ekonomi dan keuangan syariah yakni, pertama penguatan ekosistem produk halal, melalui akselerasi ekosistem halal *end to end* berbasis IoT, perluasan dan akselerasi aktivitas business holding pesantren, perluasan negara tujuan dan ekspor, penguatan branding modest fashion Indonesia ke global dan juga akselerasi sertifikasi halal sebagaimana amanat Undang-Undang (UU). Kedua, penguatan keuangan syariah peningkatan pemanfaatan keuangan komersial syariah, keuangan sosial Ziswaf, untuk membangun kesejahteraan rakyat dan ketiga penguatan inklusi keuangan serta penerapan halal lifestyle. Adapun kegiatan ISEF tahun 2024 ini diselenggarakan dari tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 3 November 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) dengan jumlah audiens lebih dari 1000 peserta dari berbagai sektor.

4.1.2 Rapat Pleno KNEKS Sinergi dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Gambar 48. Rapat Pleno KNEKS Sinergi dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah



Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, pengembangan ekosistem industri halal perlu difokuskan pada penguatan daya saing produk halal dalam negeri dan ekspansi ke pasar global. Penguatan posisi Indonesia di pasar produk halal global perlu ditingkatkan. Dimana, pada tahun 2023, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebesar 4,1 Miliar USD, surplus tersebut sejak tahun 2019. Tren positif tersebut harus dimaksimalkan melalui inovasi riset produk halal serta kerja sama perdagangan dan keberterimaan produk halal

(*Mutual Recognition Agreement*) yang diarahkan untuk menciptakan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Membangun industri halal juga bukan semata-mata tentang sertifikasi halal, namun yang lebih utama adalah mengembangkan *halal value chain* yang melibatkan berbagai pihak terkait. Sehingga dalam mensukseskan program wajib halal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal, penguatan sektor hulu sampai hilir menjadi sangat penting termasuk pengembangan industri halal, logistik halal, serta jasa-jasa pendukung lainnya. Harmonisasi kebijakan dan regulasi di masing-masing sektor baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah perlu dilakukan agar memiliki arah yang sama serta saling mendukung.

Disamping itu, para pelaku ekonomi syariah khususnya industri keuangan syariah, perlu terus meningkatkan akses dan kualitas layanan produknya yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan berbagai strategi inovatif perlu dilakukan untuk mempercepat inklusivitas keuangan syariah, terutama bagi kelompok masyarakat marginal, yakni petani, nelayan, dan UMKM yang masih relatif terbatas dalam mengakses layanan produk keuangan syariah. Sesuai tujuan utama syariah, pengembangan ekonomi syariah harus selalu berorientasi pada aspek kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengembangan ekonomi syariah harus dirancang dan dilaksanakan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat, ini adalah esensi dari *Maqoshid Syariah* yang tidak boleh kita lupakan. Melalui strategi dan kebijakan yang tepat, ekonomi syariah diyakini mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Terakhir, kegiatan rapat pleno ini dibuka oleh Bapak Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin dan dihadiri oleh Menteri Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Deputi Senior BI, Ketua DK OJK, Kadin dan K/L anggota KNEKS serta 31 anggota KDEKS seluruh Indonesia, yang diselenggarakan di Kantor Setwapres, Jumat 4 Oktober 2024.

4.1.3 Keuangan Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Produk Pesantren

Gambar 49. Seminar Nasional Keuangan Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Desa Berbasis Pesantren



Program peningkatan inklusi keuangan terus didorong oleh DNKI, salah satunya melalui program Seminar Nasional Keuangan Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Desa Berbasis Pesantren yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Gedongan Cirebon dalam rangka Haul ke-97 Pondok Pesantren Gedongan Cirebon. Tujuan acara ini adalah meningkatkan inklusi dan literasi keuangan dengan menekan gap antara literasi dan inklusi keuangan syariah tersebut, serta mendorong pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren.

Dalam acara seminar nasional ini terdapat beberapa program yang ditawarkan sebagai solusi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi desa berbasis pesantren oleh mitra-mitra DNKI seperti pembiayaan industri halal, pelatihan UMKM, asuransi, sertifikasi halal, KUR syariah, dan Santripreneur. Acara ini dihadiri oleh 300 santri pondok pesantren Gedongan Cirebon, elemen pondok pesantren Gedongan Cirebon serta, Kepala Desa setempat. Diharapkan dengan diadakannya acara seminar nasional ini dapat meningkatkan literasi keuangan syariah pada lingkungan pesantren dan meningkatkan kontribusi pondok pesantren dalam pemberdayaan ekonomi desa serta memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam mengembangkan lembaga ekonomi pesantren.

4.1.4 FGD Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi UMKM Nahdlatul Ulama di Purwakarta

Gambar 50. FGD Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi UMKM Nahdlatul Ulama

Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan dalam rangka merayakan Harlah (Hari Lahir) ke-101 Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk membahas strategi penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Purwakarta. Kegiatan ini merupakan sinergi antara Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan Nahdlatul Ulama (NU) khususnya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Purwakarta. Pada kesempatan ini, Sekretariat DNKI bekerjasama dengan para mitra untuk mengidentifikasi potensi UMKM di Purwakarta yang dapat dikembangkan melalui akses pendanaan, pelatihan, dan pemasaran yang lebih baik.

Penguatan ekonomi melalui UMKM juga sejalan dengan program pemberdayaan pondok pesantren yang dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menghasilkan strategi konkret untuk mengembangkan UMKM di Purwakarta, termasuk langkah-langkah seperti pemberian pelatihan, akses pendanaan, pemasaran, serta keterlibatan aktif para mitra strategis. Dengan demikian, perayaan Harlah NU yang ke-101 tidak hanya menjadi momen peringatan, tetapi juga momentum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di Purwakarta ke arah yang lebih baik.

4.1.5 Seminar Nasional Keuangan Inklusif dan Pemberdayaan Ekonomi bagi UMK dan Koperasi Binaan Muhammadiyah

Gambar 51. Seminar Nasional Keuangan Inklusif dan Pemberdayaan Ekonomi



Kegiatan ini dapat terselenggara dari hasil sinergi dan kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Lembaga Pengembang Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, dengan didukung oleh mitra S-DNKI.

Acara yang terselenggara di Kampus IBM ini dihadiri oleh 200 UMKM Binaan, di mana keberlanjutan UMKM sangat penting dalam menopang ketahanan perekonomian nasional, supaya usaha yang kita miliki dapat berkembang diniatkan dengan semangat. Pegiat UMKM Binaan Muhammadiyah diharapkan agar terus membranding produk-produk unggulannya dan menangkap peluang-peluang untuk kepastian pemasarannya. Di samping itu, peserta yang terdiri dari pelaku UMKM Perempuan juga mesti setidaknya memiliki dua waktu yaitu mengurus rumah tangga dan bisnis.

4.1.6 Penyusunan Kebijakan Eksistensi Lembaga Ekonomi Pondok Pesantren untuk Meningkatkan Keuangan Inklusif Masyarakat

Gambar 52. Penyusunan Kebijakan Eksistensi Lembaga Ekonomi Pondok Pesantren



Guna mendukung terwujudnya kebijakan berbasis riset, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional telah menyelesaikan naskah kebijakan "Eksistensi Lembaga Ekonomi Pondok Pesantren untuk Meningkatkan Keuangan Inklusif Masyarakat" pada tanggal 4 Maret 2024. Naskah kebijakan ini merupakan bentuk peran aktif BRIN dalam menghimpun dan menganalisis data serta informasi terkini untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan efisien khususnya untuk meningkatkan inklusi keuangan Masyarakat. Salah satu platform potensial untuk mempercepat peningkatan indeks inklusi keuangan adalah melalui kelembagaan ekonomi di Pondok Pesantren.

Berdasarkan kajian tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh lembaga ekonomi Pondok Pesantren antara lain mulai dari rendahnya semangat kewirausahaan di masyarakat sekitar, hingga minimnya dukungan kebijakan dan infrastruktur pendukung

dari berbagai instansi terkait. Namun demikian, di tengah tantangan tersebut, terbuka juga peluang besar untuk bersama-sama menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan seperti pelatihan teknis manajemen kewirausahaan, mendorong pembentukan Lembaga ekonomi di setiap pondok pesantren dan mendorong keterlibatan offtaker termasuk alumni santri untuk reorientasi kapasitas produksi dengan target pasar yang menjangkau masyarakat sekitar.

4.1.7 Seminar Nasional Keuangan Inklusif bagi UMKM, Perempuan, Pemuda dan Warga Muhammadiyah

Gambar 53. Seminar Nasional Keuangan Inklusif



Seminar Nasional Keuangan Inklusif tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2024 dan bertujuan untuk mendiskusikan strategi dan solusi dalam meningkatkan akses keuangan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perempuan, dan pemuda yang tergabung dalam wadah organisasi Muhammadiyah. Acara ini menegaskan komitmen dalam mendukung inklusi

keuangan bagi segmen-segmen prioritas yakni UMKM, perempuan, dan pemuda. Selain itu, acara ini juga membahas mengenai tantangan dan peluang dalam pemberdayaan UMKM, perempuan, dan pemuda dalam mengakses layanan keuangan syariah yang dihadiri oleh pelaku usaha, akademisi, serta perwakilan pemerintah yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

4.1.8 Seminar Nasional "Bersama Ekonomi Syariah Memajukan UMKM"

Gambar 54. Seminar Nasional Keuangan Inklusif bagi UMKM



Seminar Nasional "Bersama Ekonomi Syariah Memajukan UMKM" diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur pada 27 Maret 2024. Dengan pendekatan ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan, kegiatan ini bertujuan membuka wawasan dan membangun sinergi antara pelaku UMKM, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah memberikan pemahaman pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik ekonomi syariah, mendorong integrasi prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan UMKM, Menyediakan forum

diskusi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan akademisi serta Memperluas jaringan bisnis dan peluang kolaborasi.

Kegiatan ini adalah bentuk kolaborasi bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Universitas Mulawarman dan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FosSEI). Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta, terdiri dari, civitas akademika, pelaku UMKM, Lembaga keuangan syariah, dinas koperasi dan UMKM serta komunitas ekonomi syariah dan mitra usaha local. Adapun seminar Nasional ini telah berhasil memberikan kontribusi positif dalam pengembangan UMKM berbasis ekonomi syariah.

4.1.9 Ngabuburit Halal LifeStyle dan Penyerahan Program Sosial

Gambar 55. Ngabuburit Halal LifeStyle dan Penyerahan Program Sosial



Dalam rangka mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan 1445 H dengan kegiatan yang bermakna, diselenggarakan acara Ngabuburit Halal *Lifestyle* dan Penyerahan Program Sosial pada tanggal 2 April 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan ini merupakan sinergi antara lembaga keagamaan, komunitas halal *lifestyle*, serta lembaga sosial, yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya

hidup halal dan meningkatkan kepedulian sosial melalui program berbagi kepada yang membutuhkan. Kegiatan yang dihadiri lebih kurang 400 peserta ini bertujuan untuk mensosialisasikan konsep Halal *Lifestyle* sebagai bagian dari gaya hidup sehat, berkah, dan sesuai syariat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberkahan dalam konsumsi dan aktivitas sehari-hari dan menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu, terutama di bulan Ramadan.

4.1.10 Sosialisasi Keuangan Inklusif Goes to Campus

Gambar 56. Sosialisasi Keuangan Inklusif Goes to Campus



Dorong UMKM dan Masyarakat tingkatkan literasi keuangan, Sekretariat DNKI bersama Universitas Muhammadiyah Sukabumi melaksanakan kegiatan sosialisasi keuangan inklusif. Program ini dihadiri lebih dari 200 peserta pelaku UMKM pada tanggal 20 September 2024. Giat ini membantu para UMKM untuk meningkatkan potensi usahanya menjadi

lebih baik hingga ke taraf komersial (naik kelas). Selain pembiayaan, terdapat juga

program penjaminan, pelatihan serta program produktif lainnya seperti agen Laku Pandai, Zakat *microfinance* dan program kemaslahatan.

4.1.11 *Sharia Finance Goes to Campus*: Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung Akselerasi Keuangan Inklusif bagi Pemuda, Perempuan dan Pelaku UMKM

Gambar 57. *Sharia Finance Goes to Campus*



Keuangan syariah memainkan peran penting sebagai alternatif yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peran keuangan syariah, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Karanganyar dan Mitra SDNKI menyelenggarakan *Sharia Finance Goes to Campus* pada tanggal 22 Mei 2024. Acara ini dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri mahasiswa, dosen, pelaku UMKM, serta stakeholder terkait, dengan harapan dapat membuka wawasan baru dan mendorong akselerasi keuangan inklusif di Solo Raya. Agenda ini bertujuan untuk menyebarluaskan pentingnya inklusi keuangan, terutama bagi pemuda, perempuan, dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari sistem keuangan tradisional, mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah dalam mengembangkan usaha mereka serta mengidentifikasi potensi sektor keuangan syariah dalam mendukung akselerasi ekonomi di daerah, khususnya di wilayah Klaten, Jawa Tengah.

Mei 2024. Acara ini dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri mahasiswa, dosen, pelaku UMKM, serta stakeholder terkait, dengan harapan dapat membuka wawasan baru dan mendorong akselerasi keuangan inklusif di Solo Raya. Agenda ini bertujuan untuk menyebarluaskan pentingnya inklusi keuangan, terutama bagi pemuda, perempuan, dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari sistem keuangan tradisional, mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah dalam mengembangkan usaha mereka serta mengidentifikasi potensi sektor keuangan syariah dalam mendukung akselerasi ekonomi di daerah, khususnya di wilayah Klaten, Jawa Tengah.

4.1.12 Dialog Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia Melalui *Halal Values Chain Project* Bersama Badan Ekonomi Syariah Kadin

Gambar 58. *Dialog Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Syariah*



Dialog ini berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melalui proyek *Halal Values Chain*, bekerja sama dengan Badan Ekonomi Syariah (BES) Kadin yang diselenggarakan pada 4 Juni 2024 dihadiri 200 peserta yang terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Badan Standarisasi Nasional, Pelaku Industri Halal, Akademisi, Peneliti, Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah serta media. Acara ini merupakan

bagian dari upaya untuk memperkuat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam sektor *Halal Value Chain* yang melibatkan industri halal secara holistik. Melalui dialog ini, berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat luas diharapkan dapat bekerja sama dalam memperkuat

value chain halal yang mencakup mulai dari produk, distribusi, hingga konsumsi berbasis syariah. Tujuan akhirnya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan industri halal global.

Sebagai bagian dari acara ini, BES KADIN juga memberikan penghargaan kepada beberapa perusahaan yang telah sukses mengimplementasikan prinsip halal dalam seluruh rantai nilai produksi mereka. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengusaha lainnya untuk lebih serius mengembangkan produk halal di Indonesia. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara beberapa pihak terkait untuk mendukung pengembangan *Halal Value Chain Project*. Kerjasama ini mencakup pengembangan pelatihan untuk pelaku UMKM di sektor halal, serta peningkatan akses pasar untuk produk halal Indonesia, baik di tingkat domestik maupun global.

4.1.13 FGD Penyusunan Kerangka *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI 2025-2029)

Gambar 59. FGD Penyusunan Kerangka *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI 2025-2029)



Kegiatan yang dilaksanakan pada 25 Juni 2024 ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam periode lima tahun mendatang (2025-2029). Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan lembaga keuangan syariah sebanyak 100 peserta,

untuk memberikan masukan dan perspektif dalam merancang master plan yang komprehensif.

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) dirancang sebagai pedoman utama bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, dengan fokus pada sektor-sektor utama seperti keuangan syariah, industri halal, pariwisata syariah, dan infrastruktur. Kegiatan ini berhasil menghasilkan beberapa rekomendasi dan langkah strategis untuk pengembangan *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI 2025-2029), antara lain: Strategi Penguatan Sektor Keuangan Syariah termasuk perumusan kebijakan yang mendukung peningkatan akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM, pengembangan Industri Halal dalam menyusun langkah-langkah untuk memperkuat kualitas dan daya saing produk halal Indonesia di pasar domestik dan internasional, serta kolaborasi multi-pihak dalam menjalin kerjasama antara pemerintah.

4.1.14 Seminar Nasional Keuangan Inklusif bagi Pemuda dan Pelaku UMKM

Gambar 60. Seminar Nasional Keuangan Inklusif



Seminar ini merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku UMKM, tentang pentingnya memiliki literasi keuangan yang memadai dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2024. Seminar ini juga berfokus pada pemberdayaan kedua kelompok tersebut

melalui akses keuangan yang lebih mudah, pendampingan usaha, dan pengenalan pada layanan keuangan berbasis teknologi. Acara seminar ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta, yang terdiri dari berbagai latar belakang, antara lain Asda Perekonomian Jawa Tengah, Mitra S-DNKI serta Civitas Akademika Universitas Wahid Hasyim Semarang. Seminar ini berhasil memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta, di antaranya: Pemahaman terkait literasi keuangan, terjalin hubungan yang lebih erat antara akademisi, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM, yang akan memberikan dampak positif dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan di Indonesia.

4.1.15 Launching Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah

Gambar 61. Launching Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah



Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis riset kebijakan yang kuat, INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*) meluncurkan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah (PPES) pada tanggal 3 September 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen INDEF dalam mendukung

agenda nasional menuju Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Program PPES ini bertujuan untuk membangun jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang ekonomi syariah, menyampaikan arah dan program strategis pusat pengembangan kepada publik serta mendorong dialog kebijakan dan riset terkait ekonomi syariah di Indonesia.

4.1.16 FGD "Membangun Ekosistem Gerakan Ekonomi Berkemajuan dan Inklusif"

Gambar 62. FGD "Membangun Ekosistem Gerakan Ekonomi Berkemajuan dan Inklusif"



Sekretariat DNKI kolaborasi bersama Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah bermaksud memperkuat sinergi antar pelaku ekonomi umat serta mendorong lahirnya inisiatif kolektif dalam mewujudkan Gerakan Ekonomi Berkemajuan dan Inklusif yang berbasis nilai-nilai Islam dan semangat kemandirian.

Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan akses terhadap sumber daya ekonomi, termasuk bagi penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan. Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi, maka kemakmuran dapat dinikmati secara lebih merata. Acara ini dilaksanakan pada 21 November 2024 dan dihadiri 100 peserta terdiri dari berbagai Pimpinan Wilayah, Pelaku UMKM maupun koperasi, Praktisi bisnis serta perwakilan Lembaga pemerintah, BUMN serta mitra strategis lainnya.

4.1.17 Edukasi Literasi Keuangan Syariah dalam rangkaian kegiatan Festival Koperasi Pesantren Nusantara

Gambar 63. Edukasi Literasi Keuangan Syariah



Kemenko Bidang Perekonomian bersama Kementerian Koperasi dan UMKM serta pengurus Induk Koperasi Pesantren (Inkopontren) pada tanggal 12 Desember 2024 telah melaksanakan kegiatan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah kepada 150 anggota Inkopontren serta mengadakan launching dapur makan bergizi di Ponpes

Karya Pembangunan Jakarta Timur yang dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri Koperasi, Kemenag, DEKS BI, BPKH serta mitra strategis S-DNKI. Festival ini diharapkan menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi pesantren yang berdaya saing dan berkelanjutan

4.1.18 Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI)

Ekonomi dan keuangan syariah sangat tergantung pada tingginya minat masyarakat dalam menggunakan maupun mengakses produk dan jasa yang dihasilkan. Saat ini ekonomi dan keuangan syariah telah menunjukkan perkembangan yang baik dan memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Namun demikian, masih terdapat ruang yang sangat luas bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar dapat berkiprah lebih signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu area yang sangat penting untuk dikembangkan dalam mendorong pertumbuhan supply dan demand di sektor ini adalah peningkatan kualitas literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Supply untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah harus ditingkatkan untuk memenuhi demand Masyarakat dan pasar, yaitu melalui pengembangan industry halal, industri keuangan syariah, dan keuangan sosial syariah. Selain itu, infrastruktur ekosistem syariah perlu diperkuat sebagai fondasi utama berjalannya supply-demand linkage.

Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) adalah inisiatif Pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi syariah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. SNLIEKSI bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam konteks syariah, dengan fokus pada produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun target program SNLIEKSI mencakup berbagai segmen masyarakat baik dari sisi konsumen maupun produsen serta berbagai lapisan masyarakat dari tingkatan korporasi sampai kepada individu. SNLIEKSI dilaunching pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam rangkaian kegiatan ISEF.

05

PENUTUP

Halaman ini sengaja dikosongkan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada capaian kinerja tahun 2024 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SNKI dari masing-masing Pokja, yaitu: Pokja Edukasi Keuangan, Pokja Hak Properti Masyarakat, Pokja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Pokja Perlindungan Konsumen, Pokja Kebijakan dan Regulasi, dan Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan 5.954 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 16,9 juta penerima manfaat, baik secara daring maupun luring. Upaya ini dilakukan untuk terus menekan kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia yang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 26,1 persen.
2. Program Hak Properti Masyarakat menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dengan realisasi sertifikasi 10,6 juta bidang tanah, melampaui target sebesar 5 juta bidang atau mencapai 211 persen dari target. Selain itu, cakupan bidang tanah yang telah terdaftar mencapai 96,13 persen secara akumulatif.
3. Digitalisasi keuangan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat sepanjang tahun 2024. Hal ini tercermin dari capaian jumlah rekening uang elektronik baru hingga November 2024 yang mencapai 36,12 juta, jauh melampaui target awal sebesar 2,38 juta rekening. Implementasi QRIS juga mengalami pertumbuhan signifikan dengan 55,43 juta pengguna dan volume transaksi sebesar 6,24 miliar, melebihi target awal sebesar 2,5 miliar transaksi. Di sisi lain, perluasan akses layanan keuangan turut diperkuat melalui program Laku Pandai yang kini telah memiliki 1,6 juta agen, serta dukungan kelembagaan dari terbentuknya TPAKD secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia.
4. Program pelayanan keuangan pada sektor pemerintah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha ultra mikro dan mikro, petani, dan nelayan, melalui berbagai program elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah, penyaluran pembiayaan bagi UMKM, program asuransi bagi usaha pertanian dan peternakan, perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan daerah dan pembayaran di sektor pemerintah.
5. Tingkat penyelesaian pengaduan konsumen sektor jasa keuangan mencapai 90,3 persen. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) juga telah menangani dan menyelesaikan seluruh dari 2.695 sengketa yang diterima. Pelindungan konsumen terus diperkuat untuk membangun sistem yang andal, memberdayakan konsumen, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya aspek pelindungan konsumen.
6. Dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pemerintah, otoritas dan regulator telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terkait Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial dan Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. Selanjutnya, untuk akselerasi program KEJAR SDNKI telah menerbitkan Kep. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan No. 2/2024 tentang Satgas Nasional Akselerasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar.

7. Sebagai dukungan infrastruktur dan teknologi informasi untuk inklusi keuangan di pedesaan dan daerah 3T telah dilakukan pembangunan Satelit Multifungsi Satria dan pengembangan Infrastruktur *Fast Payment* serta pembangunan *Base Transceiver Station (BTS)* di 6.747 titik lokasi.
8. Sekretariat DNKI telah menjalankan peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, memberikan arah kebijakan teknis, memantau kemajuan, fasilitasi program lintas wilayah, kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan serta memastikan integrasi dan konsistensi pelaksanaan SNKI secara menyeluruh dan berkelanjutan.
9. Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran strategis dan sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga. Melalui kebijakan yang harmonis, dukungan regulasi yang progresif, serta program-program lintas sektor, pemerintah berhasil menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan industri keuangan syariah. Kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, OJK, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), telah mendorong integrasi kebijakan, percepatan literasi keuangan, inklusi keuangan dan inovasi layanan syariah. Ke depan, keberlanjutan dan daya saing keuangan syariah akan sangat bergantung pada komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan ekonomi syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

5.2 Rekomendasi

1. Tingkat inklusi dan literasi keuangan secara umum berdasarkan SNLIK 2024 mengalami peningkatan, namun demikian perlu perhatian yang besar pada beberapa kelompok sasaran antara lain komunitas difabel, PMI, dan masyarakat pedesaan masih relatif tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan intensifikasi penyelenggaran edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran dimaksud.
2. Inklusi keuangan di desa saat ini belum optimal sehingga diperlukan inisiatif dan program yang secara spesifik menasarkan kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal dan berbasis pada pemanfaatan potensi lahan yang tersedia.
3. Dewan Nasional Keuangan Inklusif bersama dengan seluruh stakeholder terkait perlu melakukan pendampingan kepada TPAKD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang meliputi aspek edukasi maupun literasi seperti kegiatan sosialisasi bagi kelompok masyarakat segmen prioritas, pemberdayaan melalui sertifikasi, pengembangan pembayaran nontunai (*cashless*), pemanfaatan agen (*branchless*) pada komunitas, penguatan regulasi terkait literasi dan inklusi

keuangan daerah serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, DNKI dirasa perlu melakukan kajian terkait pengusulan pemberian Dana Insentif Fiskal (DIF) kepada TPAKD dengan kinerja terbaik.

4. Perlu pengembangan mekanisme elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah yang lebih integratif dan berbasis data lintas sektor untuk memastikan kualitas penyaluran dan efektivitas program. Selain itu, perluasan digitalisasi transaksi di berbagai sektor pelayanan publik harus diarahkan tidak hanya untuk mempermudah pembayaran dan penerimaan, tetapi juga untuk membangun ekosistem layanan publik yang terhubung dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Dengan masih adanya kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, serta pengembangan inovasi produk dan layanan keuangan yang semakin pesat dan kompleks, diperlukan penguatan kerjasama lintas sektor dan daerah serta melibatkan aparat penegak hukum untuk pemberantasan aktivitas keuangan illegal. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada layanan sektor keuangan.
6. Untuk akseleerasi tingkat literasi keuangan yang masih rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan, diperlukan adanya penguatan struktur DNKI menjadi Komnas LIK sebagaimana amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang diwujudkan melalui penyusunan RPP Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK). Penguatan dimaksud tidak hanya mencakup aspek kelembagaannya saja, namun juga secara penguatan sinergi kelembagaan antara pusat dan daerah, penambahan fokus komite nasional untuk meningkatkan literasi keuangan, digitalisasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
7. Mengingat masih rendahnya ketercapaian jangkauan jaringan internet pada rumah tangga di Indonesia sebesar 20,86 persen. Diperlukan adanya upaya peningkatan layanan keuangan berbasis jaringan internet pada rumah tangga, perlu perluasan akses *fixed broadband*.
8. Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, Sekretariat DNKI perlu mendorong pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi arah kebijakan serta program kerja masing-masing Pokja kepada TPAKD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, diperlukan penajaman rencana aksi dalam pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, khususnya untuk memastikan intervensi yang lebih terarah dan berdampak bagi kelompok sasaran seperti perempuan, pelaku UMKM, dan masyarakat rentan lainnya.
9. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan yakni pertama, perlu diperluasnya program literasi keuangan syariah yang terintegrasi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta melalui pelatihan bagi masyarakat umum. Kedua, perlunya penguatan *platform* digital, *mobile* aplikasi dan media sosial untuk menyebarkan syiar edukasi keuangan syariah secara lebih luas dan interaktif guna menyasar bagi generasi muda dan Masyarakat di daerah terpencil. Ketiga,

Pemerintah dan Lembaga terkait perlu terus menyempurnakan regulasi yang mendukung inovasi dan ekspansi produk keuangan syariah, sekaligus memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program inklusi dan literasi keuangan syariah guna mengidentifikasi kendala serta peluang perbaikan, sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat.

LAMPIRAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran 1. Realisasi Program Kerja Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2024

Tabel Lampiran 1.1 Realisasi Program Kerja Kelompok Kerja Edukasi Keuangan

Program Kerja	Realisasi
Edukasi penggunaan instrumen pembayaran digital (digital payment) guna mendorong inklusi keuangan, a.l mendorong edukasi penggunaan QRIS, penggunaan instrumen pembayaran non tunai serta perlindungan konsumen	<p>Realisasi kegiatan sebanyak 669 dengan jumlah peserta 945.023 baik secara fisik dan virtual melalui media sosial (termasuk <i>flagship</i> di KPwDN). Sasaran penerima edukasi a.l: masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, pelaku UMKM, komunitas, netizen, dll, dengan narasumber beragam dari BI, K/L, PJP, UMKM, dll. Kegiatan yang dilakukan a.l:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Festival Edukasi Bank Indonesia (FEKDI) 2. Festival Edukasi Bank Indonesia (FesKaBI), BI Netifest & BI Ngobrol Bareng Komunitas (BINGO) dilakukan di 3 kota/tahun, dihadiri oleh penerima beasiswa BI, jumlah peserta sekitar 2.000 org/kegiatan). 3. Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI), dengan jumlah peserta ±20ribu orang 4. Partisipasi Edukasi Publik/Sosialisasi/FGD/Seminar di Kantor Pusat dan KPwDN 5. Flagship Event di KPwDN 6. Peningkatan keberdayaan konsumen & masyarakat 7. Publikasi melalui Media Massa, <i>Digital Out Of Home</i> (DOOH), Media Sosial, Website, Email, WAG (Total followers medsos BI ±1.573K)
Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan (Konvensional dan Syariah) (PUJK)	Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2024, OJK telah menyelenggarakan kegiatan Edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebanyak 5.443 kegiatan (termasuk 1.351 kegiatan syariah dan konvensional sekaligus syariah) yang menjangkau 7.306.532 peserta (termasuk 4.997.269 peserta kegiatan edukasi syariah) yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, <i>workshop</i> , <i>training of community</i> , <i>training of trainers</i> , konsultansi, pendampingan dan <i>training of facilitator</i> .

Program Kerja	Realisasi
Edukasi Online melalui LMSKu	<p>Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, user LMSKu telah mencapai 79.376 pengguna dengan jumlah akses modul sebanyak 102.901 kali akses dan 82.253 Sertifikat Kelulusan Modul telah diterbitkan.</p> <p>Selama Triwulan IV tahun 2024 Sikapi Uangmu telah mempublikasikan konten edukasi terkait produk dan layanan jasa keuangan sebanyak 433 konten dengan capaian jumlah pengunjung sebanyak 1.754.287 pengunjung/viewers.</p>
Implementasi Edukasi dan ToT Keuangan Syariah	Telah terlaksana kegiatan pada 212 Kota/Kabupaten
Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022	OJK telah melaksanakan Persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, untuk mengukur indeks literasi 2024
Bulan Inklusi Keuangan (dilaksanakan pada Oktober 2024)	<p>Selama periode BIK 2024, telah diselenggarakan 6.137 kegiatan atau meningkat sebanyak 3.286 kegiatan dibanding BIK 2023 dengan total peserta 6.478.027 atau meningkat 4.636.670 peserta dibanding BIK 2023. Dari jumlah kegiatan tersebut, sebanyak 660 kegiatan dilakukan oleh Kantor OJK di daerah (KOJK) bekerja sama dengan stakeholders terkait. Adapun rincian capaian BIK 2024 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Perbankan: pembukaan 3.547.861 rekening; 2. Industri Pasar Modal: pembukaan 156.537 rekening efek; 3. Industri Perasuransian: pembukaan 745.218 polis; 4. Industri Pembiayaan: penyaluran pembiayaan kepada 764.201 debitur; 5. Industri Pergadaian: pembukaan 3.438.854 rekening; dan 6. Industri fintech: pembukaan 856.857 akun.
Program GENCARKAN oleh PUJK Tahun 2024 (Agustus-Desember 2024)	Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang dilaksanakan oleh PUJK. Pada periode Agustus-Desember 2024 telah dilakukan 7.405 kegiatan Edukasi Langsung yang menjangkau 1.032.469

Program Kerja	Realisasi
	peserta, dan 6.206 kegiatan Edukasi Digital yang menjangkau 123.418.241 peserta
Penyusunan Dokumen RPJMN 2025-2029 dan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan dalam Dokumen RPJPN RPJPD 2025-2045	Selama tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun dokumen RPJMN 2025-2029 yang memuat arah kebijakan dan indikator Inklusi Keuangan. Selain itu, telah selesai dilakukan penyelarasan visi misi, arah kebijakan, dan indikator inklusi keuangan hingga level daerah di seluruh provinsi
Edukasi Keuangan pada Orientasi Pra Pemberangkatan dan Pelatihan Kewirausahaan	Selama tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan Edukasi Keuangan pada Orientasi Pra Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia kepada 297.433 pekerja migran. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan Edukasi Keuangan pada Pelatihan Kewirausahaan untuk Pekerja Migran Indonesia kepada 2080 peserta
Pelatihan pada BUMDES	Selama tahun 2024, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah melakukan Pelatihan BUMDES melalui Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada 280 peserta serta memberikan Pelatihan Mandiri Penyusunan Laporan Keuangan kepada sebanyak 1942 peserta
Edukasi Pengelolaan Keuangan Keluarga	Selama tahun 2024, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN telah melaksanakan kegiatan edukasi pengelolaan keuangan keluarga dan masyarakat secara <i>hybrid</i> dan dihadiri oleh 300 peserta <i>offline</i> , 5150 peserta <i>online</i> (4.150 youtube dan 1.000 zoom meeting)
Creative Talks "Pojok Literasi Keuangan"	Selama tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melaksanakan 18 Kegiatan Creative Talks Pojok Literasi dengan tema "Literasi Keuangan Digital", "Bijak Memanfaatkan Financial Technology: Jauhi Pinjol", "Transformasi Digital dari UMKM Konvensional ke E-commerce", "Pemilu Sehat untuk Kesejahteraan UMKM dan Masyarakat" melalui Zoom meeting dan Live Youtube Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Program Kerja	Realisasi
Edukasi Keuangan bagi Mahasiswa	<p>Selama tahun 2024, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah melakukan Edukasi Keuangan bagi Mahasiswa melalui beberapa kegiatan, yaitu Seminar Literasi Finansial dengan jumlah 500 peserta, Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM), dan Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) bagi seluruh mahasiswa.</p>
Kegiatan Keuangan Syariah	<p>Selama tahun 2024, telah dilaksanakan beberapa kegiatan keuangan syariah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) <p>Keseluruhan program EPIKS di tahun 2024 menjangkau 6.520 orang peserta dengan total inklusi keuangan syariah sebesar Rp10.985.382.400 yang terdiri dari produk tabungan, tabungan emas, dan reksadana syariah.</p> 2. Syariah Financial Fair (SYAFIF) <p>total pengunjung booth mencapai 13.105 pengunjung atau sekitar 24,5 persen dari total pengunjung FinExpo 2024 yang sebesar 53.463 pengunjung. Selain itu, nominal transaksi di booth SYAFIF 2024 mencapai Rp1.816.988.595,- atau sekitar 19,6 persen dari total transaksi FinExpo 2024 yang sebesar Rp9.254.184.526,-.</p> 3. Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) <p>GERAK Syariah telah berhasil menjangkau 3.057.194 peserta edukasi dan mendorong terciptanya inklusi pada 1.175.019 orang di berbagai wilayah Indonesia. Selain kegiatan edukasi dan inklusi, sejumlah dana sekitar Rp7,24 Miliar telah disalurkan pada 93.768 orang yang terlibat dalam kegiatan sosial.</p>

Tabel Lampiran 1.2 Realisasi Program Kerja Kelompok Kerja Hak Properti Masyarakat

Program Kerja	Realisasi
Pensertifikatan Lahan	Total lahan yang telah disertifikasi selama 2024 sebesar 10.619.071 lahan dengan akumulasi persentase cakupan bidang lahan yang telah bersertifikat mencapai 96,13 persen
Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan fasilitasi pendaftaran selama 2024 sebanyak 598 merk, 3 Desain Industri, dan 1 Hak Cipta; 2. Pelaksanaan FGD di Jawa Barat, Lombok, Kupang 3. Partisipasi klinik KI pada berbagai pameran
Sertifikasi Halal	Registrasi dan penerbitan sertifikat halal selama 2024 sebanyak 691.296 sertifikat
Inklusi Keuangan Untuk Kelompok Subsisten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan replikasi atas model bisnis inklusif yang telah berdampak pada peningkatan kapabilitas produksi, pemasaran, kelembagaan, dan digitalisasi kepada total 28 kelompok sasaran; 2. Program peningkatan akses pembiayaan UMKM dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> • Rasio kredit UMKM terhadap perbankan (RPIM) sebesar 33,55 persen per triwulan IV-2024; • Pemberian award kepada 4 bank pendukung UMKM; • Business matching 180 UMKM kepada 15 lembaga keuangan dengan nilai transaksi mencapai Rp188,2 Miliar (naik sebesar 27 persen YoY); • Pemanfaatan SIAPIK yang telah menjangkau 52.597 hingga Agustus 2024; • Penyelenggaraan Pameran KKI yang telah membukukan capaian omset UMKM sebesar Rp123,1 Miliar (meningkat 35 persen YoY, Business Matching Ekspor sebesar Rp 264,7 Miliar (meningkat 26 persen YoY), Business Matching Pembiayaan sebesar Rp 188,2 Miliar (meningkat 27 persen YoY) dengan jumlah pengunjung mencapai 150 ribu pengunjung on-site dan online;
Pemberdayaan ekonomi syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas pembiayaan yang efektif yang pada akhir triwulan IV-2024 telah berhasil memberdayakan 822 pesantren baru dan 653 pesantren eksisting; 2. Pemberdayaan terhadap usaha non-pesantren dan non-korporasi terhadap 991 pelaku usaha hingga akhir triwulan IV-2024.

Tabel Lampiran 1.3 Realisasi Program Kerja Kelompok Kerja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Program Kerja	Realisasi
Pembukaan Uang Elektronik (UE) berbasis server	Jumlah rekening uang elektronik (UE) terdaftar hingga November 2024 telah mencapai jumlah 36.125.654 rekening. Target peningkatan rekening UE ini ditujukan untuk keperluan transaksi pembayaran dan e-commerce, yang dicerminkan melalui peningkatan target pembukaan rekening baru UE berbasis server per tahun
Implementasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) dengan target pengembangan ekosistem QRIS untuk mendukung transaksi pembayaran non tunai serta mendorong peningkatan inklusi keuangan	<p>Perkembangan implementasi QRIS sampai dengan triwulan IV 2024 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume transaksi QRIS dari Januari hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 6,24 miliar transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp. 659,94 triliun. Hingga 31 Desember 2024, merchant QRIS telah mencapai 35.851.246 dimana 97,07 persen diantaranya merupakan merchant UMKM. Meluasnya ekosistem QRIS tersebut didukung oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) QRIS yang saat ini telah mencapai total 134 PJP, yang terdiri dari 80 PJP Bank (termasuk 10 Bank Syariah dan 26 Bank BPD) dan 54 PJP Non-Bank serta Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) yaitu 4 lembaga <i>switching</i>. Jumlah pengguna QRIS sampai dengan triwulan IV 2024 sebanyak 55,43 juta pengguna serta terdapat 9,65 juta pengguna baru. <p>Perkembangan implementasi QRIS antarnegara hingga triwulan IV 2024 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume transaksi <i>inbound</i> dan <i>outbound</i> QRIS antarnegara Indonesia-Thailand tercatat sebanyak 417.665 transaksi dengan nominal sebesar Rp. 179,57 miliar. Volume transaksi <i>inbound</i> dan <i>outbound</i> QRIS antarnegara Indonesia-Malaysia tercatat sebanyak 1.898.151 transaksi dengan nominal sebesar Rp. 553,26 miliar. Volume transaksi <i>inbound</i> dan <i>outbound</i> QRIS antarnegara Indonesia-Singapura tercatat sebanyak 110.762 transaksi dengan nominal sebesar Rp. 35,00 miliar.

Program Kerja	Realisasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiasi kerjasama terkait QRIS antarnegara sedang dilakukan dengan beberapa negara antara lain Jepang, Korea Selatan, India, UAE, dan Tiongkok.
Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	<p>Sampai dengan bulan Desember 2024, persentase jumlah pelajar yang tercatat telah memiliki rekening adalah sebesar 87,19 persen atau 58,12 juta pelajar dengan nominal Rp. 35,30 triliun. Rekening pelajar tersebut terdiri dari rekening Simpanan Pelajar sebanyak 50.443.189 akun dengan nominal sebesar Rp. 10,53 triliun. Sedangkan untuk rekening Tabungan Anak telah mencapai 7.679.086 akun dengan nominal sebesar Rp. 24,76 triliun.</p>
Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	<p>Hingga November 2024, TPAKD telah terbentuk secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia, baik tingkat provinsi/kabupaten/kota.</p>
Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI)	<p>Sampai dengan Desember 2024, telah diselenggarakan 414 kegiatan sosialisasi/edukasi serta pelatihan/pendampingan dengan jangkauan peserta sebanyak 27.758 orang. Beberapa capaian terkait peningkatan inklusi keuangan atas pelaksanaan Program EKI di 45 desa, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembukaan rekening tabungan (reguler, pelajar, emas dan haji) sebanyak 13.533 rekening; Pembukaan rekening (sektor pasar modal) sebanyak 1.185 Rekening; Penyaluran kredit/pembiayaan (sektor perbankan dan non-bank) sebanyak 2.896 debitur; Asuransi (termasuk jiwa, kesehatan, dan usaha) sebanyak 3.188 polis Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.567 peserta; Pembukaan Agen Laku Pandai/Agen LJK sebanyak 123 Agen; Perluasan penggunaan QRIS kepada UMKM sebanyak 1.046 pengusaha UMKM. <p>Selain capaian dari sisi aktivasi produk/layanan keuangan, terdapat beberapa capaian pada program EKI lainnya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Program Ruang Pintar, yaitu program penyediaan fasilitas belajar oleh PT

Program Kerja	Realisasi
	<p>Permodalan Nasional Madani (PNM) di Desa Sengkemang (di bawah koordinasi Kantor OJK Provinsi Riau) dan Desa Dolokgede (di bawah koordinasi Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi dan Kantor OJK Provinsi Jawa Timur);</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Pendirian Galeri Investasi yang berlokasi di Desa Sengkemang Provinsi Riau; c) Penghargaan Desa BRIlian kepada Desa Sausu Tambu (di bawah koordinasi KOJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat), Desa Sengkemang, dan Desa Dolokgede; d) Pengembangan Desa Wisata berupa pembangunan homestay yang difasilitasi oleh Bank SulutGo dan pemberian dua kapal untuk wisata mangrove yang difasilitasi oleh TPAKD Kabupaten Minahasa Utara di Desa Darunu (di bawah KOJK Sulutgomalut).
<p>Implementasi Program <i>Product/Business Matching</i> Keuangan Syariah melalui program Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS)</p>	<p>Telah dilakukan implementasi program EPIKS di 26 Pondok Pesantren mencakup Pondok Pesantren di beberapa provinsi mencakup: Madrasah Aliyah Ulumul Qur'an, Sumatera Utara; Dayah Babul Maghfirah, Banda Aceh; Dayah Babun Najah, Banda Aceh; Dayah Inshafuddin, Banda Aceh; Ponpes Futuhiyyah Mrangen, Jawa Tengah; Ponpes Darul Ihsan, Banda Aceh; Ponpes Al Munawir Asahan, Sumatera Utara; Ponpes Al-Wafa, Palangkaraya; Ponpes At-Tanwir Kota Metro, Lampung; Ponpes Aulia Cendikia, Sumatera Selatan; Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jawa Timur; Ponpes Hidayatullah, Kalimantan Tengah; Ponpes Pondok Karya Pembangunan, DKI Jakarta; Ponpes Raudhatul Azhar, Nusa Tenggara Barat; Ponpes Ibadurrahman Langkat, Sumatera Utara; Ponpes Manbaul Ulum Putra, Kalimantan Selatan; Sekolah Putri Darul Istiqomah, Sulawesi Selatan; Yayasan Ponpes Hidayatullah, Kalimantan Timur; Ponpes Darul Fikri, Kalimantan Barat; Ponpes Darul Ulum Peterongan, Jawa Timur; Ponpes Ar-Risalah Ciamis, Jawa Barat; Ponpes Cijantung, Jawa Barat, Ponpes Al-Hasan, Jawa Barat; Ponpes Petir, Jawa Barat; Ponpes Darussalam, Jawa Barat; Ponpes Miftahul Huda, Jawa Barat.</p>

Program Kerja	Realisasi
Product Matching mendorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan	<p>Telah dilaksanakan kegiatan <i>product matching</i> mencakup 77,80 persen TPAKD atau 375 Kabupaten/Kota dari target 2024 yang telah ditetapkan sebesar 75 persen TPAKD (362 dari 482 Kabupaten/Kota).</p>
Peningkatan Implementasi Coresystem LKM/LKMS	<p>Telah dilaksanakan pelatihan implementasi <i>core system</i> secara <i>offline</i> terhadap 6 LKM sampai dengan 30 Juni 2024 dan 4 LKM sampai dengan 30 Juni 2024 dengan total 10 LKM dan/atau LKMS.</p>
Sinergi Perbankan Syariah dengan Elemen Pemerintah dalam rangka Perluasan Akses Layanan Perbankan Syariah	<p>Telah dilakukan implementasi sinergi perbankan syariah sebanyak 3 (tiga) implementasi sinergi perbankan syariah dengan elemen Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="722 855 1352 1163">a. Implementasi realisasi perjanjiaan kemitraan transaksi Wakalah bi Al Istitsmar SBSN antara Kementerian Keuangan dengan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan pada laporan Bank Muamalat No.191/B/PRD-SRT/VII/2024 tentang Laporan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Kepentingan Bank Sendiri Berupa Transaksi Lelang Wakalah Bi Al - Istitsmar. <li data-bbox="722 1163 1352 1971">b. Implementasi produk wakaf uang termasuk <i>Cash Waqf Linked Deposit</i> (CWLD) oleh Bank BJB Syariah berdasarkan Surat Laporan Realisasi Produk Bank beserta lampiran pendukung pada 18 Oktober 2024 untuk mendukung program Kota Wakaf yang merupakan inisiasi dari Kementerian Agama di Kota Tasikmalaya bersama stakeholders dari elemen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan CWLD. Implementasi CWLD oleh Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) berdasarkan Surat Laporan Realisasi Program CWLD beserta lampiran pendukung beserta lampiran pendukung pada 30 Oktober 2024 untuk mendukung program Kota Wakaf di Kabupaten Siak. BRKS mengeluarkan program CWLD Yayasan BRKS - BRK Syariah - Seri 002 - Pengadaan Gerobak Wakaf UMKM Kabupaten Siak dalam rangka mendukung Program Kota Wakaf yang diinisiasi Kementerian Agama. Implementasi CWLD BRKS di salah satu Kota Wakaf (Kabupaten Siak) bersama

Program Kerja	Realisasi
	stakeholders dari elemen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan CWLD.
Peningkatan jumlah <i>Single Investor Identification</i> (SID)/ Monitoring Jumlah sub Rekening Efek	Jumlah SID sampai dengan Desember 2024 adalah sebesar 14.871.639 dengan peningkatan sebesar 925.756
Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif	Data Laku Pandai hingga periode Desember 2024 adalah sebagai berikut: Jumlah Agen Perorangan sebanyak 1.590.066; Jumlah Agen Badan Usaha (Outlet) sebanyak 19.225; Total Jumlah Agen sebanyak 1.609.291; Jumlah Nasabah BSA sebanyak 16.495.618; Nominal Tabungan BSA sebanyak 1.136.402.679.827; dan Jumlah Bank Pelaksana sebanyak 36.
Penyusunan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (Pedoman SETARA)	Telah dilakukan diseminasi terkait dokumen Pedoman SETARA dan pengisian penilaian mandiri Pedoman SETARA kepada PUSK di bawah pengawasan OJK pada 22 April 2025 secara daring dengan Bank Umum, Perusahaan Efek, Asuransi, Penjaminan, DPLK, Pembiayaan, Modal Ventura, Pergadaian, P2P Lending, Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Khuss, dan BPR dengan total peserta 2.305 PUSK.
Penerbitan SUN Ritel Seri ORI025, SBR013, dan ORI026	<ol data-bbox="690 1327 1352 1852" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="690 1327 1352 1516">Pada Januari 2024, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025 dengan tema "Pilihan Berharga Untuk Penuhi Janji Masa Depan". <li data-bbox="690 1516 1352 1695">DJPPR menerbitkan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013 pada bulan Juni 2024 (masa penawaran 10 Juni s.d. 4 Juli 2024) dengan tema "Pilihan Berharga Untuk Wujudkan Cita Bersama". <li data-bbox="690 1695 1352 1852">Pada 30 September s.d. 24 Oktober 2024, DJPPR menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI026 dengan tema "Pilihan Berharga Untuk Sejahtera Bersama".

Program Kerja	Realisasi
Penerbitan SBSN Ritel Seri SR020, ST012, SR021, dan ST013	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada Maret 2024, DJPPR menerbitkan Sukuk Ritel seri SR020 dengan tema "Pilihan Berharga Untuk Masa Depan Sejahtera". b. Pada Mei 2024, bertepatan dengan masa penawaran Sukuk Tabungan seri ST012 dengan tema "Pilihan Berharga Untuk Masa Depan Sejahtera, Bersama Lestarikan Bumi Kita". c. Pada Agustus 2024, DJPPR menerbitkan Sukuk Ritel seri SR021 dengan tema "Pilihan Berharga Untuk Masa Depan Sejahtera". d. Pada November 2024, bertepatan dengan masa penawaran Sukuk Tabungan seri ST013 dengan tema "Pilihan Berharga Untuk Masa Depan Sejahtera".
Investor Meeting DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Pemerintah melakukan kegiatan SDG Talks "SDG Talks: <i>Financing the SDGs' Decade of Actions</i> " Pada Mei 2024 di Yogyakarta. Sedangkan pada Agustus dan September 2024, pemerintah melakukan kegiatan SDG Talks "SDG Talks: <i>Financing the SDGs' Decade of Actions</i> ", masing-masing di Aceh dan Bogor. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menarik minat investor yang ada atau calon investor serta masyarakat luas terhadap instrumen utang berkelanjutan Pemerintah Indonesia dan khususnya SDG Bond. Peserta pada kegiatan ini terdiri dari Pemerintah Daerah, akademisi, NGO dan mahasiswa.

Tabel Lampiran 1.4 Realisasi Program Kerja Kelompok Kerja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Program Kerja	Realisasi
Program Keluarga Harapan (PKH)	<p>Realisasi Penyaluran Gabungan Tunai dan Non Tunai: salur Rp28,20 T (98,24 persen dari target nominal) kepada 10,03 juta KPM (100 persen dari target KPM)</p> <p>Realisasi Penyaluran Non Tunai</p> <p>Dari Rp28,20 T yang telah disalurkan, Rp22,09 T (78,32 persen) disalurkan kepada 7,70 juta KPM secara non tunai</p> <p>[Realisasi penyaluran dihitung secara kumulatif menggunakan</p>

Program Kerja	Realisasi
	data per 31 Desember 2024]
Program Sembako	<p>Realisasi penyaluran Gabungan Tunai dan Non Tunai: salur Rp41,98 T (93,04 persen dari target nominal) kepada 18,64 juta KPM (99,14 persen dari target KPM)</p> <p>Realisasi Penyaluran Non Tunai: Dari Rp41,98 T yang telah disalurkan, Rp36, 14 T (86,11 persen) disalurkan kepada 15,05 juta KPM secara non tunai</p> <p>[Realisasi penyaluran dihitung secara kumulatif menggunakan data per 23 Desember 2024]</p>
Subsidi LPG nontunai	Berdasarkan konfirmasi K/L terkait, program Subsidi LPG Nontunai pada 2024 tidak dilaksanakan karena hingga saat ini, penyusunan Rancangan Perpres terkait program dimaksud masih dalam tahap diskusi.
Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Capaian Kusuka sampai dengan Triwulan IV sebesar 155.472 atau 108,55 persen dari target Tahun 2024 sebesar 143.220. Total e-Kusuka yang telah diberikan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP sebanyak 1.703.654
Perluasan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nontunai	Capaian transaksi SIPLah pada triwulan IV tercatat sebesar 1.264.820 transaksi dengan total nominal sebesar Rp 4.696.663.352.489. Dengan demikian, jumlah transaksi BOS Non Tunai sampai dengan triwulan IV 2024 tercatat mencapai 4.133.698 transaksi atau Rp17.100.816.692.431 (146,65 persen dari target 2024).
Kartu Tani	<p>Pada Triwulan IV 2024, telah tercetak sebanyak 5.432.071 kartu (99,10 persen dari target 2024). Dari jumlah tersebut, telah terdistribusi sebanyak 4.403.619 kartu (80,34 persen dari target 2024).</p> <p>Pada Kartu Tani terdapat perubahan mekanisme integrasi sistem informasi pupuk bersubsidi sehingga perlu dilakukan penyesuaian penggunaan mesin EDC menjadi mesin Mobile Point of Sales (MPOS).</p>
KIP Kuliah	Sampai dengan triwulan IV 2024, Kemendikbudristek telah menyalurkan dana bantuan KIP Kuliah sebesar Rp13,4T (98,52 persen) dari target anggaran -revisi Rp 13,6T kepada 1.022.084

Program Kerja	Realisasi
	<p>mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triwulan I: Rp5,07 T (36,30 persen dari target anggaran Rp13,96T) kepada 605.358 mahasiswa - Triwulan II: Rp1,07T (7,73 persen dari target anggaran Rp13,96T) kepada 163.923 mahasiswa. - Triwulan III: Rp2,51T (18,45 persen dari anggaran revisi Rp 13,6T) kepada 5.908 mahasiswa. - Triwulan IV: Rp 4,7T (35,04 persen) dari anggaran revisi Rp 13,6T) kepada 246.895 mahasiswa. <p>Sampai dengan triwulan IV 2024, Kementerian Agama telah menyalurkan dana bantuan KIP Kuliah on going sebesar telah salur sebesar Rp1,19 triliun (119 persen, lebih tinggi dari target Rp1,01 triliun) kepada 113.399 mahasiswa. Dari yang telah disalurkan, sebesar Rp1,013 T diantaranya merupakan KIP Kuliah On-Going 2020-2023 dan Rp183,85 diantaranya merupakan KIP Kuliah 2024 baru.</p>
Program Kartu Prakerja	<p>Sejak awal tahun 2024 sampai triwulan IV tahun 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pendaftar yang gabung gelombang (join batch) mencapai 3.418.326 orang. 2. Dari yang join batch, sejumlah 1.510.968 orang ditetapkan sebagai penerima dalam 9 gelombang. 3. Dari penerima SK, 1.419.298 memanfaatkan bantuan atau menjadi penerima efektif. Jumlah ini 123,5 persen dari target jumlah orang yang ditetapkan dalam DIPA awal tahun 2024. Mereka berasal dari 512 kabupaten/kota (kecuali Tolikara dan Mamberamo Tengah), termasuk perempuan (59 persen), peserta dari daerah tertinggal (1 persen), berpendidikan SD-SMP (14 persen); dan berusia 56-64 (5 persen). Ini menunjukkan Prakerja mampu diakses oleh kelompok rentan/marjinal atau inklusif. 4. Prakerja mendorong inklusi keuangan. 26 persen penerima yang sebelumnya belum memiliki rekening/e-wallet, setelah mengikuti Prakerja menjadi memiliki rekening/e-wallet. Dari 26 persen penerima yang pertama kali membuka rekening, sebanyak 8 persen diantaranya memilih bank dan 92 persen memilih e-wallet. 97 persen Penerima Prakerja puas dengan mekanisme pembayaran insentif melalui rekening/e-wallet. 5. Realisasi anggaran mencapai Rp3,04 triliun atau 61,89 persen dari anggaran 2024. Realisasi ini terdiri dari biaya pelatihan dan insentif senilai Rp2,92 triliun (60,6 persen dari

Program Kerja	Realisasi
	<p>anggaran) dan biaya operasional pendukung senilai Rp170,6 miliar (97,5 persen dari anggaran).</p> <p>Penjelasan atas penurunan Realisasi TW III sebelumnya sebesar 84,3 persen menjadi 61,89 persen di TW IV: realisasi yang menjadi dasar untuk semua satker adalah Realisasi SP2D yang dibayarkan kepada pihak ketiga, sama halnya dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) bahwa dasar realisasi tetap menggunakan SP2D. Namun sisa dana yang tidak digunakan oleh peserta akan dikembalikan lagi ke RKUN sesuai amanat PMK 25/2020.</p>
Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Sektor Transportasi	<p>Pada triwulan IV 2024, terdapat penambahan perluasan elektronifikasi menggunakan Uang Elektronik (UE) chip based pada perparkiran IRTI Monas yang dikelola oleh Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dishub DKI Jakarta. Adapun transaksi UE chip based di sektor transportasi pada triwulan IV 2024 tercatat mencapai 305,74 juta transaksi atau setara dengan Rp2,03 triliun yang didominasi oleh transaksi perparkiran sebesar 22,84 persen, disusul oleh Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebesar 10,55 persen dan Trans Jakarta sebesar 6,57 persen.</p>
Pengembangan Program Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah	<p>Jumlah Pemda yang berada di tahap Digital mencapai 495 Pemda atau sebesar 90,7 persen dari total 546 Pemda (melebihi target yang ditetapkan Satgas P2DD sebesar 85 persen). Sedangkan jumlah Pemda yang berada di tahap Maju mencapai 39 Pemda, tahap Berkembang sebanyak 11 Pemda, dan tahap inisiasi sebanyak 1 Pemda.</p>
Implementasi Elektronifikasi Pembayaran Jalan Tol	<p>Seluruh ruas jalan tol (75 ruas) saat ini telah menerapkan elektronifikasi pembayaran menggunakan UE chip based. Selama triwulan IV 2024, transaksi UE chip based di jalan tol tercatat sebanyak 419,59 juta transaksi atau sebesar Rp9,37 triliun.</p>
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	<p>Realisasi KUR Tahun per 31 Desember 2024 (Tw IV) sebesar Rp282,44 triliun atau sebesar 100,87 persen dari plafon KUR yang telah didistribusikan sebesar Rp280 triliun.</p> <p>Sepanjang Tw IV tahun 2024, KUR telah diberikan kepada 4,95 juta debitur. Secara rinci, Realisasi Penyaluran KUR Tw IV 2024 per skema adalah sebagai berikut: 1) KUR Super Mikro sebesar</p>

Program Kerja	Realisasi
	<p>Rp1,14 triliun, disalurkan kepada 127.266 debitur (0,40 persen dari total penyaluran Tw IV 2024); 2) KUR Mikro sebesar Rp198,02 triliun, disalurkan kepada 4,48 juta debitur (70,11 persen dari total Penyaluran Tw IV 2024); KUR Kecil Rp83,25 triliun, disalurkan kepada 343.506 debitur (29,47 persen dari total Penyaluran Tw IV 2024); dan 4) KUR Penempatan PMI sebesar Rp45,68 miliar, disalurkan kepada 1.763 debitur (0,016 persen dari total Penyaluran Tw IV 2024).</p> <p>Pada Tw IV 2024, mayoritas Penyaluran KUR ada pada sektor produksi dengan persentase sebesar 57,8 persen, sedangkan sektor perdagangan ada pada nilai persentase sebesar 42,2 persen. Sampai dengan 31 Oktober 2024, total debitur baru KUR mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65 persen dari target debitur baru KUR tahun 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur serta capaian debitur KUR Graduasi sebesar mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24 persen dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.</p>
PNM Mekaar	<p>Jumlah nasabah PNM Mekaar pada akhir Triwulan IV Tahun 2024 mencapai 14,398,997 nasabah (92,84 persen dari target 15,50 juta nasabah).</p> <p>Jumlah nasabah PNM Mekaar mengalami penurunan sejak berakhirnya program relaksasi kredit OJK pada akhir Maret 2024 sehingga pemberian permodalan bagi nasabah terdampak pandemi tidak dapat diberlakukan lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, PNM berupaya mengoptimalkan pemberdayaan kelompok nasabah eksisting dengan mengoptimalkan peran Ketua Kelompok dalam kegiatan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), sehingga usaha kelompok nasabah dapat berkesinambungan.</p>
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	<p>Realisasi jumlah debitur UMi per 31 Desember 2024 yang tercata pada SIKP UMi sebanyak 2.220.272 debitur (100,92 persen dari target debitur 2024 yang sebanyak 2.200.000 debitur). Pembiayaan UMi masih menghadapi tantangan dalam mencari penyalur potensial berupa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memiliki Non-Performing Loan (NPL) rendah (dhi. di bawah 5 persen).</p>

Program Kerja	Realisasi
Asuransi Nelayan	Program Asuransi Nelayan ditiadakan pada tahun 2024 karena refocusing anggaran.
Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)	Program APPIK Tahun 2024 ditiadakan karena refocusing anggaran
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	<p>Target AUTP Tahun 2024 seluas 278.806 ha (100,01 persen dari target terbaru 278.806 Ha). Terdapat tambahan anggaran untuk 30.000 ha, sebelumnya target AUTP seluas 248.806 ha.</p> <p>Realisasi bantuan premi AUTP Triwulan IV sebesar Rp. 40.148.064.000 untuk luas lahan sawah seluas 278.832,47 ha.</p> <p>Program AUTP masih menghadapi tantangan, yaitu masih rendahnya pemahaman petani terkait program dan kesadaran membayar premi.</p>
Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)	Target AUTSK pada awal tahun 2024 sebanyak 150 ribu ekor namun dalam rangka dukungan terhadap Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Padi dan Jagung maka anggaran AUTS/K mengalami refocusing sehingga pada tahun 2024 tidak dilaksanakan.

Tabel Lampiran 1.5 Realisasi Program Kerja Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen

Program Kerja	Realisasi
Penyelesaian pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan	Sebanyak 96,2 persen pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan telah terselesaikan pada TW IV 2024.
Implementasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)	<p>Tingkat penanganan penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan melalui APPK adalah sebesar 90,3 persen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengaduan yang tercatat pada APPK selama 2024 = 34.378 • Jumlah pengaduan yang selesai pada APPK selama 2024 = 31.340

Program Kerja	Realisasi
Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	LAPS SJK telah menerima 2.695 sengketa seluruh sengketa telah terselesaikan dengan persentase keberhasilan 100 persen yang mana telah melampaui target 60 persen.
Sosialisasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi POJK Nomor 22 tahun 2023 di 10 Kota • Sosialisasi tentang APPK di 8 Kota • Sosialisasi tentang LAPS di 1 Kota • Sosialisasi Waspada Investasi dan Pinjaman Online Illegal Pada Kick Off Bulan Inklusi Keuangan • Sosialisasi Indonesia Anti-Scam Centre kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan • Podcast OJK Bisa Bincang Santai " alert! investasi cepat kaya cuma mitos" • Sosialisasi virtual Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal
Intensifikasi pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (market conduct) berbasis risiko secara tematik terkait penyampaian informasi mengenai produk layanan jasa keuangan kepada masyarakat (iklan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan I: Telah dilaksanakan 1 (satu) kali pengawasan terkait Pelindungan Konsumen di salah satu Penyelenggara Uang Elektronik; 2. Triwulan II: Telah dilaksanakan 1 (satu) kali pengawasan terkait Pelindungan Konsumen di salah satu Penyelenggara Uang Elektronik; 3. Triwulan III: Telah dilaksanakan 1 (satu) kali pengawasan terkait Pelindungan Konsumen di salah satu Penyelenggara Uang Elektronik.; 4. Triwulan III: Telah dilaksanakan 2 (dua) kali pengawasan terkait Pelindungan Konsumen di salah satu Penyelenggara Uang Elektronik dan Bank Nasional.

Program Kerja	Realisasi
Penyusunan pengaturan dan kebijakan perlindungan konsumen yang sejalan dengan kebijakan perlindungan konsumen nasional dan mempertimbangkan <i>international best practices</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia terkait Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sistem Keuangan (LAPS-SK) melalui PBI No. 3 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024, serta diundangkan tanggal 14 Mei 2024 LN No. 12/BI TLN No. 80/BI. 2) Pilot Project pengawasan perilaku penyelenggara melalui penerapan media intelligence. 3) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan LAPS-SK bersama dengan OJK. 4) Telah diterbitkan peraturan internal terkait Pedoman Pelaksanaan Edukasi dan Penanganan Pengaduan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. 5) Telah diterbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 18 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan pada 26 November 2024. 6) Berkoordinasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk membentuk task force penanganan <i>fraud</i>, dengan output: a). <i>pilot project money trail</i>; dan b). penerbitan Ketentuan ASPI No. ASPI/K-II/003/X/2024 tentang Penanganan Transaksi Transfer Dana Antar Penyelenggara Sistem Pembayaran Terhadap Rekening/Akun Pengguna Jasa yang Terindikasi <i>Fraud</i>

Tabel Lampiran 1.6 Realisasi Program Kerja Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi

Program Kerja	Realisasi
Penyusunan regulasi di Bank Indonesia yang mendukung keuangan inklusif antara lain perlindungan konsumen, sistem pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PADG Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas PADG Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. 2. PBI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. 3. PADG Nomor 18 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.

Program Kerja	Realisasi
Penyusunan Payung hukum Satgas Nasional Implementasi KEJAR	Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Nasional Akselerasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar.
Koordinasi dengan Kelompok Kerja DNKI lainnya terkait dengan kebutuhan reviu kebijakan dan regulasi pelaksanaan program Keuangan Inklusif	Buku Data Nasional Terpilah Gender (DNTG)

Tabel Lampiran 1.7 Realisasi Program Kerja Kelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan

Program Kerja	Realisasi
Rumah tangga terlayani jaringan internet akses FBB terhadap total rumah tangga (akumulatif)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumah tangga terlayani (pelanggan) FBB sebanyak 14.332914 dari total rumah tangga sebanyak 68.700.700 (FBB di Indonesia baru mencapai 20,86 persen). Data layanan pada rumah tangga yang telah on ada sebanyak 2.606 titik (100 persen UMKM dan fasilitas umum/fasum), dari total 2.606 tersebut merupakan penerima bantuan yang terdiri dari 205 fasum dan 2.401 UMKM
Pemetaan desa/kelurahan di wilayah Non 3T yang akan difasilitasi peningkatan kualitas layanan seluler 4G	<ul style="list-style-type: none"> Telkomsel telah menyelesaikan pembangunan pada 103 lokasi yaitu 26 lokasi site baru dan 77 lokasi optimal dari target tahun 2024 sebanyak 267 lokasi. Indosat telah menyelesaikan pembangunan pada 17 lokasi dengan site baru dari target tahun 2024 sebanyak 17 lokasi. XL Axiata telah menyelesaikan pembangunan pada 10 lokasi dengan optimal dari target tahun 2024 sebanyak 19 lokasi. Smart Tel telah menyelesaikan pembangunan pada 17 lokasi dengan optimal dari target tahun 2024 sebanyak 17 lokasi, namun dari total lokasi tersebut terdapat 4 titik lokasi yang salah dikarenakan kurang tepatnya pemberian titik yang diserahkan oleh pihak Pemda.
Pembangunan BTS 4G di wilayah 3T (titik lokasi)	<ul style="list-style-type: none"> 1.233 site BTS USO telah on-air, dari yang awalnya sebanyak dari 1.682 BTS USO eksisting (skema sewa jasa). Pengurangan terjadi karena adanya terminasi dan moratorium karena sudah tergelarnya jaringan dari Operator Seluler di lokasi tersebut. Adapun rincian site BTS

Program Kerja	Realisasi
	<p>di Papua sebanyak 283 <i>site</i> dan non-Papua sebanyak 950 <i>site</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 5.514 site BTS <i>New Site 4G</i> (skema belanja modal), telah seluruhnya on-air dan sudah melayani masyarakat, dengan rincian <i>site</i> BTS di Papua sebanyak 2.979 <i>site</i> dan non Papua sebanyak 2.535 <i>site</i>
Utilisasi Palapa Ring	<p>Palapa Ring Paket Barat: Fiber Optic 72,67 persen</p> <ol style="list-style-type: none"> Utilisasi <i>fiber optic</i> sebesar 218 Gbps dari kapasitas <i>fiber optic</i> sebesar 300 Gbps SLA 100 persen <p>Palapa Ring Paket Tengah: Fiber Optic 44 persen</p> <ol style="list-style-type: none"> Utilisasi <i>fiber optic</i> sebesar 264 Gbps dari kapasitas <i>fiber optic</i> sebesar 600 Gbps SLA 100 persen <p>Palapa Ring Paket Timur: Fiber Optic 46,38 persen & Microwave 91,82 persen</p> <ol style="list-style-type: none"> Utilisasi <i>fiber optic</i> sebesar 371 Gbps dari kapasitas <i>fiber optic</i> sebesar 800 Gbps Utilisasi <i>microwave</i> sebesar 5.050 Mbps dari kapasitas <i>microwave</i> sebesar 5.500 Mbps SLA 100 persen
Penambahan Akses Internet di Wilayah 3T	<p>SATRIA menjadi infrastruktur yang melayani 27.858 titik lokasi akses internet yang tersebar di titik-titik layanan publik di seluruh Indonesia.</p>

Program Kerja	Realisasi
Pengembangan Infrastruktur Fast Payment	<p>Penyediaan tiga layanan baru BI-FAST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transfer Kolektif (Bulk Transfer): Memungkinkan pengiriman dana dari satu pengirim ke banyak penerima sekaligus, minimal 20 transaksi dalam satu instruksi. 2. Pembayaran atas Dasar Permintaan (Request for Payment): Memberikan kemudahan bagi penerima dana untuk mengirimkan permintaan pembayaran kepada pengirim dana. Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk penagihan pembayaran invoice dan penagihan perorangan. 3. Transfer Debit Secara Langsung (Direct Debit): Memfasilitasi pembayaran tagihan rutin secara otomatis, seperti pembayaran listrik, air, cicilan leasing, dan premi asuransi, dengan otorisasi pendebetan langsung dari rekening nasabah. <p>Penguatan infrastruktur keamanan dengan fitur <i>proactive risk manager</i> BI telah melengkapi infrastruktur BI-FAST dengan fitur Proactive Risk Manager untuk mendeteksi anomali transaksi keuangan dan memitigasi risiko transaksi mencurigakan.</p>
Sistem Informasi dan Basis Data Keuangan Inklusif	<p>Pembaharuan data, informasi, survei dan fitur terus dilakukan antara lain melalui Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI), Sistem Informasi SIUMBI (Sistem Informasi UMKM Bank Indonesia), Financial Access Survey (FAS) dari International Monetary Fund (IMF), dan Informasi Debitur (iDep) SLIK OJK melalui aplikasi iDebku.</p>

DAFTAR SINGKATAN

3T	Tertinggal, Terdepan, Terluar
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APPIK	Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
AUTS/K	Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
BAKTI	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
BES	Badan Ekonomi Syariah
BI	Bank Indonesia
BIK	Bulan Inklusi Keuangan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
BSA	Basic Saving Account
BSNT	Bantuan Sosial Non Tunai
BSPI	Blue Print Sistem Pembayaran
BTS	<i>Base Transceiver Station</i>
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDES	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CWLS	Cash Waqf Linked Sukuk
DEKS	Departemen Ekonomi Keuangan Syariah
DIF	Dana Insentif Fiskal
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DNKI	Dewan Nasional Keuangan Inklusif
DNTG	Data Nasional Terpilah Gender
DPK	Dana Pihak Ketiga
EDC	<i>Electronic Data Capture</i>
EKI	Ekosistem Keuangan Inklusif
EPIKS	Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital
FESYAR	Festival Ekonomi Syariah
FESyar	Festival Ekonomi Syariah
FinExpo	Finansial Expo
GENCARKAN	Gerakan Nasional Cerdas Keuangan
HIM	Hari Indonesia Menabung
Himbara	Himpunan Bank Milik Negara
HKI	Hak Kekayaan Intelektual

HORI	Hari Oeang Republik Indonesia
IKAD	Indeks Akses Keuangan Daerah
IKNB	Industri Keuangan Non-Bank
IKU	Indikator Kinerja Utama
ISEF	Indonesia Sharia Economic Festival
Jamkesda	Jaminan Kesehatan Daerah
K/L	Kementerian atau Lembaga
K/PMR	Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir
KEJAR	Satu Rekening Satu Pelajar
KIP	Kartu Indonesia Pintar (KIP)
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KomnasLIK	Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
KUR	Kredit Usaha Rakyat
KUSUKA	Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Laku Pandai	Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
LAPS SJK	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
LKBB	Lembaga Keuangan Bukan Bank
LKD	Layanan Keuangan Digital
LMS	<i>Learning Management System</i>
LPDB	Lembaga Pengelola Dana Bergulir
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MEKSI	<i>Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia</i>
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
ORI	Obligasi Negara Ritel
OVOA	<i>One Village One Agent</i>
P2P Lending	<i>Peer to Peer Lending</i>
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Perpres	Peraturan Presiden
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PKH	Program Keluarga Harapan
PKM	Pertemuan Kelompok Mingguan
Pokja	Kelompok Kerja
PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PSP	Penyelenggara Sistem Pembayaran
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan

PUSK	Pelaku Usaha Sektor Keuangan
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Satgas PASTI	Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal
SBN	Surat Berharga Negara
SBR	Savings Bond Ritel
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SCF	<i>Security Crowd Funding</i>
SECO	Swiss State Secretariat for Economic Affairs
SGIE	The State Global Islamic Economy Indicator
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
SID	Single Investor Identification
SLIK	Sistem Layanan Informasi Keuangan
SNKI	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
SNKIP	Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan
SNLIK	Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
SR	Sukuk Ritel
StranasLIK	Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
SUN	Surat Utang Negara
SYAFIF	Syariah Financial Fair
TPAKD	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
TPLIKD	Tim Percepatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah
UE	Uang Elektronik
UMi	Ultra Mikro
UMK	Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UUS	Unit Usaha Syariah
YoY	<i>Year Over Year</i>

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Dr. Ir. Ali Murtopo Simbolon, S.T, S.Si, M.M, M.T, IPU.

Ketua Pelaksana:

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah
Dr. Erdiriyo, SE, MM

Kontributor:

Adra sari (OJK), **Andriawan Yoga** (S-DNKI), **Angga** (Kemenperin), **Angke Putri** (ATR BPN), **Antonius Dyan** (Kemenkeu), **Ari Nugroho** (Kemenkeu), **Arinengwang Gusta** (OJK), **Ariza Ayu** (Kemenkeu), **Bambang S. Antariksawan** (OJK), **Cecilia Rooschella** (S-DNKI), **Cecep Setiawan** (OJK), **Christian Ocktavian** (BI), **Christopher Richie** (BI), **Dwinita Larasati** (S-DNKI), **Eko Setyawan** (S-DNKI), **Evan Ferrazy** (S-DNKI), **Farah Meutia** (S-DNKI), **Fatmah** (S-DNKI), **Fatimatus Firda** (Kemenkeu), **Galuh Risyanti** (BKKBN), **Helmy Faishal** (KemenBP2MI), **Indra Hardiansyah** (KemenBP2MI), **Irvan Adi Nugraha** (S-DNKI), **Ita Yenny** (Kemenkeu), **Kunthi Habri** (S-DNKI), **Melati Adiningsih** (BI), **Mochamad Fajar** (OJK), **Mutia Rahayu** (BI), **Naomi Triyuliani** (OJK), **Nony Nurbasith** (S-DNKI), **Nurbakti** (S-DNKI), **Puji Iman** (OJK), **Purwitasari Septiya** (bkkbn), **Rashinta Narulita** (S-DNKI), **Restu Dewi** (KemenBP2MI), **Rividya Permata** (OJK), **Risminda Anindita** (Kemenkeu), **Rosy Wediawaty** (Bappenas), **Salmatunna'imah** (S-DNKI), **Sambodo** (Komdigi), **Satrio Adhitomo** (S-DNKI), **Sedtiyo Budhi** (S-DNKI), **Sultan Bestari** (OJK), **Yani Farida** (Kemenkeu), **Yohanes Santosa** (S-DNKI), **Yunita Puspita** (KemenBP2MI), **Wahidah** (BKKBN), **Wayan Tony** (Kemkomdigi), **Windra** (ATR BPN), **Widyastuti Hardaningtyas** (Bappenas), **Windarty** (KemenBP2MI).

Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Pos Ibukota Lantai 5
Jl. Lapangan Banteng Utara No 1, Kota Adm Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710
Email : sekretariat.dnki@ekon.go.id
Website : <https://snki.go.id/>



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SNKI STRATEGI
NASIONAL
KEUANGAN
INKLUSIF
Membangun Indonesia Sejahtera

